



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI  
DENGAN MENTERI PERTANIAN**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 16 April 2020
Waktu	: 11.00 s.d. 17.30 WIB
Tempat	: Kantor/rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat Acara	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) : Membahas Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan <i>COVID-19</i> .
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 46 dari 55 orang Anggota Komisi IV dengan rincian:

**1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)**

10 dari 12 orang Anggota

1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2. H. Surnarna, S.E., M.Hum.
3. Drs. I Made Urip, M.Si.
4. H. Yadi Srimulyadi
5. Ir. Mindo Sianipar
6. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
7. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
8. DR. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
9. Maria Lestari, S.Pd.
10. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

- 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**  
6 Dari 8 orang Anggota
  1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua
  2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
  3. Budhy Setiawan
  4. Ir. Ichsan Firdaus
  5. Ir. Panggah Susanto, M.M.
  6. Alien Mus
- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**  
7 dari 7 orang Anggota
  1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua
  2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
  3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
  4. Ir. Sumail Abdullah
  5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
  6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
  7. Dr. Azikin Solthan, M.Si.
- 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**  
5 dari 6 orang Anggota
  1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
  2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
  3. H. Charles Meikyansah
  4. Yessy Melania, S.E.
  5. Julie Sutrisno
- 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**  
5 dari 6 orang Anggota
  1. Daniel Johan/Wakil Ketua
  2. H. Muhtarom, S.Sos.
  3. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A
  4. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
  5. Edward Tannur, S.H.
- 6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**  
4 dari 5 orang Anggota
  1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
  2. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.
  3. Muslim, S.HI, M.M.
  4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**  
4 dari 5 orang Anggota
  1. drh. H. Slamet
  2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
  3. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
  4. H. Johan Rosihan, S.T.

**8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**

3 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
2. Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E.
3. Slamet Aryadi, S.Psi.

**9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)**

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd. I.
2. Ema Umiyyatul Chusnah

**10. Sekretariat Jenderal**

**B. Pemerintah:**

1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian RI);
2. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
5. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
6. Dr. drh. I Ketut Diarmita, M.P. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
7. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
8. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
9. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
10. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
11. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian).

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):**

Pimpinan yang belum sempat datang dan Anggota Komisi IV DPR RI, Yang terhormat Menteri Pertanian beserta jajarannya, Serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Walaupun Rapat Kerja hari ini diadakan dalam bentuk virtual.

Sesuai jadwal acara rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, yang telah diputuskan dalam Konsultasi Bamus pada tanggal 27 Maret 2020 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 31 Maret 2020 pada hari ini Kamis, 16 April 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian membahas refocusing dan kegiatan realokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2020 yang untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Sesuai dengan ketentuan Tatib Pasal 246 dan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)**

Rapat Kerja ini kita mulai pada pukul 11.00 WIB dan akan diakhiri pada pukul 15.00 WIB, apabila belum dapat selesai dapat dilanjutkan sesuai Tatib DPR RI atau kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Pertanian terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Pertanian;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebelum Rapat Kerja dimulai kami menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas merebaknya pandemic *COVID-19* di hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Di mana wabah ini juga telah melanda di

seluruh provinsi di tanah air dengan jumlah korban yang cukup tinggi. Kondisi ini tentu saja memerlukan perhatian dan penanganan yang cepat, agar masyarakat yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung tidak bertambah banyak.

Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi dan mendukung kebijakan Pemerintah antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus 19 dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan virus.

Kami menyadari dengan penerapan kebijakan tersebut, kelompok masyarakat yang berpeluang besar terkena dampak dan ekonomi secara langsung adalah mereka yang bekerja di sector informal, termasuk masyarakat tani dan nelayan beserta keluarganya. Untuk itu, upaya perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak COVID-19 menjadi sangat penting sekali.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Komisi IV DPR RI memandang perlu untuk mengkaji ulang program dan anggaran Kementerian Pertanian tahun anggaran 2020 sehingga implementasinya dapat memberikan manfaat secara langsung bagi petani dan keluarganya, baik manfaat yang bernilai ekonomi dari hasil usaha pertanian yang dikembangkan di sekitar tempat tinggal maupun manfaat berupa sumber protein, buah, sayur, sesuai dengan rekomendasi Pemerintah dalam menjaga stamina tubuh.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 serta Impres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID -19. Terutama dalam memenuhi ketersediaan pangan, Komisi IV DPR RI berharap agar refocusing kegiatan dan realokasi anggaran difokuskan pada program memberikan stimulus ekonomi kepada petani dan keluarganya.

Peningkatan produksi, jaminan ketersediaan pangan, jaringan pengamanan sosial, serta antisipasi pasca COVID -19, antara lain:

1. Evaluasi program dan tahun anggaran 2020 dengan memformulasikan kepada program yang sangat mendesak selama periode bulan April sampai Oktober 2020 dan program pasca pandemik COVID -19.
2. Kegiatan peningkatan produksi melalui bantuan sarana dan prasarana produksi yang dapat memberikan stimulus ekonomi atau meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, seperti pengembangan tanaman buah semusim, pengembangan sayuran dataran rendah, dataran tinggi, palawija, bibit ternak, dan bantuan alat pengolahan hasil.
3. Kegiatan peningkatan produksi pertanian dengan mengupayakan pemberian komponen upaya tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan pendapatan bagi petani dan masyarakat.

4. Penyerapan produksi bahan pangan yang dihasilkan oleh petani di tingkat harga yang wajar, menjaga stabilitas harga produksi bahan pangan di tingkat konsumen.
5. Jaminan ketersediaan sumber daya pangan, bahan pangan kepada petani dan masyarakat melalui kegiatan budi daya dilahan perkarangan maupun memaksimalkan fungsi toko tani Indonesia dalam rangka optimalisasi pemasaran hasil pertanian dari tingkat petani sampai ke konsumen.
6. Mendorong Pemerintah untuk menanggukuhkan program investasi dan program Pemerintah lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan petani. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan serta program yang tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat.
7. Melakukan realokasi anggaran perjalanan dinas, rapat, seminar dan kegiatan yang tidak prioritas atau kurang mendukung Tupoksinya karena kami melihat saudara Menteri sampai saat ini masih banyak hal-hal yang belum kita capai, apalagi ini sudah menjelang bulan April *COVID-19* tidak tahu sampai kapan, saya berharap badai ini cepat berlalu.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa pada hari Jum'at 3 April 2020 yang lalu Komisi IV DPR RI melakukan audiensi dengan Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia terkait dengan permasalahan tata niaga perunggasan dan industry perunggasan rakyat yang selama beberapa bulan terakhir mengalami kerugian kondisi. Kondisi ini tentu saja harus mendapatkan perhatian bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tentu saja tidak pada komoditas perunggasan, namun komoditas pertanian terutama dan kondisi *pandemic COVID-19*.

Saudara Menteri, pada waktu itu dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia mengusulkan, mereka meminta memberhentikan Dirjen PKH karena dianggap tidak mampu bekerja dengan baik. Tidak ada kordinasi yang baik antara Dirjen, Direktur dan yang dianggap staf ahlinya.

Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasannya terkait hal-hal tersebut di atas.

Kami persilakan.

**MENTERI PERTANIAN (Dr. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati dan banggakan Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI,

Para Sekjen dan Kepala Badan, Dirjen, kami lengkap semua Eselon I, bahkan sebagian Eselon II mengikuti dari *video conference* ini, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian.

*Alhamdulillah wa syurillah wala kuata illa billah robbi sohri sodri waya sirli amri wahlul udata milisani yafkohu kaouli.*

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI.

Rasanya .... saya menghadapi wabah, kelihatan Ketua dan yang lain-lain gagah sekali dilayar monitor yang ada mudah-mudahan segagah dan seceria kita semua hari ini.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat.

Mengawali Rapat Kerja hari ini, saya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI, mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan Rapat Kerja pagi ini dengan agenda refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagai tindak lanjut Impres Nomor 4 Tahun 2020.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati, Bapak dan Ibu hadirin sekalian.

Sebelum kami laporkan agenda utama *refocusing* kegiatan realokasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020, ijinakan kami melaporkan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI tentang upaya yang telah dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka menyiapkan ketersediaan pangan bagi 267 juta kurang lebih jumlah penduduk utamanya dalam menghadapi dampak *pandemic* virus corona atau *COVID-19* ini yang kita belum tahu kapan akan berakhir, sejauhmana kedalaman yang ada, serta dalam rangka menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri sebagai big section yang ada.

Menurut perhitungan Kementerian Pertanian dan laporan dari dinas yang menangani pertanian dan ketahanan pangan di daerah di seluruh Indonesia serta pengecekan langsung di lapangan stok 11 komoditi pangan pokok diperhitungkan Insya Allah masih dalam keadaan terkendali dan aman

Stock beras sampai dengan Mei 2020, surplus 7,78 juta ton dan jagung surplus 4,33 juta ton. Bawang merah surplus 240,39 ribu ton, begitu juga komoditi lain yang diperkirakan surplus. Beberapa komoditi seperti bawang putih, gula dan daging sapi, kerbau diperhitungkan tersedia dan jumlah yang cukup sampai 2020, walaupun sebagian masih didukung melalui impor.

Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya telah mempermudah proses impor melalui percepatan penerbitan RIPH salah satunya untuk bawang putih. Dimana sampai tanggal 31 Maret 2020 telah diterbitkan RIPH Bawang Putih sebanyak 460 ribu ton lebih, melalui percepatan RIPH tersebut diharapkan ketersediaan dalam negeri akan terjamin dan tetap terkendali.

Dalam slide bisa kita lihat 11 komoditi itu adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng.

Bapak Ketua dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan.

Ada 3 yang berorientasi impor atau diperkuat dengan impor adalah awing putih 196,549 ton atau 196 ribu ton lebih. Kemudian daging sapi 109 ribu lebih dan gula pasir 672 ribu ini yang diperkuat impor. Tetapi dalam neraca yang kita miliki semuanya kemudian dengan stock yang ada, maka Insya Allah semua akan tetap terkendali dan aman. Minimal sampai dengan Mei, artinya Ramadhan sampai Mei itu Lebaran Insya Allah akan aman.

Bapak Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan.

Bahkan kami sudah .... kurang lebih seperti itu.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Selain melakukan upaya pengamanan ketersediaan pangan, Kementerian Pertanian juga membuat langkah strategis yang diperlukan guna menghadapi dampak pandemik COVID-19. Langkah strategis sedang dirancang dan akan segera diimplementasikan melalui kegiatan, yang pertama agenda SOS atau emergency atau agenda darurat, agenda jangka pendek dalam mengatasi permasalahan produksi dan pemasaran hasil panen yang akan dilakukan sampai bulan Mei pada saat bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1441 hijriah dengan target, yang pertama fasilitasi cold storage untuk menyimpan ayam potong oleh mitra dan integrator yang membeli ayam hidup atau life bird dari peternakan kecil dan mandiri sesuai harga acuan untuk menyelamatkan harga ayam yang rendah di tingkat peternakan ayam.

Jadi ayam-ayam yang seperti yang ada sekarang ini cenderung turun harganya. Kita sudah membuat langkah SOS-nya adalah akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati dengan mitra kerja yang ada atau integrator yang ada. Dan kita berharap juga penyanggah yang telah ditunjuk bisa melakukan stocking yang ada.

Yang kedua, mendorong kenaikan harga jula gabah petani guna kembali nilai tukar petani saat panen raya tidak jatuh atau mampu kita pertahankan sesuai dengan NTP yang ada. Yang ketiga, membangun barber shop untuk 11 pangan utama di setiap provinsi melalui penjualan dan pergudangan pasar mitra tani atau toko mitra tani. Kerja sama dengan Pemda, BUMN, BUMD, serta swasta dan mitra yang selama ini ikut bersama-



sama kita. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan padat karya dalam rangka social safety net daripada petani yang akan kita dorong. Itu agenda darurat dan kita berharap Mei sampai Agustus masih terus akan kita pertahankan dan diperkuat.

Yang kedua, agenda temporary atau agenda jangka menengah dalam rangka mengantisipasi dampak lanjutan pandemik *COVID-19*, yaitu mendorong ekspor produk pertanian yang semaksimal mungkin yang mampu kita lakukan. Per hati ini ekspor yang terbesar dari ekspor Indonesia adalah Kementerian Pertanian. B. melanjutkan kegiatan padat karya II, artinya kita berharap bisa menyentuh padat karya itu pada 34 provinsi dan sekaligus akan memberikan penerimaan atau bantuan langsung melalui kerja-kerja di berbagai aspek yang terkait dengan pertanian, contohnya adalah irigasi tersier, kemudian jalan tani dan lain-lain.

Yang C. meningkatkan pemberdayaan pemudik serta narapidana yang diasimilasi dan berprofesi petani. Banyak petani kegiatan pokoknya kalau sudah menanam dia ke Ibu Kota kemudian mau panen dia kembali melakukan panen dan lanjut melakukan penanaman. Hal-hal seperti ini harus mendapatkan perhatian oleh kita. Oleh karena itu, akan tetap diantisipasi termasuk beberapa pemudik yang secara langsung. Ini dibicarakan dalam Rapat Terbatas Kabinet yang lalu, antara lain pemudik-pemudik yang dari Malaysia, kemudian narapidana yang kembali dan menetapkan profesi kepada pertanian, maka diberikan paket bantuan benih bibit, baik tanaman maupun ternak unggas.

Yang ketiga, agenda permanen atau agenda jangka panjang pembangunan selama 5 tahun kedepan diantaranya tetap kita pada peningkatan produksi rata-rata 7% per tahun. Kemudian yang kedua, meningkatkan ekspor dengan target tingkatan 3 kali lipat yang ada, mudah-mudahan *COVID-19* ini segera berakhir. Kerja target ini bisa terus bisa kita lakukan.

Yang ketiga menurunkan losis menjadi 5% dari seluruh .... Pertanian yang ada.

Yang keempat adalah meningkatkan jumlah pengusaha petani milenial yang menjadi target kita dalam 5 tahun, dari jumlah 2,5 juta orang. Kemudian kita berorientasi untuk mendukung B30 dari pengembangan sawit yang ada, sehingga bio diesel bisa kita lakukan. Yang kelima adalah eksentifikasi tanaman pangan pertanian dan out farm dari pertanian yang ada. Artinya, kita sudah masuk kepada agenda-agenda untuk mengantisipasi kekeringan 2021 dan termasuk didalamnya adalah kemungkinan terjadinya sesudah *COVID*, warning dari WFO akan terjadi krisis pangan dunia. Kita sudah masuk kepada ha-hal seperti itu.

Bapak Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI.

Saya kira 3 agenda ini membutuhkan pembicaraan lanjutan yang lebih detail, lebih teknis baik di internal pertanian sampai ke jajaran provinsi,

kabupaten maupun dengan Komisi IV DPR RI. Saya kira tidak cukup dalam waktu yang ada sekarang ini. Tentu saya kami berharap Bapak Ketua, untuk kami bisa ekspose lebih teknis. Dan tidak mustahil dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar sesuai dengan apa yang kita sepakati nanti.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Secara khusus perlu kami laporkan pula kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, bahwa saat ini ada dua hal yang berdasarkan laporan yang kami peroleh perlu segera ditangani. Yang pertama, permasalahan turunnya harga ayam hidup atau *live bird* di beberapa peternak mandiri. Dan kedua menurunnya harga gabah saat panen raya di berbagai daerah yang berpotensi menyebabkan menurunnya nilai tukar petani.

Terkait dua isu penting tersebut Kementerian Pertanian melakukan respon cepat. Melalui rencana tindak lanjut sebagai berikut, yang pertama terkait dengan adanya laporan penurunan harga ayam hidup di peternakan kecil atau mandiri, maka telah ada komunikasi antara Kementerian Pertanian dengan mitra atau integrator ... kesepakatan sebagai berikut Ketua:

- a. Perusahaan mitra atau integrator akan membeli ayam hidup atau *live bird* dari peternak mandiri diluar peternakan binaan Masing-masing mitra minimal pada harga batas sesuai dengan Permendag Nomor 7 Tahun 2020.
- b. Kementerian Pertanian akan memfasilitasi penyewaaan *cold storage* yang diperlukan perusahaan mitra integrator untuk menyimpan ayam dalam bentuk ... yang sudah dibeli dari peternak kecil atau mandiri. Tentang fasilitasi biaya distribusi yang diperlukan perusahaan mitra integrator dalam mendistribusikan ... yang sudah dibeli dari peternak mandiri ke pasar atau konsumen melalui Gojek atau angkutan online lainnya yang sudah bekerja sama dengan Kementan.
- c. Perusahaan mitra atau integrator sepakat akan terus mendorong sebagian hasil pembelian lain ... dari Peternakan mandiri untuk dioleh dari .... Menjadi produk turunan seperti *chicken nugget* atau produksi lain yang bisa menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut.
- d. Pemerintah akan memberi *reward and punishment* kepada perusahaan atau mitra integrator yang sudah berjasa menyelamatkan peternakan mandiri Indonesia dari ancaman gulung tikar karena dampak *COVID-19*.
- e. Selain 4 butir kesepakatan tersebut di atas, Kementerian Pertanian menyiapkan *grand strategy* pemberdayaan ekonomi peternak ayam mandiri baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Yang kedua, terkait dengan terjadinya penurunan harga gabah petani yang sudah memasuki musim panen bulan Maret akan berlanjut pada bulan April dan Mei diprediksi berpotensi menyebabkan menurunnya nilai tukar petani atau NTP. Untuk itu, Kementerian Pertanian berupa mengambil langkah cepat melalui berbagai terobosan agar penurunan harga gabah di petani dapat diatasi, sehingga petani mendapat harga jual gabah yang wajar

dan tidak menyebabkan menurunnya nilai tukar petani. Langkah yang akan dilakukan meliputi:

- a. Mengakselerasi kegiatan penggilingan padi, yaitu dengan mengupayakan agar penggilingan padi mendapatkan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp500 juta per penggilingan untuk modal menyerap gabah petani.
- b. Memperlancar transportasi pergerakan hasil panen padi di daerah dengan memberikan jaminan bahwa Pemerintah akan membantu kelancaran transportasi melalui surat resmi yang diberikan kepada petani sebagai pegangan yang dipakai dilapangan.
- c. Kementerian Pertanian juga mendorong penggilingan padi untuk bekerja sama dengan Gojek atau sejenisnya untuk mendistribusikan beras langsung kepada masyarakat.
- d. Kementerian Pertanian akan mendorong kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan penggilingan dapat beroperasi dengan baik, namun tetap mengikuti aturan langkah-langkah pencegahan COVID-19.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Beberapa langkah penting lainnya yang akan segera dilakukan dalam mengantisipasi dampak pandemik COVID-19 dan saat ini juga kami telah merumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong dan mempercepat program bantuan sarana produkis, alat dan mesin pertanian, benih, bibit, pupuk, pakan ternak, obat dan vaksin, dan sarana produksi lainnya ke masyarakat petani untuk produksi bahan pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia.
2. Mengakselerasi produk pertanian melalui kegiatan padat karya, perbaikan sarana irigasi, gerakan tanam, pengendalian OPT dan panen dengan mempekerjakan para tenaga kerja yang kehilangan penghasilan akibat dampak pandemik COVID-19.
3. Mendorong kelancaran distribusi bahan pangan pokok, beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi dan kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir dan minyak goreng serta komoditas ekspor wallet, kepala sawit, kopi, lada dan komoditas ekspor pertanian lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat dan meningkatkan perolehan devisa yang ada.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Terkait dengan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian 2020. Perlu kami sampaikan Kementerian Pertanian mengusulkan penyesuaian anggaran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020. Basis anggaran yang semula sebesar Rp21,05 triliun diusulkan mengalami penyesuaian menjadi Rp17,44 triliun yang meliputi kepada 11 Eselon I dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal sebesar Rp1,84 triliun.
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp105,33 miliar.
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp4,26 triliun.

4. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp391,87 miliar.
5. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp1,15 triliun.
6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1,77 triliun.
7. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp2,60 triliun.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp1,69 triliun.
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp1,58 triliun.
10. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp693,56 miliar.
11. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp983,45 miliar.

Dalam rangka percepatan kegiatan pengamanan ketersediaan pangan menghadapi pandemi *COVID-19* serta antisipasi Ramadhan dan Idul Fitri 1441 Hijriah yang sebentar lagi akan kita jalani, maka Kementerian Pertanian berupaya tetap bekerja keras dan membuat kebijakan antisipasi mengacu kepada:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *COVID-19* dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian.
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

Berdasarkan regulasi seperti tersebut di atas, Kementerian Pertanian mengambil langkah strategis melalui *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 tentang hal tersebut. Saya sebagai Menteri Pertanian telah mengeluarkan Surat Edaran untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran akan menjadi pedoman bagi semua jajaran Eselon I melalui:

1. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 1/SE/PN.010/03/2020 tentang Strategi Kementerian Pertanian dalam rangka pencegahan dan perlindungan dari dampak penyebaran virus *COVID-19*.
2. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 02/SERS/RT.210/M/03/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2020 sebagai antisipasi dampak *pandemic* virus *COVID-19*.
3. Melalui kerja sama pasar mitra tani atau toko tani dengan Gojek untuk mendistribusikan barang pangan pokok.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Selanjutnya mengacu kepada Inpres Nomor 4 Tahun 2020, maka Kementerian Pertanian mengusulkan refocusing kegiatan realokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp1,85 triliun yang diperuntukan bagi:

1. Mendorong pencegahan penularan COVID-19 Rp45 miliar dengan rincian:
  - a. Kegiatan penyiapan sarana dan peralatan medis.
  - b. Pembelian suplemen dan daya tubuh.
  - c. Setrilisasi seluruh lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Mendukung pengamanan ketersediaan pangan sebesar Rp198,95 miliar, meliputi:
  - a. Operasi pasar pangan murah dan stabilitasi harga pangan.
  - b. Bantuan penyerapan gabah dan transportasi angkutan distribusi pangan.
  - c. Pemantapan ketersediaan stabilitas patokan dan harga pangan pokok.
3. Merancang kegiatan sosial safety net termasuk program padat karya sebesar Rp1,60 triliun, meliputi kegiatan:
  - a. Padat karya gerakan pengendalian OPT.
  - b. Padat karya olah tanah dan percepatan tanam.
  - c. Padat karya perkebunan.
  - d. Padat karya realisasi jaringan irigasi, tingkat usaha tani.
  - e. Padat karya pembangunan lumbung pertanian.
  - f. Padat karya optimalisasi lahan rawa.
  - g. Padat karya irigasi perpipaan dan perpompaan sertaantisipasi kekeringan dan banjir.
  - h. Padat karya sekolah lapang pertanian.
  - i. Penumbuhan jiwa kewirausahaan dan penyerapan tenaga kerja pertanian, serta pembinaan UMKM pertanian.
  - j. Bantuan benih, pangan, hortikultura dan perkebunan.
  - k. Bantuan pangan dan penguatan RPL.
  - l. Fasilitasi bantuan ayam, kambing, domba untuk penanganan dampak penyebaran COVID-19 dan mendukung ketersediaan pangan.

Realokasi anggaran sebesar Rp1,85 triliun tersebut, secara rinci dapat dilihat pada bahan yang telah kami sampaikan kepada Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Besar harapan kami melalui kerja hari ini, penyisihan anggaran sesuai amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2020 serta refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sesuai amanah dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 yang kami usulkan mendapatkan dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja pada hari ini, apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci, saya mohon berkenan Pimpinan agar pejabat Eselon I yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tambahan.

Atas segala perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya kembalikan Ketua.

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan.

Setelah mendengar penjelasan saudara Menteri dan membaca serta mempelajari paparan terkait realokasi, refocusing dari Kementerian Pertanian terlihat adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan program *social safety net* yang menjadi program Pemerintah.

Sehungan dengan hal tersebut di atas, setiap Anggota sudah membaca dan mempelajari sehingga dirasa perlu adanya realokasi terhadap program yang belum tepat sasaran. Di Dirjen untuk mendukung teknis keberlangsungan produksi dan kesejahteraan petani. Berdasarkan penelaahan ada anggaran yang cukup signifikan dan tidak sesuai dengan aturan arahan Presiden berdasarkan Perpres Nomot 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 serta Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Terkait dengan *social safety net* atau padat karya yang perlu segera direalokasikan dari kegiatan yang sifatnya bersentuhan langsung kepada masyarakat atau non teknis untuk selanjutnya diarahkan kepada program teknis petani sehubungan dengan produksi dan distribusi.

Program-program diantaranya sesuai dengan arahan Presiden memotong sebesar 50% anggaran perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pertemuan atau hal-hal lain yang sifatnya berkumpulnya orang ataupun acara-acara dengan agenda yang tidak mungkin dilakukan dalam situasi *pandemic COVID-19*. Ini masih ditemukan di Sekjen, Badan SDM dan Badan Litbang.

Adanya program ekspor yang tidak mungkin dilakukan adlam kondisi hari ini atau kegiatan kebijakan serta pelayanan yang tidak realistis tercantum di Badan Karantina. Adanya program-program dirjen teknis yang seharusnya lebih bersentuhan dalam situasi tidak menentukan yang diakibatkan oleh *pandemic* dikalangan petani hari ini pengembangan data, peningkatan kawasan, Bimtek yang masih intens muncul di Eselon I teknis.

Selanjutnya kami persilakan Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaannya. Yang pertama yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan Bapak Mindo Sianipar.

Silakan Pak.

**F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Sudah kedengaran belum Bapak Ketua?

**KETUA RAPAT:**

Sudah.

**F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):**

Pak Ketua, terima kasih.

Bapak Menteri yang saya hormati.

Saya mendengar apa yang sudah disampaikan walaupun tidak bisa membaca secara cermat apa yang menjadi program-programnya. Yang pertama, seperti arahan Presiden hal-hal yang secara langsung yang bermanfaat dalam waktu 6 bulan ini, itu yang harus kita kerjakan. Saya berharap memang kalau perjalanan dinas itu kalau Bapak Presiden mengatakan 50% saya kira kalau keluar negeri tidak perlu untuk sementara ini, orientasi kita hendaknya untuk yang dalam negeri. seluruh upaya kita, kita arahkan memastikan sekali lagi memastikan pelayanan kesediaan pangan yang bisa kita produksi selama 6 bulan ini perlu diamankan. Nanti berikutnya jangan terlalu optimis kita mengatakan seperti itu, karena dari tahun-tahun yang lalu seringkali informasi seperti itu. Dalam keadaan cuaca yang tidak bersahabat pun pada periode lalu itu mengatakan akan memperoleh hasil panen yang luar biasa. Kita sepakat bahwa memakai data tunggal dan kehati-hatian menyampaikan data itu perlu menjadi perhatian Bapak Menteri.

Yang kedua, tadi saya mendengar persoalan tentang harga *life bird*, harga ayam hidup yang sangat rendah. Keadaan ini saya kira sudah lebih dari 6 bulan, dan itu akan terus sampai sekarang menurun terus, menurun terus karena memang demandnya menjadi menjadi berkurang. Sementara mereka peternak kecil harus tetap memproduksi. Jadi kalau disampaikan tadi akan menyiapkan cold storage dalam bentuk apa penyiapan itu. Apakah pemberian dana kepada para integrator atau itu merupakan titipan kepada BUMN yang akan dikerjasamakan dengan kumpulan atau asosiasi dari pengusaha-pengusaha mandiri tadi.

Jadi sekali lagi terkait dengan unggas dan telur, satu-kesatuan yang harganya turun mengingatnya demandnya pun berkurang. Tidak ada pesta-pesta, tidak ada pertemuan-pertemuan akbar, kita mau tidak akan mengurangi, sementara kehidupan para peternak kecil itu memang dari situlah dia. Nah, ini saya senang kalau memang disebutkan ada upaya

membeli dan menyimpannya dalam *cold storage* saya kira itu salah satu jalan yang tepat. Persoalannya adalah kepada siapa uang negara itu akan diberikan. Jangan sampai karena *COVID* ini hal-hal yang menyangkut administrasi kenegaraan, administrasi anggaran itu terabaikan. Itu juga akan merugikan kementerian nantinya.

Saya kira demikian Bapak Ketua, saya akan mengikuti rapat ini sampai selesai.

Terima kasih Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Mindo.

Selanjutnya Pimpinan saya yang terhormat Bapak Dedi Mulyadi.

Silakan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):**

Baik.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Sampurasun.*

Bapak Ketua ku Pimpinan tertinggi di Komisi IV DPR RI terima kasih atas kesempatannya,  
Para Wakil Ketua, para Anggota, Bapak Menteri serta segenap jajaran Direktorat Jenderal yang saya hormati.

Ada 3 hal pokok yang menjadi titik dari pembicaraan kita, yang pertama bahwa hari ini panen terjadi dimana-mana tetapi semangat petani mengalami penurunan karena harga gabahnya relatifnya menurut saya relative rendah. Padahal di tengah-tengah *COVID* ini para petani dan buruh tani harus ditopang untuk segera menanam kembali untuk mengamankan cadangan pangan, kepentingan nasional kedepan. Sehingga dalam proses produksi pada periode musim tanam pada bulan April-Mei ini. Menurut saya Kementerian Pertanian harus segera mendorong berbagai distribusi bantuan agar para petani mengalami keringanan dalam produksi, baik pupuk, kemudian benih maupun biaya produksi lainnya termasuk kelengkapan bagi mereka para petani dan buruh tani.

Yang kedua, bahwa banyak sekali fasilitas infrastruktur pertanian yang mengalami problem akibat bencana, baik yang berskala kecil maupun besar sehingga aliran airnya tidak berjalan dengan lancar. Seluruh infrastruktur pertanian harus diarahkan kepada upaya padat karya untuk memperbaiki infrastruktur pertanian. Sehingga musim tanam bisa dilaksanakan dengan



lancar dan kemudia para petani, buruh tani mendapatkan tambahan, yaitu menjadi para pekerja kuli padat karya di berbagai kegiatan sektor pertanian.

Yang ketiga, kita focus harus bersifat berkeadilan tidak memanjakan pada satu kelompok saja yang mendapat berbagai bantuan dari berbagai kalangan, karena COVID ini sangat berdampak bagi kepentingan masyarakat luas, khususnya di bidang pertanian.

Dan terakhir saya katakan satu-satunya sektor andalan yang bisa menyelamatkan Indonesia hari ini adalah ketersediaan pangan dan itu didalamnya adalah sektor pertanian, sehingga saatnya para petani yang muncul kepermukaan yang dikasih diskon jangan hanya yang lain saja tetapi para petani yang panenya haya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, juga dapat harian dan para petani sampai hari ini tidak bicara karena memang para petani tidak pernah protes diperlakukan apapun oleh negara, mereka diam dan menerima selalu patuh. Dan orang-orang yang patuh ini seringkali kurang mendapat perhatian dan kita sering memperhatikan orang yang cerewet.

Itu saja, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Sampurasun,  
Nuhun Bapak Ketua.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Gerindra, Bapak Kanjeng silakan.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Selamat pagi.

Bapak Menteri yang kami hormati,  
Bapak Ketua, para Eselon I dan Anggota.

Mencermati apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, *refocusing* realokasi anggaran dari Rp21 triliun menjadi Rp17,4 triliun. Saya melihat masih perlu dicermati kembali karena apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Bapak Presiden mengatakan apabila situasi COVID-19 berkepanjangan kemungkinan akan ada pemotongan anggaran baru lagi. Maka saya minta dicermati kembali program khusus pertanian tahun ini yang penting prioritas mendesak itu yang diprioritaskan, maka saya sarankan perlu dicermati kembali.

Terus yang kedua, untuk COVID-19 saya belum membaca anggarannya. Saran saya karena Kementerian Pertanian sebagai ujung

tombak, maka minimal 50% itu untuk pengadaan pangan yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti ada warung tani itu bagus tapi saya lihat warung tani juga belum menyediakan membeli sayur-sayur yang ada yang dari daerah-daerah seperti dari kampung saya sana. Kacang panjang tiap dua hari ke Jakarta sekarang berhenti saya kira itu harus dibeli.

Yang ketiga Bapak Ketua, saya ingin memberi masukan kepada Bapak Menteri sehubungan dengan banyaknya laporan juga masukan tadi mitra, juga karena saya kebetulan juga sebagai salah satu unsur Ketua di KHTI. Saya minta kepada para Eselon I jangan cari panggung sendiri-sendiri. Tolong kalau memang ada statement-statement salurkan lewat Humas, lewat Sekretaris Jenderal. Ini sudah pernah saya sampaikan kepada Bapak Sekjen. Contoh saja Bapak Menteri, soal beras salah satu Dirjen mengatakan bulan ini surplus 2,5 juta ton. Tapi tolong perhatikan bahwa tahun ini situasinya berbeda, kemungkinan akan menjadi kemarau panjang. Dan yang menarik lagi selama ini seperti yang disampaikan Bapak Mindo tadi selalu surplus-surplus beritanya dari Kementerian Pertanian, tapi di satu sisi impor terus. Maka ini jangan sampai terulang lagi karena kalau ini terjadi sampai kekurangan beras kita yang bisa impor dari Vietnam dan negara lainnya, negaranegara tersebut sekarang sudah *lockdown*. Tidak mungkin memikirkan ekspor keluar beras-berasnya akan dipakai cadangan untuk dalam negeri. Kalau ini sampai terjadi di Indonesia sekarang ini sangat merugikan.

Terus yang kedua, soal gula. Gula pada bulan Desember dikatakan cukup sampai bulan Mei, kenyataannya bulan ini kita mengalami luar biasa kekurangan gula bahkan Pemerintah akan impor 672.500 ton ini beda situasinya. Nah, jadi saya harapkan bahkan harga gula sampai Rp18.000,00 sampai Rp20.000,- bahkan baru hari ini seperti saya sampaikan pada menteri terdahulu telah terjadi oplosan gula rafinasi dengan gula tebu, 2:1 ini sudah tertangkap di Jawa Tengah oleh Kepolisian. Ini menunjukkan bahwa memang kekurangan gula. Maka saya minta kepada Bapak Menteri, ini betul-betul impor itu dipertimbangkan karena bulan depan ini kita panen raya tebu, tebu rakyat akan produksi. Nah, ini juga jadi perhatian kita Bapak Menteri.

Terus selanjutnya juga tadi penugasan beras saya lupa. Bulog akan membeli cadangan beras 950 ribu ton, tapi Bulog minta jaminan. Pertama, jaminan mengenai penugasan itu berapa. Yang kedua, jaminan pelepasan karena pengalaman yang lalu Bulog stocknya cukup besar tetapi justru pelepasannya pakai uang tunai, sehingga jadi masalah dan berasnya jadi masalah. Yang ketiga, karena Bulog ini adalah pakai uang daripada pinjaman komersil saya kira ini perlu bantuan dari Bapak Menteri Pertanian bagaimana biar Bulog itu bisa hidup. Apalagi baru-baru ini kelua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 harga HPP naik jadi Rp4.200,00 saya kira kalau ini dilaksanakan petani-petani akan lebih baik lagi.

Selanjutnya tadi soal bawang putih, saya kira juga melaporkan juga kepada Bapak Ketua dan juga kepada teman-teman Eselon I tolong Eselon I itu jangan melakukan dekresi, dekresi itu kebebasan bertindak. Teman-teman Eselon I tetap mempedomani Undang-Undang, contohnya bawang putih Undang-Undang Nomor 13 tentang Hortikultura Pasal 88 Ayat (2) itu jelas

impor harus ada ijin dari Menteri tapi Eselon I mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan itu sejalan dengan Menteri Pertanian. Saya kira kita harus berani tegas menghadapi seperti itu. Makanya jangan coba-coba melakukan dekresi, dekresi adalah kewenangan Menteri dan Presiden. Kalau ini dilakukan oleh Dirjen ya resikonya akan mengalami sendiri. Maka saya minta kepada Bapak Menteri tolong Bulog ini dipertimbangkan dan diperhatikan bagaimana bisa untung itu.

Yang selanjutnya tadi soal ayam, ayam itu sudah berapa kali dilaporkan kepada kita dan kepada Menteri waktu Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja, bahwa rakyat ini merasa dapat tekanan harganya. Ini sebetulnya akibat daripada adanya ijin pengusaha besar boleh menternakan ayam. Pengusaha besar tidak ada masalah karena pengusaha besar adanya subsidi antara anak ayam, cucu ayam, sama juga obat-obatan dan makanan ternak, itu subsidiya sehingga harganya turun pun tidak begitu masalah, tapi bagi rakyat kecil itu masalah.

Nah, tadi disampaikan oleh Bapak Menteri kita akan impor daging kerbau 109 ribu ton. Tolong diingat daging kerbau itu dari India, India sekarang lockdown tidak mungkin akan berpikir ekspor. Maka saran saya seperti kepada Bulog kemarin kesimpulan rapat agar daging kerbau diganti dengan daging ayam. Kalau tadi rekomendasi Bapak Menteri akan mengadakan bimbingan, akan mengadakan cold storage itu 1 tahun belum tentu terealisasi Bapak Menteri. Jadi saran saya itu perlu ditindaklanjuti.

Yang terakhir, ini tolong kepada Bapak Menteri karena ini rekomendasi dari teman-teman terlalu banyak Eselon I kurang komunikasi, kurang tanggap daripada laporan-laporan daripada mitra ataupun dari masyarakat. Yang tidak enaknyanya Bapak Menteri, ini saya sampaikan karena didengar oleh yang mengajukan hampir lebih dari 4 Eselon I minta diganti Bapak Menteri. Saya kira namanya Bapak Ketua sudah tahu, jadi mohon ini jangan sampai terjadi teman-teman Eselon I bisa memperbaiki kinerjanya.

Terima kasih Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Kanjeng.

Selanjutnya yang mewakili Partai Nasdem, Bapak Charles silakan.

#### **F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Ketua dan teman-teman Komisi IV DPR RI,  
Bapak Menteri Pertanian dan jajaran.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Bapak Ketua yang saya hormati.

Dari paparan *refocusing* anggaran untuk mengahapi COVID-19 penting adanya bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Terdapat program daripada penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian berupa batuan modal bagi wirausahawan dan pertanian mendukung ketersediaan pangan dan penyerapan tenaga kerja pertanian untuk mengurangi dampak ekonomi *pandemic* dari COVID-19.

Dengan anggaran yang cukup besar menurut saya sebesar Rp30 miliar. Program ini sangat penting mengingat jumlah pekerja dirumahkan atau PHK pada 4 April 2020 sudah sangat besar. Dari data terakhir yang kami miliki PHK di DKI Jakarta saja sudah mencapai 162 ribu orang lebih, Jawa Barat 43 ribu, kemudian Jawa Timur 7000 lebih, Jawa Tengah 2000 lebih, dan di Yogyakarta 14 ribu lebih. Ini adalah angka pekerja formal dan pekerja non formal yang terdampak oleh COVID-19, tentunya jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu menurut kami penting untuk menambah anggaran bantuan modal kepada masyarakat seperti program bantuan modal bagi wirausahawan muda pertanian mendukung ketersediaan pangan.

Bantuan dalam berbagai bentuk pada masyarakat yang terdampak pandemic sangat penting untuk disegerakan Pak Menteri. Asumsinya lesunya perekonomian global dan nasional harus distimulus dalam bentuk intervensi kebijakan dari Pemerintah. Nah, kemudian sebagaimana terkait ketahanan pangan sangat penting untuk memastikan kebutuhan bahan pokok atau 11 komoditas strategis nasional. Harga gula yang relative naik namun memastikan kebutuhan pokok terjamin selama COVID-19 berlangsung sangat penting untuk tetap dipastikan. Dengan demikian kami berharap anggaran untuk memastikan kebutuhan pokok terjaga seperti program padat karya ketahanan pangan berupa stabilitas harga pangan, bantuan pangan dan lain sebagainya harga tetap dijaga, anggarannya tetap tersedia. Jika memang dibutuhkan untuk ditingkatkan anggaran kami salah yang mengatakan siap untuk mendukung karena di tengah pandemic dan berlakunya PSBB di beberapa daerah memastikan kebutuhan pokok tetap terjaga adalah kebutuhan yang sangat penting.

Bapak Ketua dan Bapak Menteri, itu mungkin yang terkait dengan *refocusing* yang perlu saya sampaikan dari Fraksi Nasdem. Kemudian yang kami terima dari Jawa Timur tadi malam kami berdialog dengan beberapa Kepala Daerah khususnya di Dapil saya, daerah Lumajang, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang menyampaikan kepada kami bahwa produksi padi di Lumajang setiap tahunnya surplus lebih dari 400 ribu ton. Surplus produksi padi ini masih belum memiliki nilai lebih dalam rangka perekonomian di Lumajang.

Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Lumajang menyampaikan harapannya agar daerah-daerah yang surplus produksi padi bisa diintervensi oleh Pemerintah Pusat agar memproduksi beras dalam bentuk kemasan agar bisa memberikan mata pencaharian baru di Kabupaten Lumajang dan juga memberikan nilai lebih terhadap surplus padi itu sendiri.

Yang terakhir, saya ingin menyampaikan informasi juga dari teman-teman gula di Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu penghasil gula nasional musim giling tebu biasanya berlangsung pada bulan Juni. Nah, saat ini sebenarnya sudah tersedia tebu untuk digiling akan tetapi karena ada kesepakatan diantara pabrik gula, baik Pemerintah maupun swasta untuk memulai musim giling pada bulan Juni sehingga dibutuhkan kebijakan atau intervensi dari Pemerintah untuk memulai musim giling lebih awal. Oleh karena itu, kami meminta kepada Menteri Pertanian untuk berkordinasi dengan Kementerian BUMN untuk memastikan musim giling di Jawa Timur bisa dilaksanakan pada bulan-bulan yang lebih awal.

Saya pikir itu Bapak Ketua yang perlu kami sampaikan.

Sekali lagi terima kasih.

*Billahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selanjutnya yang mewakili Fraksi PKB, Bapak Daniel Johan Pimpinan saya.

Silakan Bapak Daniel.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):**

Terima kasih.

Pimpinan yang kita cintai, segenap seluruh Anggota, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran.

Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak Menteri, ada beberapa hal yang penting kita sampaikan bahwa di tengah bencana COVID-19 saat ini ada dua hal yang sangat urgent dilakukan. Tentu yang pertama adalah menurunkan puncak korban sehingga tidak terlalu banyak orang yang terkena. Dan yang kedua adalah bagaimana Indonesia bisa mengamankan pangan.

Nah, dalam pengamanan pangan ini kita belum melihat rasa *urgency* dari kebijakan Pemerintah, termasuk di dalam Kementerian Pertanian.

Saat ini lagi proses panen raya, tetapi di tengah-tengah panen raya semua harga anjlok. Kemarin kami mendapatkan laporan bahkan harga gabah ada yang hanya mencapai Rp2.500 per kg. Dengan kondisi seperti itu bagaimana kita berharap masa tanam dan panen berikutnya kita akan baik, karena nanti para petani itu akan drop tidak punya semangat untuk menanam

kembali. Di tengah itu dunia saat ini sedang mengamankan pangan mereka masing-masing, mereka tidak akan melakukan ekspor, mereka akan mengamankan pangan untuk negara dan rakyat mereka. Dan itu tidak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga ada beberapa kebijakan yang sangat penting untuk dilakukan.

Segara Pemerintah menganggarkan untuk membeli gabah petani, kalau misalkan Pemerintah bisa membeli 1 juta gabah petani dengan harga yang layak sebagai insentif agar gerak ekonomi di desa bisa berjalan, misalnya Rp4.200,00 kita hanya membutuhkan anggaran Rp4,2 triliun. Kalau Pemerintah bisa membeli 3 juta gabah petani berarti kita membutuhkan Rp12,6 triliun. Tetapi Rp12,6 triliun itu bisa menjamin perut rakyat 195 juta rakyat per bulan. Dari 1000 triliun penambahan yang Pemerintah ajukan Rp12,6 triliun merupakan kebijakan yang sangat penting dilakukan. Karena bencana ini bukan hanya beberapa bulan kita bisa sampai Juli bahkan sampai Desember. Jadi kami minta kebijakan ini segera diambil sehingga gerak ekonomi rakyat di desa juga bisa bergerak tidak stagnan. Petani semakin semangat untuk melakukan penanaman padi, sehingga program-program pertanian yang akan berjalan berikutnya juga akan disambut dengan sangat antusias.

Dan kebijakan kedua, kita mendorong mungkin untuk sementara untuk tahun ini sangat penting bagi Pemerintah untuk mengambil kebijakan seluruh gabah yang ada di Indonesia adalah milik negara. sehingga penugasan-penugasan untuk membeli gabah petani, baik oleh Bulog maupun BUMN, tetapi Pemerintah juga tetap membuka ruang kepada swasta untuk membeli dan untuk menjual dengan tetap mendapatkan keuntungan. Tetapi yang dibeli oleh swasta dan disimpan di gudang-gudang swasta untuk sampai tahun ini milik negara, sehingga harga beli dan harga jual ditentukan oleh standar Pemerintah.

Mungkin dua hal itu yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa menjadi kesimpulan kita bersama.

Terima kasih Pimpinan dan Bapak Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Daniel.

Selanjutnya dari Fraksi PAN, Bapak Rudi silakan.

**F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T. M.M.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pak Ketua yang saya hormati,  
Bapak Menteri beserta jajarannya.

Saya menyampaikan ada 3 ini Pak Menteri, ada catatan, ada harapan dan ada aspirasi. Yang pertama di Kabupaten Sumbawa Barat itu ada 125 ribu hektar jagung dan siap panen itu sekitar 70-an ribu. Kemarin Bapak Bupati sudah bicara langsung dengan Bapak dan saya monitor beliau meminta tergantung dari waktu dan jadwal Bapak Menteri. Kemudian meminta beberapa alat juga mudah-mudahan bisa dipenuhi.

Kemudian terima kasih kepada Bapak Menteri, dari Bapak Bupati Kabupaten Sumbawa Barat yang sudah mengiyakan langsung permintaan alat pasca panen, ini luar biasa Bapak Menteri. Jadi saya berterima kasih sebagai orang kampung mendengarkan itu dan Bapak Menteri ternyata luar biasa.

Kemudian yang ketiga Bapak Menteri, mengenai realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan. Bisa dilihat posisi psikologisnya, seperti kami di Nusa Tenggara Barat ya kalau dikurangi karena memang ini diharapkan partisipasi nasional dilihat juga. Jadi jangan disamakan dengan daerah-daerah yang lain pemotongannya gitu. Ya, ini sangat penting saya sampaikan supaya jajaran Bapak di bawah mendengarkan jadi disama ratakan dengan daerah-daerah yang tidak begitu banyak hasil pertaniannya disamakan pemotongannya atau pengurangannya di daerah pemilihan saya.

Yang keempat Bapak Menteri dan jajarannya. Kami di Komisi IV DPR RI khususnya yang punya Dapil diberikan kewenangan yang lebih dalam rangka mengecek atau penyisiran CPCL apalagi dalam sekarang ini adalah mau Pilkada, jangan sampai kami dikatakan atau petani dijanjikan karena hanya sesuatu dari Pemerintah Pusat, ini penting sekali. Adalah kelebihan kami yang diberikan kepercayaan untuk bisa mengecek supaya yang dapat tidak hanya itu-itu saja, target kita petani sejahtera di seluruh Indonesia apalagi dengan Bapak Menteri SYL ini. Jadi sekali lagi minta dengan hormat agar CPCL tidak hanya itu-itu saja, orang-orangnya itu-itu saja, baik alat pertanian maupun dengan apa yang kita berikan dari pusat.

Yang terakhir Bapak Menteri, saya kira seluruh Indonesia mendengarkan atau membutuhkan ini, yaitu mengenai tenaga harian lepas yang sudah kita rekrut kemudian pembayarannya hanya bisa dilakukan hingga bulan Maret, masih ada bulan April sampai dengan November. Mereka adalah jembatan komunikasi Pemerintah Pusat dengan petani, jembatan komunikasi kami Anggota Komisi IV DPR RI dengan petani. Jadi tolong diperhatikan, tolong bisa disampaikan kepada Pemerintah Pusat agar mereka minimal bisa dibayar sampai bulan November, karena mereka melalui keputusan Pemerintah Pusat untuk menjadi Pegawai Negeri atau PNS tidak bisa lagi dengan usianya. Ini sangat penting Pak Menteri, mudah-mudahan Bapak Menteri sehat selalu.

Beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri saya telepon tidak diangkat, mungkin nomor saya tidak terdata. Saya hanya ingin menanyakan titipan yang disampaikan Bapak Menteri tentang pelayanan kepada petani tidak perlu keluar hanya diantar saja, saya hanya menanyakan apakah itu berlaku

di ibu kota provinsi atau kabupaten tapi jajaran Bapak sudah menjawab mohon dicatat nomor saya, mudah-mudahan bermanfaat suatu saat.

Terima kasih Bapak Menteri, sehat selalu mudah-mudahan kita semua diberkahi umur panjang.

*Billahi fi Sabililhaq Fastabiqul Khairat,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Bapak Rudi.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Demokrat Bapak Suhardi Duka.

Silakan.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat siang.

Yang saya hormati Bapak Ketua,  
Seluruh Anggota komisi IV DPR RI yang terhormat,  
Yang saya hormati Bapak Menteri bersama dengan seluruh jajaran Eselon I.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Perpres Nomor 54 dan Inpres Nomor 4, prinsipnya kita melawan corona virus. Ada dua langkah tentunya, pencegahan supaya tidak terpapar kita. Kemudian pencegahan agar kita tidak lapar. Saya kira disinilah pointnya bagaimana pangan tersedia, karena ini juga menjadi ancaman yang kedua, kalau pangan tidak tersedia di masyarakat.

Kementerian Pertanian kehilangan Rp3,6 triliun saya juga sedikit agak heran, justru Kementerian Pendidikan Nasional bertambah Rp34 triliun. Kita ini mau perang harus sarjana dulu baru bisa menang kayaknya. Tapi itu sudah kewenangan Presiden dalam Perpres Nomor 54. Saya ingin pada Tupoksi Kementerian Pertanian. Saya kira kalau persoalan harga itu adalah mekanisme pasar dan juga diatur oleh Kementerian Perdagangan. Saya kira terlalu jauh tangannya Kementerian Pertanian untuk mengatur masalah harga di pasar.

Begitu juga dengan operasi pasar, saya kira ada Bulog yang akan melakukan operasi pasar, menjual hasil pertanian. Tugas pokok kita adalah memastikan bahwa pangan tersedia, bibit ada, ditanam oleh petani, kemudian panen ada, itulah ketersediaan pangan. Oleh karena itu, untuk refocusing Kementerian Pertanian Rp1,8 triliun setelah dikurangi Rp3,6 triliun diperlukan langkah-langkah strategis agar betul-betul *refocusing* ini menopang ketersediaan pangan mulai saat ini sampai dengan satu tahun kedepan.



Saya melihat, saya pelajari walaupun Satuan 3 saya tidak dapat, tapi saya bisa kritisi beberapa hal. Yang pertama, Rp40 miliar untuk peningkatan daya tahan tubuh aparat Kementerian Pertanian. Saya kira terlalu besar, jangan sampai tubuh orang-orang dipertanian dengan Rp40 miliar terlalu tahan.

Yang selanjutnya, yang ingin saya tekankan adalah jangan dilakukan pengurangan terhadap pengadaan bibit. Kalau ini yang difocusing maka dampaknya kedepan akan mengurangi produksi. Kalau bibit padi dikurangi, bibit jagung dikurangi dan bibit-bibit yang lain dikurangi saya kira ini akan menurunkan produktifitas. Demikian juga pupuk, Alsintan saya kira ini semua adalah yang mendukung peningkatan produksi. Dengan demikian, saya lebih ingin mempertanyakan kepada Bapak Menteri, kenapa dua di Eselon I, yaitu Litbang dan PSDM terlalu kecil ditarik dananya dibanding dengan TP. Balitbang dengan PSDM hanya ditarik Rp100 miliar lebih. Sedangkan Dirjen Tanaman Pangan yang menjadi penopang Kementerian ditarik sampai Rp1,5 triliun, begitu juga di PSP hampir Rp1 triliun ditarik difocusing. Kenapa bukan pelatihan tentu di Litbang, penelitian yang oleh arahnya Bapak Presiden pun mengarah seperti itu. Rp1,8 triliun dan Rp1,7 triliun di Eselon ini, kalau ditarik 800, 700 saya kira bisa untuk tidak mengurangi yang ada di Tanaman Pangan dan PSP.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Menteri, supaya kita melakukan hal-hal yang lebih rasional. Saya setuju kalau itu yang dilakukan tapi kalau hal-hal yang justru mengurangi dan menghambat peningkatan produktifitas saya minta untuk dipertimbangkan, supaya melakukan refocusing yang benar.

Saya kira demikian Bapak Menteri, saya tahu Bapak Menteri sudah bekerja keras bersama dengan seluruh pejabatnya. Semoga hasil kerja keras kita diberikan jaminan bahwa Indonesia tidak akan kekurangan pangan dalam menghadapi COVID-19 ini.

Terima kasih Ketua.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamithariq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi PPP.

Silakan Pak Asep.

**F-PPP (K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.):**

Hallo.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan langsung.

**F-PPP (K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.):**

Oke.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Ketua, Bapak Menteri yang saya hormati dan juga rekan-rekan sekalian.

Saya tidak banyak yang ingin di sampaikan, pertama saya mengapresiasi satu program Bapak Menteri. Baik yang akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam hal meringankan beban para petani khususnya masyarakat yang terdampak *COVID-19* ini. salah satu program kementerian, yaitu merupakan stabilitas jatuhnya harga ayam di produsen. Yang selama ini terjadi di Dapil kami Pak, di Ciamis, Banjar dan Pangandaran ini harganya sangat anjlok sekali hampir 70% dari Rp8000 sampai Rp10000 per kg dan sekarang harga sudah mulai menaik. Setelah saya bicara dengan mereka para petani peternak ayam ini, salah satu penyebabnya adalah pasokan bahan baku seperti obat-obatan dan juga pakan.

Untuk itu, saya yakin saya berharap kepada Bapak Menteri pasokan-pasokan yang dibutuhkan oleh para petani ini, ini bisa benar-benar bisa diselenggarakan, karena apalagi di samping memang rakyat kita ini dalam kondisi berada di rumah sendiri-sendiri tanpa kerja dan sebagainya, bahkan ketika kemarin akan belanja pun ternyata ada banyak toko-toko dan pasar yang memang pada tutup, sehingga pasokan 9 bahan pokok itu agak banyak yang tidak ada dan lucunya memang murah. Murah karena apa? Karena memang pembeli juga tidak ada, jadi saling tuding menuding. Maka dari itu, sekali lagi pasokan untuk 9 bahan baku ini benar-benar wajib dilakukan oleh Pemerintah dan khususnya dalam masalah Kementerian Pertanian ini walaupun mungkin ada beberapa Kementerian terkait.

Terutama Bapak Menteri, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan. Ini biasanya kebutuhan bahan baku itu sangat meningkat ditambah lagi nanti pada bulan Ramadhan. Dan satu hal lagi saya sampaikan ada banyak keluhan dari para petani yang akan atau yang menginginkan mendapatkan bantuan-bantuan dari pertanian ini, baik itu Alsintan, obat-obatan, dan sebagainya. Salah satu keluhan mereka adalah bahwasanya ada sebuah lembaga hukum yang sudah ada. Nah, sementara ada banyak sekali para petani-petani ini yang belum memiliki badan hukum atau bahkan mereka tidak paham apa itu badan hukum yang mereka perlukan, mereka tahunya

dapat bantuan. Nah, untuk itu diharapkan bantuan-bantuan hukum ini juga diperluas, semisal pondok pesantren juga bisa masuk dan saya juga ada beberapa pondok pesantren yang dalam hal ini ya tentu saja dia tidak akan mendapatkan bantuan ini kalau badan hukumnya tidak ada.

Nah, saya berharap juga ataupun kalau pun mereka tidak punya semacam pesantren ada bagusnya juga kalau rekomendasi Anggota DPR RI itu juga bisa diserahkan. Jadi tanpa harus mencari-cari apalagi membuat-buat terkadang ada juga lembaga hukumnya itu malah istilahnya asal ada saja, pinjam-pinjam punya orang ada itu. Bukankah Anggota DPR RI juga itu merupakan lembaga bagian dari lembaga DPR RI yang merupakan lembaga negara. Demikian.

Kemudian ujian atau wabah *COVID-19* ini menjadi momentum penting bagi Kementan, maka dari itu kedepan saya berharap Kementan mempunyai arahan untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang meskipun dalam scenario terburuk impor bukanlah solusi yang tidak beresiko saat ini, ketersediaan pangan adalah sekali lagi ini mutlak yang harus bisa dipenuhi oleh Kementerian terutama dalam waktu seperti ini.

Terakhir, realokasi anggaran saya mengatakan lebih focus untuk padat karya. Ini salah satu bentuk ketahanan pangan dan penguatan lapangan kerja di daerah khususnya karena mereka sekarang berada di daerah.

Demikian, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Kang Asep, kalau meminta bantuan itu memang harus ada lembaganya, seperti Poktan dan Gapoktan. Kalau tidak bagaimana pertanggungjawaban Kementerian Pertanian terhadap Bansos atau alat mesin pertanian yang disalurkan, bagaimana pemeriksaan BPK-nya. Jadi wajib punya badan seperti Poktan atau Gapoktan. Dan diharapkan setiap Poktan atau Gapoktan wajib juga membuat jasa Alsintan. Ini memang sudah aturan baku Pak, jadi kalau nanti semua orang bisa minta dan tidak ada lembaganya ya kena masalah nanti Kementerian Pertanian diperiksa oleh BPK.

#### **F-PPP (K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.):**

Ya, tapi inikan masalah rakyat juga mereka tidak mengerti bahkan artinya ada kemudahan-kemudahan dan ada solusi lain.

#### **KETUA RAPAT:**

Begini Pak, kalau tidak ada badannya gimana mau minta Pak.

**F-PPP (K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.):**

Ya, saya kan juga lembaga yang di masyarakat, yang juga disahkan oleh Pemerintah. Artinya, tidak melulu lembaga ini, itu-itu juga. Terkadang ketika bantuan itu datang yang itu lagi, yang itu lagi daerah tersebut. Bahkan ada satu desa yang karena memang ada, itu lagi yang dapatnya, istilahnya pinjam SK begitu.

**KETUA RAPAT:**

Oke Pak, nanti Bapak bahas nanti ya Pak.

Selanjutnya Bapak Andi Akmal yang mewakili Fraksi PKS.

Pak Andi Akmal, kalau Pak Andi belum siap, Pak Andi.

**F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):**

Kedengaran tidak?

**KETUA RAPAT:**

Kedengaran Pak, lanjut Pak.

Pak Andi tambah mudah saja wajahnya Pak.

**F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):**

Pak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Bapak Menteri beserta jajaran.

Yang pertama, sebagai Anggota Komisi IV DPR RI tentu sangat menyayangkan pemotongan 13% dari anggaran Kementerian Pertanian. Padahal sama dengan Pak Thohari juga katakan bahwa kita berperang bukan hanya dengan COVID-19 tetapi tentang ketersediaan pangan kita. Bahkan WFO sudah memprediksi bahwa 2020 ini akan kesulitan pangan juga. Itu menjadi catatan dan kritis dari Komisi IV DPR RI kepada Pemerintah dan juga Menteri Keuangan kenapa hal ini dilakukan.

Yang kedua, kalau kita melihat refocusing yang ada bahwa ada sekitar 1,85 triliun tapi yang kita sayangkan sebagai mitra Kementerian Pertanian banyakan kepada social safety net yang sebenarnya social safety net ini semua Kementerian sudah melakukan program seperti ini, Kementerian PUPR dan lain-lain. Yang menurut hemat saya harusnya kita perbanyak adalah untuk ketersediaan panga, program ketersediaan pangan yang anggarannya hanya 198,95 miliar.

Oleh karena itu Bapak Menteri, saya berharap bahwa ... yang sudah punya 5000 titik di Indonesia ini, ini mungkin diperbesar skalanya atau ditambah, sehingga bisa menjadi fungsinya seperti Bulog, bisa membeli

gabah petani pada saat harga panen turun. Saya kira ini mungkin ini perlu ditambahkan anggarannya. Dan anggaran sebenarnya kalau saya melihat, membaca dari materi yang ada Pak Ketua, banyak yang bisa kita potong sebenarnya, banyak yang bisa kita fokuskan kepada penyediaan pangan ini. Misalnya anggaran di Hortikultura, dikatakan Presiden bahwa tidak boleh ada kunjungan kerja, tidak boleh ada sosialisasi, disini bimbingan teknis, sosialisasi dan peraturan 85 miliar. Saya kira perlu kita menjadi catatan, apakah ini memang perlu direfocusing untuk kegiatan yang penyediaan pangan tadi.

Yang kedua Pak Ketua, kita melihat anggaran karena kita fokus anggaran. Ada beberapa anggaran yang menurut kami itu sebenarnya kita mendukung daripada penguatan pangan kita tapi malah dikurangi, misalnya Alsintan, ini Alsintan ini besar sekali dari 1,1 triliun hanya menjadi 453 miliar. Inikan jumlah yang sangat drastis sekali, padahal ini salah satu yang menjadi pendorong daripada pangan kita, ketersediaan pangan kita.

Kemudian kita melihat sisi lain misalnya ada, masih ada untuk pengadaan pupuk organik 200 miliar. Apakah ini cocok ini dalam kondisi seperti ini pengadaan pupuk organik sementara sebenarnya yang kita butuhkan adalah bagaimana harga gabah petani, petani kita mendapatkan bantuan sarana produksi. Ini harusnya menjadi focus kita.

Begitupun dengan program optimalisasi lahan rawa yang 2019 ini perlu kita evaluasi, apakah memang ini masih efektif atau tidak. Kalau tidak tentu ini kita bisa alokasikan ke saya sepakat tadi ke penguatan atau keamanan ketersediaan program pangan kita yang tadi anggarannya hanya 198 miliar. Itu dari sisi anggaran.

Kemudian yang terakhir, sebenarnya kita berharap Pak Menteri, dengan adanya negara-negara eksportir daging, kita impor ke India, ke Australia sekarang melakukan *lockdown*, sebenarnya peluang bagi kita, bagi bangsa Indonesia, bagi Pertanian Dirjen PKH agar bisa menjadikan ini momentum agar kita swasembada daging atau seperti yang dikatakan yang lain bagaimana kita merubah dari daging sapi atau daging kerbau, daging ayam sehinggalah daging ayam para peternak ini bisa terserap oleh masyarakat kita. Karena selama ini terus terang kita melihat bahwa kita belum melihat, belum frame daripada peternakan sapi di Indonesia. Masyarakat kita selama ini beternak sapi fokusnya hanya menjual pada saat Idul Adha, belum ada system di kita ini misalnya bagaimana mengkoleksi itu tadi apa namanya sapi-sapi rakyat itu masuk ke restoran kemudian bisa terserap. Selama ini bahkan banyak keluhan masyarakat bahwa mereka mau menjual sapi mereka sulit menjual kemana. Oleh karena itu, ini menjadi momentum bagi Dirjen Peternakan agar bisa dipetakan dimana saja sumber-sumber produksi sapi kita. Dan kita tidak menggantungkan lagi kepada impor daging beku yang selama ini mendominasi daripada pasar daging kita.

Saya kira itu saja Bapak Ketua, kami masukan dan ada juga beberapa harapan. Sekali lagi bahwa kita berharap Kementerian Pertanian yang fungsi utamanya adalah sebagai penyedia pangan, jadi kita focus kesana sehingga

anggaran kita yang 6 bulan kedepan atau bahkan 8 bulan kedepan betul-betul kita fokuskan bagaimana supaya pangan kita ini tetap tersedia, petani kita juga bisa hidup dengan layak, dan mereka juga mendapatkan harga yang baik.

Demikian.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Andi.

Selanjutnya Bapak Hermanto, silakan Bapak Hermanto.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Pak Ketua, Anggota, dan Bapak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.

Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa prinsip anggaran di Kementerian Pertanian ini, itu adalah bersifat technical dan efek buget. Jadi saya berharap supaya alokasi anggaran kita ini lebih banyak kepada untuk yang berkaitan dengan masyarakat di kelas bawahnya, di masyarakat yang rentan dengan rentan terhadap ekonomi.

Jadi saya melihat bahwa technical dan efek buget ini menjadi focus dari Bapak Menteri, karena kita menghadapi satu situasi yang sangat anomali. Kita sekarang ini diuji ketahanan pangan kita Pak Menteri, terkait dengan soal dua kondisi yang terjadi dalam waktu bersamaan, yaitu adanya COVID-19 dan nanti bulan suci Ramadhan serta Lebaran. Dua keadaan ini, ini adalah membutuhkan stok pangan yang cukup harus untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, saya menyarankan supaya desain strategi yang disusun oleh Bapak Menteri, yang terkait dengan 3 segmen, yaitu *emergency*, *temporary*, dan permanen. Saya minta supaya ditinjau ulang strategi ini terutama kita harus memprioritaskan dua keadaan, yaitu *emergency* dan *temporary*. Dan bila ada agenda-agenda pada tahap permanen dan bisa dikategorikan menjadi *emergency* dan *temporary* saya minta supaya itu saat ini harus direlokasikan kepada *emergency* dan *temporary*. Karena permanen inikan kebutuhannya jangka panjang, sementara kita butuh dalam kondisi

*emergency* dan *temporary* ini, karena kita menghadapi satu kondisi yang anomali seperti ini.

Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Anggota yang sebelumnya, bahwa anggaran yang kita *refocusing* itu adalah sebesar 1,85 triliun ini, ini harus kita perhatikan kembali untuk penyediaan stok pangan ini, karena disini hanya 85 miliar. Nah, ini menurut saya ini sangat kecil karena seperti teman-teman saya sampaikan ini juga sudah dilakukan oleh Kementerian yang lain. Nah, kita ini adalah satu sektor yang berkaitan dengan sector hulu Pak Menteri. Sektor hulu ini adalah sektor yang sangat mempengaruhi sektor hilirnya. Oleh karena itu, kita berharap bahwa .... (sinyal terputus).

**KETUA RAPAT:**

Pak Hermanto.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Sektor hulu ini yang harus kita benahi terkait soal surplus beras. Saya ingin bertanya sebenarnya Pak Menteri, surplus beras, bawang putih dan lain sebagainya itu. Ini kita ada satu pertanyaan mengapa itu terjadi, apakah sebabnya surplus itu karena impor ataukah karena produktifitas kita memang sedang tinggi atau karena permintaan kita sedang menurun. Karena keadaan sekarang ini kita menghadapi satu *COVID-19* yang kecenderungannya aktifitas ekonomi kita memang sedang menurun. Nah, ini perlu saya tekankan bahwa Pak Menteri mengkaji ulang lagi dengan surplus ini. Kita sedang satu sisi lain bersyukur adaya surplus, tapi sebab-sebab syukur inikan apakah karena kedaulatan kita atau karena ada faktor lain.

Kemudian terkait dengan soal harga ayam....

**KETUA RAPAT:**

Pak Hermanto cukup.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Ada sedikit lagi Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Kalau bisa kita bicara fokus masalah anggaran saja dulu.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Iya, inikan terkait dengan anggaran. Jadi terkait dengan harga ayam tadi yang disebutkan saya minta supaya Pak Menteri ini kita pasar ayam sudah masuk dalam pasar oligarki Jadi ini adalah pasar oligarki Ini mendominasi produsen-produsen kecil, sehingga produsen rakyat ini, ini

banyak yang mati. Oleh karena itu, saya minta supaya Bapak Menteri membuat aturan ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk katagori oligarki ini. Kalau dilihat inilah yang mematikan usaha-usaha ayam rakyat kecil.

Nah, kemudian saya mensinyalemen adanya statement Bapak Darori tadi bahwa ada sebanyak 41 eselon yang akan mengundurkan diri, Bapak Menteri kalau ini benar dan valid ini adalah satu ujian dari Bapak Menteri, apakah ini satu sinyal bahwa ada sesuatu di Kementerian. Saya pikir ini sangat penting karena....

**KETUA RAPAT:**

Pak Hermanto cukup ya, karena ini masih banyak yang ingin bertanya karena waktunya kita juga terbatas yang penting Bapak Hermanto maksudnya apa sudah....

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Satu lagi, saya meminta supaya Dirjen PSP ini jangan terlalu banyak mengurangi potongan anggarannya, karena ini adalah penting bagi kita.

Itu saja Pak Ketua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selanjutnya Mbak Luluk, singkat saja Mbak.

Saya berharap Anggota ini kita focus bicara permasalahan anggaran refocusing dan realokasi.

Terima kasih.

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menteri yang terhormat,  
Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati.

Yang pertama, saya mau menyampaikan semangat untuk kita semuanya dalam situasi yang memang tidak mudah, jadi semua kementerian saya kira harus melakukan adaptasi. Hanya saja Bapak Menteri yang saya hormati, bahwa hari ini yang mungkin banyak dilihat orang selain urusan kesehatan adalah soal pangan. Dan soal pangan itu tentu ada di dalam kebijakan dan otoritas Bapak Menteri sebagai Menteri Pertanian. Oleh sebab



itu, memastikan bahwa pasokan pangan kita aman, distribusinya aman, ketersediaan pangan sampai ke dapur-dapur keluarga di seluruh Indonesia aman itu yang pasti menjadi tantangan kita semuanya.

Selain itu, selain ketersediaan pangan yang dalam waktu sekian bulan ini memang harus tersedia. Tadi Bapak bilang bahwa pasokan kita aman itu juga perlu penjelasan amannya itu sepertinya apa sebenarnya. Aman itu dalam pengertian ini estimasi berdasarkan data BPS yang terakhir ataukah memang ada di gudang-gudang yang kemudian kita semua lihat ataukah masih ada di lumbungnya petani itu sendiri ataukah berdasarkan apa.

Tetapi yang kedua bahwa kita punya kebutuhan yang jangka panjang yang dalam waktu satu tahun dimana produksi ini juga tidak boleh dihentikan. Oleh karena itu, terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran saya sangat menyayangkan sekali apabila alokasi anggaran untuk sector yang paling penting dan strategis seperti tanaman pangan kemudian juga sarana dan prasarana pertanian ataukah Ditjen Sarplas itu yang justru dikurangi. Nah, ini yang kemudian harusnya dilihat melalui Ditjen yang lain atau justru anggaran dari kesekjenan atau yang lain Bapak pasti yang jauh lebih tahu untuk kemudian dilihat mana yang paling prioritas.

Saat ini kita saja rapatnya sudah memakai media visual online. Jadi hal-hal yang terkait dengan interaksi atau *direct interaction* kemudian pelatihan dan lain-lain saya kira tidak dibutuhkan saat ini. Sama persis dengan program yang lain, dimana tawaran ada pelatihan online itu tidak dibutuhkan, orang hanya butuhnya aman pangan sekeluarga sampai sekian bulan kedepan.

Yang berikutnya ini yang terkait dengan eskpor Pak Menteri, kita juga surprise dan sangat senang ya bahwa disebutkan ekspor jalan terus. Kemudian juga proyeksi 3 kali itu jalan terus, ini ekspor yang seperti apa karena semua negara pada saat ini, itu semuanya tahan diri untuk melakukan impor dari negara lain karena memang kondisi keuangan dunia juga sedang sakit. Nah, apakah ekspor yang dilakukan oleh kita ini ekspor yang memang tidak dibutuhkan oleh rakyat kita, bukan eskpor yang misalnya saya tidak tahu karena Bapak detailnya juga tadi tidak menjelaskan. Ataukah ekspor ini memang komoditas yang selama ini tidak dibutuhkan secara langsung untuk memenuhi pangan kita.

Terus yang terakhir Pak Menteri, yang terkait dengan cold storage dan kemudian juga toko tani. Ini disebutkan sekarang sudah di 34 provinsi, meskipun di media saya lihatnya baru beberapa toko tani itupun hanya di kota besar, Jakarta, Bogor dan Tangerang tetapi hari ini laporan Bapak ada 34 provinsi. Itu keberadaanya ada dimana, dan kemudian cara penjangkauannya kepada petani itu seperti apa, karena petani saya itu juga mereka konsen sayur mayur, kemudian juga pangan, juga beras, bahkan lumbung beras di Jawa Tengah tapi mereka sama sekali tidak terinformasi terkait dengan toko tani yang Bapak punya. Nah, ini juga saya kira membutuhkan peran Anggota Dewan di Dapilnya minimal untuk bisa sosialisasi ini.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Pak Ansy Lema dari Fraksi PDI Perjuangan.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Selamat siang.

Bapak Menteri dan jajaran yang terhormat.

Yang pertama, saya ingin katakan saya prihatian dan sedih anggaran Kementerian dikurangi. Selain Kementerian Kesehatan tenaga medis, mestinya Kementerian Pertanian dan petani ini menjadi garda terdepan Pak. Secara khusus saya ingin menyoroti soal anggaran Pak. Ada 3 hal yang penting disana, yang pertama pencegahan COVID-19 Rp45 miliar. Dan yang kedua itu adalah ketersediaan pangan 189 dan yang ketiga itu padat karya dalam bentuk safety net itu Rp,6 triliun. Pertanyaan saya kenapa gap-nya terlalu besar, kenapa ketersediaan pangan itu tidak dalam jumlah yang lebih besar Pak. Dampaknya ini besar Pak, hari ini perut orang dan yang kedua menjaga stabilitas harga di pasar Pak. Nah, pendekatan kita mestinya pendekatan gross cutting issue, bukan hanya yang memberikan safety net ini bukan hanya Kementerian Pertanian tetapi ada kementerian-kementerian yang lain. Point saya yang pertama ini Pak, harus ditingkatkan Pak, soal ketersediaan pangan ini.

Yang kedua, secara khusus saya menyoroti soal Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Disitu ada alokasi dana sebesar Rp32,8 miliar untuk pembelian ayam 1 juta ekor Pak. Nah, pertanyaan saya ini ayamnya didapat dari mana Pak. Di beli di peternakan rakyat atau tidak Pak. Di sisi lain ini ada program juga desiminasi inovasi teknologi ternak unggas untuk mendukung ketersediaan pangan tanggap COVID sebanyak 1 juta ekor ayam oleh Badan Litbang Kementerian Pertanian Pak. Saya ingin mendapatkan penjelasan soal ini apa bedanya dana pa urgency dari program desiminasi teknologi ternak unggas dalam situasi seperti saat ini Pak, dengan anggaran sebesar Rp39,67 miliar.

Yang ketiga saya juga ingin bertanya soal program tugas belajar S2 dan S3 yang sebesar Rp20 miliar Pak. Apakah hari ini program ini masih menjadi penting, apakah ini keberlanjutan dari para pelajar S2 dan S3 atau dibuka kesempatan yang baru Pak.

Yang selanjutnya, menyangkut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Disana saya ada baca ada Sekolah Lapang Petani untuk mendukung penguatan daya tahan tubuh, daya tahan tubuh

sebesar Rp32,8 miliar. Ini apa program Pak, saya ingin tahu. Padahal sudah ada program pelatihan bagi penyuluh, petugas dan petani sebesar Rp71,8 miliar. Menurut saya ini lebih prioritas Pak, lalu apa sih *urgency* dari Sekolah Lapang Petani untuk daya tahan tubuh itu Pak, yang sebesar Rp32,8 miliar.

Nah, kalau saya lihat postur bantuan Pak, bantuan fisik itu hanya sebesar Rp5 miliar dan itu hanya untuk alokasikan untuk bawang, dugaan saya ini bawang merah dan untuk cabai selebihnya itu Pak, padat karya dan benih. Apakah ini mengindikasikan bahwa hari-hari ini sebenarnya yang kita tidak memiliki stok atau ketersediaan pangan yang cukup kuat Pak. Kami ingin mendapatkan data yang jelas. Yang berikut saya juga ingin bertanya Pak, ini padat karya ini berapa sih tenaga kerja yang akan terserap ke sector padat karya ini. Berapa banyak pengangguran yang akan diserap di sector ini Pak.

Yang berikut, soal isu khusus spesifik Nusa Tenggara Timur Pak, hari ini bukan hanya *COVID*. Di NTT itu Pak, itu ada virus flu babi yang mengakibatkan babi sudah mati sampai ribuan di Timor dan Pulau Sumba. Sampai hari ini saya belum melihat ada dampaknya, kenapa belum ada langkah konkrit yang dilakukan oleh Kementerian terhadap hal ini, terutama Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kita tahu bahwa banyak sekali UMKM yang bergerak di sector ini. Yang kedua, gagal tanam di NTT, bagaimana kita mau panen tanam saja kita gagal.

Nah, kalau ada 3 isu, ada *COVID*, ada gagal tanam, dan juga ada flu babi di NTT. Nah, ini angka kemiskinan NTT akan semakin tinggi Pak. Karena itu, saya meminta perhatian dan juga keberpihakan dari Kementerian Pertanian untuk mendorong hal ini.

Itu yang saya sampaikan.

Sekian dan terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Mbak Farida.

#### **F-PKB (FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang Pimpinan, semoga sehat selalu.

Dan selamat siang juga untuk Bapak Menteri Pertanian, sehat ya Pak Menteri.

Disini saya akan mengkritisi terkait dengan alokasi anggaran bahwa disebutkan realoksi anggaran untuk pencegahan *COVID* inikan sebesar Rp45 miliar. Jadi kurang lebih 2,6% dari total anggaran yang rata-rata yakni 17,4 triliun. Itu artinya di setiap provinsi hampir mendapatkan 1,3 miliar. Bagaimana implementasi program pencegahan penularan *COVID* yang akan

dilaksanakan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya di seluruh Indonesia.

Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, yakni terkait dengan strategi Kementan dalam penanganan *COVID* pada agenda *emergency* ini di halaman 4 ada program sosial safety net. Bisa dijelaskan bagaimana bentuk riil dari *social safety net* yang dimaksud. Dan bagaimana implementasi program ini supaya tidak tumpang tindih dengan Kementerian lain.

Terus mungkin yang ketiga, masih terkait dengan strategi Kementan terkait penanganan *COVID*, yakni mendorong dan mempercepat program bantuan sarana produksi ke masyarakat petani untuk produksi bahan pangan bagi 260 juta penduduk Indonesia bagaimana dengan alokasi terhadap anggaran untuk program ini. Sementara terjadi penghematan sebesar Rp3,6 triliun pada postur penyusunan APBN Kementerian Pertanian.

Terus mungkin untuk yang keempat, anggaran terbesar di Dirjen ini terjadi di Dirjen Tanaman Pangan. Nah, yakni sebesar kurang lebih Rp1,5 triliun. Bagaimana kira-kira dampak penghematan ini terhadap program-program yang akan mendukung peningkatan tanaman pangan. Jadi mungkin itu.

Terus ada lagi mungkin Pimpinan, satu lagi. Yang kelima, dalam hal mengakselerasi program dan kegiatan lain, maka program KUR bagi petani dan UMKM pertanian serta Starup diperluas. Jadi jangan hanya di kota-kota besar sedangkan petani itu adanya di kota-kota kecil juga banyak.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Mbak Farida?

**F-PKB (FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.):**

Kenapa Pak?

**KETUA RAPAT:**

Cukup?

**F-PKB (FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.):**

Cukup.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selanjutnya Pak Slamet dari Fraksi PKS.

**F-PKS (drh. H. SLAMET):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pak Ketua, Pimpinan yang lain serta seluruh Anggota Dewan yang saya hormati,  
Bapak Menteri beserta jajarannya.

Saya juga ingin menyampaikan sebagai wakil rakyat kekecewaan terhadap Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden yang melakukan pemotongan anggaran untuk Kementerian Pertanian, karena sama dengan teman-teman yang lain bahwa *COVID* ini bukan hanya berefek kepada kesehatan tetapi juga dampak kepada kesiapan atau ketahanan pangan kita. Harapan kita tentunya justru jangan dipotong tetapi dioptimalkan. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya menyoroti terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Saya sambungkan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman, terkait dengan anjloknya harga yang hari ini berkisar Rp8000 sampai Rp10.000,00 di lapangan HPP-nya Rp18.000,00. Terkait dengan anggaran yang disampaikan tadi Bapak Menteri kalau tidak salah menyampaikan akan ada bantuan terkait dengan *cold storage*, kemudian distribusi kepada integrator. Justru saya akan menyoroti kesini Pak Menteri, jadi yang perlu dibantu hari ini bukan integrator tetapi adalah peternak mandiri. Saya khawatir justru ketika bantuan ini disampaikan kepada integrator, ini akan salah sasaran. Karena namanya integrator Pak, jadi integrator ini sudah perusahaan besar, dia subsidi silang mulai dari hulu, hilir kemudian dia pegang mulai dari dia punya produksi pakannya, punya pledingnya, punya pengolahannya, pemotongannya, semua dia punya. Kalau ini harus dialokasikan dana Pemerintah untuk *cold storage*, saya ingin mempertanyakan ini arahnya kemana dan siapa yang diberi. Kalau disebut betul itu yang mendapatkan bantuan adalah integrator, saya tegaskan jangan sampai program ini salah sasaran. Kalau kemudian yang dibantu adalah para integrator saya bilang sampai hari ini, itu adalah salah sasaran Pak Menteri. Ini mohon dicatat.

Kemudian berikutnya terkait dengan tadi juga disinggung-singgung lagi terkait dengan anggaran petani milenial. Pak Menteri, saya sudah bergaul lama dengan mahasiswa, bahkan pekan depan saya diundang untuk berdiskusi dengan BEN Baperta. Temanya sangat menarik, biar tidak kena PHK berhentilah menjadi pekerja dan jadilah petani. Nah, ini saya kaitkan dan dia sampai hari ini tidak tahu mahasiswa-mahasiswa yang siap untuk menjadi petani ini, mereka keluhannya tidak punya lahan, tidak ada lahan, tidak punya modal dan yang paling penting dia tidak tahu apa program Pemerintah. Sehingga dalam hal ini, saya ingin menyampaikan bahwa Kementerian mestinya responsive dan harusnya kepada mahasiswa yang sudah siap menjadi petani, sehingga program-program yang sudah digulirkan ini sejauhmana sosialisasinya dan kedepan dalam tahun ini kemana sasarannya.

Jadi ini saya langsung berharap dengan mahasiswa tidak mendapatkan informasi tentang petani milenial. Ini padahal dia adalah garda yang akan bisa membangkitkan pertanian kita. Itu dan catatan saya juga, sama dengan teman-teman yang lain, gula pasir tadi diinformasikan mencukupi, dilapangan yang terjadi agak kosong dan harganya juga melambung, sehingga ini perlu kita konfirmasi lagi.

Terakhir, terkait dengan ketersediaan pangan yang diprediksikan *COVID* akan berjalan lama di Indonesia, maka dengan melihat dilapangan banyak lahan-lahan kosong apakah ini kemudian tidak dilakukan kordinasi dan kerjasama yang baik antar kementerian. Menteri Pertanian mungkin bekerja sama dengan KLHK atau yang lainnya. Saya lihat minimal di Dapil saya itu banyak lahan-lahan kosong dari PTPN VIII, kemudian juga Perhutani, sementara petani tidak berani untuk ataupun kalau berani menggarap sebagian kecil, sehingga ini perlu menjadi perhatian untuk perlu disupport bagaimana kemudian tanah ini tergarap dan petani bisa bercocok tanam dan ketersediaan pangan untuk di Indonesia insya allah akan terpenuhi.

Itu saja Pimpinan, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Bapak Slamet.

Selanjutnya Bapak Azikin.

**F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Bapak Menteri dan segenap jajarannya yang mendampingi.

Pertama-tama kami mengapresiasi upaya-upaya Bapak Menteri dalam rangka menghadapi *COVID-19* ini terutama upaya-upaya yang bisa mengimbangi ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kita ketahui bersama bahwa *COVID-19* ini bukan saja menyerang kesehatan masyarakat tetapi juga menyerang ekonomi masyarakat bahkan kalau ekonomi masyarakat terganggu maka dia bisa berbanding lurus dengan kondisi Kantibmas dilapangan. Pasti itu terjadi.

Kita mengingat pada tahun 1998 lalu, penjarahan dilakukan di siang hari. Oleh sebab itu Pak Menteri, kami melihat beberapa pejabat-pejabat tingkat nasional mengemukakan beberapa programnya. Saya harapkan

bahwa kondisi darurat ini adalah kondisi perang, sehingga tidak perlu lagi banyak dilakukan kegiatan-kegiatan ditingkat nasional. Yang kita harapkan ada kegiatan operasional yang langsung dirasakan dilapangan dan menyentuh kehidupan masyarakat.

Saat ini yang melakukan kegiatan itu adalah Pemerintah Daerah, baik itu provinsi dan kabupaten. Belum ada sentuhan-sentuhan dari Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu Bapak Menteri, kami sangat kecewa dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pengurangan beberapa anggaran yang dilakukan di Kementerian Pertanian. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini merusak system ekonomi bangsa kita. Yang bisa bertahan saat ini adalah sector pertanian, perikanan dan peternakan. Oleh sebab itu, kalau sector ini dikurangi lagi anggarannya itu secara tidak langsung mengganggu Bapak basic ekonomi masyarakat. Karena terus terang sector pertanian ini sector perikanan dan peternakan ini, inilah basic ekonomi masyarakat yang ada di daerah.

Yang kedua Pak Menteri, apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu tadi terhadap kebijakan Menteri Perdagangan yang memberikan ijin impor bawang putih tanpa melalui Menteri Pertanian. Hal itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010. Keputusan Menteri itu tidak bisa membatalkan Undang-Undang, sehingga saya anggap ini kebijakan adalah suatu kebijakan yang keliru. Dan yang kedua, kalau ini kita biarkan maka animo masyarakat yang menanam bawang putih di beberapa daerah itu akan terganggu dengan adanya impor yang dilakukan dengan system yang tidak melalui prosedur.

Ini mungkin Pak Menteri yang kami harapkan, dan sekali lagi kami harapkan Pak Menteri, untuk melakukan upaya-upaya *exercise* kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa tempat juga mungkin di daerah-daerah lain sudah pernah dilakukan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya Bapak Muslim dari Fraksi Partai Demokrat.

Pak Muslim silakan.

**F-PD (MUSLIM, S.H.I., M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pak Ketua dan teman-teman Komisi X DPR RI,  
Bapak Menteri Pertanian beserta jajarannya.

**KETUA RAPAT:**

Pak Muslim, disini Komisi IV DPR RI Pak, kalau Pak Muslim mau pindah Komisi X DPR RI besok saya pindahkan Pak.

**F-PD (MUSLIM, S.H.I., M.M.):**

*Sorry* Pak Ketua.  
Terima kasih Pak Ketua.

Bapak Menteri Pertanian beserta jajarannya.

Tentu yang pertama, semangat Bapak Menteri tentu kita harus memberikan apresiasi berkaitan dengan refocusing ataupun realokasi anggaran dalam rangka COVID-19 ini. Tentu kita berikan apresiasi kepada Bapak Menteri. Tentu dalam realokasi ini saya melihat dalam relokasi ini harus ada beberapa pertimbangan Pak Menteri. Tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bapak Suhardi Duka, berkaitan dengan alokasi anggaran yaitu SN Litbang, SN Litbang ini Rp1,8 triliun yg dipotong hanya Rp106 miliar. Kemudian juga dari Rp1,7 triliun yang dipotong Rp116 miliar, kemudian juga ada Litbang dari Rp1,8 triliun yang dipotong Rp106 miliar. Tentu dalam hal ini sementara kita bisa lihat di dua Dirjen lagi Bapak Menteri, yaitu Dirjen PSB itu hampir Rp1 triliun, kemudian Dirjen Tanaman Pangan hampir Rp1,5 triliun. Tentu dalam hal ini, ini Bapak Menteri mungkin harus mengevaluasi kembali. Jadi ketika ada anggaran dua Dirjen ini saya yakin masih bisa kita pindahkan. Kenapa? Kalau kita lihat secara kebutuhan maupun kondisi hari ini, ini mungkin racikan kembali jadi sehingga pemanfaatan anggaran ini bisa secara optimal yang kita harapkan.

Kemudian Pak Menteri, berkaitan dengan perkiraan ketersediaan dan kebutuhan pangan. Tentu yang menjadi sorotan kita hari ini adalah berkaitan dengan semua kita lihat disini sangat cukup Pak Menteri. Tapi kenyataan hari ini terus terang saja salah satu contoh gula, gula hari ini baik di Bulog saya lihat disini cukup, tapi kenyataannya dilapangan kosong Bapak Menteri, bahkan harganya bisa mencapai Rp23.000,00 per kg, ini juga menjadi catatan pangan ini ada atau tidak ini harus jujur Pak Menteri jadi sehingga kita bisa betul-betul cek seperti apa menyangkut ketersediaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Kemudian yang ketiga Pak Menteri, ini berkaitan dengan impor. Kemarin kita baru selesai pertemuan dengan Kabulog Bapak Buwas. Ini juga beliau sangat malu berkaitan dengan impor. Ini sebenarnya siapa sih kewenangan impor ini, kenapa? Kalau kita berikan kewenangan ke Bulog saya pikir ini tidak terjadi kelangkaan dengan kondisi hari ini, termasuk gula yang ada dilapangan. Jadi mungkin ini perlu ada kordinasi antara Menteri Pertanian dan Bulog supaya termasuk Kementerian Perdagangan. Sehingga dalam krisis pangan seperti ini tidak ada lagi saling menyalahkan satu sama



lain, berikan kewenangan masing-masing jadi sehingga ketersediaan pangan itu betul-betul ada dan masyarakat bisa menikmati.

Terakhir Pak Ketua....

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Muslim.

Sinyalnya kurang bagus, terima kasih.

Selanjutnya Bapak Sumail silakan.

**F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):**

Bisa didengar Ketua.

Baik, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat siang.

Bapak Ketua, Pimpinan, Wakil Pimpinan dan Anggota, Bapak Menteri beserta segenap jajaran yang saya muliakan.

Tentu saya berharap bahwa wabah COVID-19 ini cepat berakhir, sehingga kita langsung menjalankan kehidupan normal kembali. Namun demikian, saya sangat menyayangkan adanya pergeseran postur anggaran yang besarnya Rp3,6 triliun ini sangat besar sekali. Karena ada beberapa perkiraan lagi mungkin COVID ini juga akan sampai bulan September. Tehtu ada potensi lagi untuk pengurangan-pengurangan anggaran yang ada di Kementerian Pertanian. Kami berharap Bapak Menteri ini untuk bertahan menyampaikan kepada Bapak Presiden dan Kementerian Keuangan bahwa kita ini berada di garda gugus depan dalam rangka menyiapkan dan memastikan ketersediaan bahan pangan. Bukan hanya mengamankan tentu distribusi dan harga yang layak bagi masyarakat juga penting dengan memperhatikan kesejahteraan petani.

Yang kedua Bapak Menteri, saya ingin menyampaikan agar Bapak Menteri memprediksikan dan menghitung kembali orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan produksi di sector pertanian tanaman pangan dan peternakan, karena COVID ini tentu mengkhawatirkan juga pihak-pihak atau orang-orang petani dan peternak juga terjangkit dalam virus COVID-19 ini. Sehingga nantinya refocusing anggaran betul-betul bisa untuk menggerakkan dan menyemangati mereka kembali turun kelapangan dengan kepastian harga yang betul-betul terjangkau dan menguntungkan.

Berikutnya, saya barusan mendengar bahwa sedikit bercerita tentang Dapil bahwa ada produksi kurang lebih 30 ribu ton yang saat ini panen jagung di daerah Banyuwangi. Namun demikian, harganya sangat anjlok yang

biasanya Rp4.200,00 saat ini menjadi Rp3.400,00 atau Rp3.200,00 dan kemungkinan ini akan turun kembali. Nah, integrator-integrator yang ditunjuk atau yang sudah menjadi mitra Kementerian Pertanian saya kira ini juga harus bisa melakukan penyerapan terhadap produksi-produksi pertanian yang saat ini mengalami panen raya.

Dan ini sebenarnya momentum Pak Menteri, dalam rangka untuk kita secara pangan kita aman dan mencapai kepada kedaulatan pangan, sehingga impor-impor yang tidak penting itu saya kira untuk dihindari. Ada beberapa tadi disampaikan oleh beberapa Anggota bahwa ada kebijakan-kebijakan yang sudah menabrak hukum-hukum dan Undang-Undang yang seyogyanya tidak perlu. Bawang putih juga sudah disinggung, Temanggung juga sudah produksi dan lain-lain sebagainya. Ini juga saya kira harus menjadi perhatian kembali.

Kaitannya dengan gula Pak Menteri, mohon dihitung kembali sebenarnya seberapa besar luasan areal tanam gula kita ini, sehingga setiap tahun kok kita impor dan impor terus. Saatnya kita memberikan subsidi kepada petani-petani tebu dalam rangka menggiatkan dan menyemangati kembali.

Berikutnya tidak kalah pentingnya karena COVID ini juga membuat orang stay di rumah, tinggal dirumah, demikian juga dengan pemuda-pemuda. Kiranya Kementerian Pertanian bisa mengalokasikan lebih besar lagi atau memberikan modul-modul pelatihan-pelatihan kepada anak-anak muda yang saat ini tinggal dan pulang yang tadinya di kota mereka kembali ke desanya sehingga punya ketertarikan untuk memproduksi di bidang pertanian.

Demikian Bapak Ketua, saya kira.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selanjutnya Bapak Johan yang dari NTB.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Ketua yang saya hormati,  
Bapak Menteri dan seluruh jajarannya.

Pertama, sama dengan teman-teman yang lain kecewa kita dengan kebijakan terhadap pemotongan di Kementerian Pertanian. Itu membuktikan bahwa Pemerintah kurang perhatiannya terhadap ketahanan pangan. Perlu

kita ketahui bahwa mungkin lapar itu lebih cepat mati dibanding dengan COVID .... (sinyal terputus).

**KETUA RAPAT:**

Pak Johan nampaknya sinyalnya kurang bagus.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

.... Dalam Pasal 1 Ayat (4) dana yang digunakan salah satunya pada point 4 adalah dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum. Menurut penelusuran kami Pak Ketua, Bapak Menteri yang saya hormati. Ada dana Rp18 triliun di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit inikan BLU. Ada Rp18 triliun yang mungkin bisa kita gunakan untuk menutup kekurangan atau dana yang diambil ... (sinyal terputus).

**KETUA RAPAT:**

Pak Johan nampaknya sinyalnya kurang bagus, nanti kita kasih kesempatan lagi Pak Johan.

Selanjutnya Bapak Slamet Ariyadi dari Fraksi PAN.

**F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, juga Bapak Menteri yang saya hormati.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Saya belum selesai Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Johan, nanti habis ini balik lagi ke Bapak Johan, karena tadi keputus-putus Pak Johan, sinyalnya jelek.

**F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Sudin yang kami hormati.

Yang pertama, melihat anggaran petani baik pusat maupun daerah hanya ada 8 lokasi dan dianggarkan Rp900 apa miliar ini saya tidak ngerti ini terlalu sedikit. Kalau boleh saya sarankan kepada Bapak Menteri, tolong dianggarkan, ditambah anggarannya bagaimana bisa untuk menyerap ketersediaan pangan ketika hanya 8 lokasi dan anggarannya hanya Rp925,

ini sangat tidak logis. Bagaimana bisa untuk menyiapkan ketersediaan pangan untuk menghadapi COVID ataupun jangka panjang untuk menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri ini. ketika melihat di dalam anggaran, Badan Ketahanan Pangan ini ada bantuan pangan pemantapan ketersediaan, stabilisasi pangan senilai Rp44 miliar. Alangkah eloknya jika ini dialokasikan untuk menyerap anggaran gabah punya petani.

Yang kedua, terkait masalah adanya nilai tambahan padat karya, saya sarankan kepada Bapak Menteri untuk menambah jalan pertanian. Yang jelas ini berbeda dengan program jalan usaha tani. Tentunya pembuatan jalan pertanian ini diperuntukan fasilitas ataupun sarana yang sangat memadai seperti halnya eskavator. Untuk bisa mengakses buka lahan baru jalan menuju jalan pertanian. Contoh, salah satu kepulauan yang ada di Madura, Bapak Menteri Madura terdiri dari 126 pulau yang sangat produktif untuk lahan pertanian. Khususnya di daerah Kangean ada 40.000 hektar lahan untuk pertanian yang hari ini hanya dipakai 9.000 hektar dan sedang panen raya, sisanya 31.000 hektar yang tidak terpakai.

Saya tantang Bapak Menteri dan Bapak Dirjen untuk turun langsung guna meninjau lokasi di daerah kepulauan. Bukan hanya di daerah kami yang khususnya di wilayah Madura, saya siap tanggung diakomodir semua fasilitas, baik transport biar tidak merugikan negara, kalau perlu kita pakai helicopter, saya menggunakan dana pribadi. Kapan waktunya saya tunggu Bapak Menteri, karena selama ini untuk kepulauan ini sangat terdiskriminasi, ini yang saya harapkan. Itu yang kedua.

Yang ketiga, di Dirjen Tanaman Pangan ada anggaran Alsintan pengolahan tanaman pangan sebesar 186 unit ditambah menjadi 174 unit. Apa bedanya dengan alokasi anggaran yang ada pada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang juga menyiapkan dan menganggarkan alat-alat mesin pertanian yang awalnya 23.000 titik dikurangi menjadi 9.500 titik selain *hand tractor* dan alat-alat bantuan Alsintan lainnya, ini apa bedanya. Dia dua badan, di dua Dirjen ini sama-sama menganggarkan dengan sama-sama anggaran yang cukup besar.

Yang ketiga ....

#### **KETUA RAPAT:**

Yang keempat Pak, tadi sudah ketiga Pak.

#### **F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):**

Yang keempat, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Menteri meskipun anggaran Kementerian Pertanian, teman-teman sangat mengecewakan karena banyak anggaran yang dikurangi. Akan tetapi yang saya apresiasi pasar *online* atau toko *online* yang hari ini sudah dianggap terbesar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pertanyaan saya, apakah toko online tersebut sudah mati, apakah yakin sudah terjangkau ke 34 provinsi, karena setelah saya Rapat Kerja pertama dengan Menteri saya

mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya yang lagi melaksanakan isolasi ataupun stay di rumah ini ketika melakukan pemesanan di toko *online* ini tidak terjangkau khususnya di masyarakat Madura yang merupakan daerah yang juga jauh dari namanya layak ataupun dari kemandirian secara pangan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Slamet cukup ya?

Waktunya cukup ya?

Jadi Pak Slamet saya jelaskan disini, tanaman pangan sama prasarana sarana pertanian itu beda. Satu, pengolahan dan satu lagi pasca panen. Jadi nanti Bapak pulang di rumah belajar lagi, di baca-baca sampai detail.

Selanjutnya kembali ke Bapak Johan, sudah bisa bagus Pak Johan.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang pertama, tadi saya kembali atas kekecewaan kita terhadap pemotongan anggaran ini membuat kita harus kreatif. Berdasarkan keterangan dari Dirjen Perbendaharaan Keuangan di Kementerian Keuangan kita bisa ada dana Rp18 triliun di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang merupakan BLU dari Kementerian Pertanian. Ini bisa kita pakai Pasal 2 Ayat (1) Huruf I di Perpu yang sudah disepakati itu. Karenanya Rp18 triliun ini bisa kita olah-olah lagi untuk Kementerian ini sehingga tidak ada yang dipotong-potong. Itu satu.

Yang kedua, menyambung Bapak Slamet dari Madura tadi itu. Toko Tani Indonesia, benar ini belum menyebar di seluruh Indonesia hanya ada 51 titik. Nah, karenanya saya menyarankan kepada Bapak Menteri untuk bekerja sama dengan Kementerian Desa agar mensinergikan Toko Tani Indonesia ini dengan Bumdes yang ada. Bukankah dana desa itu sudah bisa dipakai untuk penanganan COVID ini terutama pengadaan ketahanan bahan pokok masyarakat, sehingga bisa disinergikan antara Toko Tani dengan Bumdes yang ada.

Yang berikutnya saya ingin pendalaman pada realokasi internal. Itu Sekjen paling sedikit hematnya cuma Rp17 miliar. Padahal masih kegiatan yang bisa dilakukan penghematan seperti layanan umum, layanan rumah tangga, pengadaan barang dan jasa serta kegiatan pengelolaan Humas senilai Rp53,97 miliar dan kegiatan kordinasi sebanyak Rp35,4 miliar. Yang sebaiknya anggaran ini dialihkan kepada penanganan COVID.

Berikutnya presentasi pengurangan penghematan pada Badan Litbang dan SDM jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Dirjen, padahal fungsi badan adalah sebagai penunjang pelaksana teknis dilapangan oleh Ditjen.

Contoh misalnya, tanaman pangan PSP hortikultura. Di Balitbang pagu awalnya Rp1,8 triliun penghematan dan hanya Rp106 miliar, presentasinya sangat kecil jika dibandingkan dengan hortikultura. Nah, ini menjadi catatan saya mudah-mudahan inikan menjadi contoh, hortikultura besar dipotongnya dari Rp1,0682 triliun penghematannya sampai Rp290 miliar. Bagaimana kita tidak mengimpor bawang putih padahal teman-teman semua tadi kita sepakat bahwa kita harus meyakinkan Pemerintah bahwa stok kita aman, stok kita aman, tapi kita impor bawang putih, kita impor kerbau segala macam ya memang karena anggarannya dia dipotong. Karena itu perlu juga dipikirkan.

Terus yang ketiga Pak Menteri, salam dari teman-teman penyuluh yang ada di Sumbawa. Tolong kantornya diperbaiki Pak, tolong kantornya diperbaiki katanya, karena kemarin itu berdampak dari ditariknya DAK itu anggarannya ada di DAK katanya sehingga dia kantornya tidak bisa diperbaiki tahun ini. Tempat mereka bekerja nah itu yang perlu kita pikirkan secara baik, jangan sampai penyuluh kita, penyelia mitra tani dan stake holder pertanian itu harus kita jamin. Jangan sampai dana penanggulangan COVID-19 di Kementerian Pertanian ini dibawa lagi ke Mensos, dibawa lagi ke lain-lain. Ini harus kita jaga stake holder pertanian ini harus kita jaga.

Nah, yang terakhir Pak Ketua, karena sudah banyak tadi yang disampaikan oleh teman-teman tolong manfaatkan mahasiswa-mahasiswa pertanian yang pulang kampung. Karena saat inikan lagi di lockdown kampus-kampus, pulang ke desanya masing-masing. Nah, manfaatkan mahasiswa-mahasiswa pertanian ini, itu mungkin yang jadi sasaran pelatihan untuk starup-starup tadi itu sehingga mereka bisa membantu Pemerintah dengan kreatifitas yang mereka punya untuk kemudian menjual produk-produk pertanian dari desa mereka masing-masing.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Selanjutnya Pak T.A. Khalid Fraksi Gerindra.

**F-GERINDRA (Ir. H. T.A. KHALID, M.M.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengar Mbak Kiki.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Dengar Pak.

**F-GERINDRA (Ir. H. T.A. KHALID, M.M.):**

Pimpinan beserta seluruh Anggota Dewan Komisi IV DPR RI yang kami banggakan,  
Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Sudin, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran.

Pertama, bukan bermaksud ingin mengulangi apa yang telah disampaikan oleh teman-teman terdahulu sebagaimana juga tadi yang terakhir disampaikan oleh Bapak Johan dan juga sebelumnya oleh Bapak Darori, kemudian Bapak Suhardi Duka, kemudian Bapak Hansi Lema dan teman-teman lainnya menyangkut refocusing anggaran. Saya pada prinsipnya sangat mendukung, namun mohon optimalisasi koreksi daripada Menteri Pertanian sendiri menyangkut ada tumpang tindih anggaran yang masih terjadi di refocusing anggaran ini.

Yang kedua, kita yakin bahwa corona ini pasti akan berlalu, kita tidak menganggap bahwa corona ini kiamat, kita tetap optimis bahwa *Insyah Allah* pasti akan berlaku. Mana oleh karenanya, disamping kita mencegah kesehatan sebagaimana refocusing anggaran yang telah dilakukan oleh Kementerian sendiri, Kementerian Pertanian sendiri juga yang paling urgent adalah dalam kondisi 3 sampai 6 bulan kedepan adalah menyangkut ketersediaan pangan.

Kemudian menyangkut dengan ketersediaan pangan ijin Bapak Menteri, saya masih ingat apa yang Bapak Menteri sampaikan di dalam rapat Komisi IV DPR RI, mari kita untuk berlaku jujur. Dimana kita mengatakan bahwa gula aman, kemudian produk lainnya aman, tetapi nyatanya sampai hari ini Bapak Menteri, saya melaporkan dari Aceh, sudah sebulan setengah saya di Aceh. Dan saya sudah sampaikan termasuk kepada Dirjen Bapak, termasuk kepada Ketua Sudin dan saya sampaikan di Rapat Komisi IV DPR RI melalui virtual dan Bapak muslim juga menyampaikan bahwa sejak sebulan yang lalu gula di Aceh Rp20.000 sampai hari ini masih Rp20.000,00 jujur Pak, saya di Aceh sudah satu bulan setengah. Rasanya tidak pernah hadir Pemerintah Indonesia ke Aceh. Menyangkut ada kondisi COVID hari ini di Aceh, Pemerintah Aceh telah menanganinya 61.000 bantuan tetapi Kementerian Pertanian khususnya belum teras ada di Aceh. Maka saya berharap kepada Bapak Menteri dengan skema apa yang telah disampaikan tadi menyangkut dengan refocusing anggaran tentang sosial safety net ini dapat segera kita laksanakan. Saya ingin sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, Kementerian Pertanian hadir di Aceh.

Kemudian yang terakhir, kita optimis bahwa corona ini pasti akan berlalu, maka tugas kita pertanian mengamankan pangan nasional untuk jangka panjang juga harus terus kita optimalkan. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Pertanian sebagaimana yang telah disampaikan dalam refocusing anggaran sekali lagi saya berharap agar dapat dikoreksi sebagaimana saran teman-teman terdahulu saya tidak mau memperpanjang lagi, saya tidak menyampaikan secara detail lagi, tadi teman-teman sudah menyampaikan.

Sekali lagi saya berharap Bapak Menteri, saya satu bulan setengah di Aceh tidak merasa hadirnya Pemerintah Pusat ke Aceh. Terutama saya sebagai Anggota Dewan Komisi IV DPR RI saya berharap, saya ingin agar Kementerian Pertanian hadir di Aceh dalam kondisi COVID seperti ini.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ibu Vita, selanjutnya Ibu Yessy setelah Ibu Vita.

Ibu Vita bisa on Ibu Vita.

**F-PDIP (VITA ERVINA, S.E.)**

Terima kasih.

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI,  
Bapak Menteri dan jajarannya.

Selamat siang dan semoga kita sehat selalu, baik itu yang *work from home* ataupun yang harus melakukan kegiatan secara fisik keluar rumah, bahkan juga harus keliling daerah.

Seperti Bapak Menteri, baru saja kembali dari Temanggung Dapil saya. Seingat saya Bapak Menteri juga pernah mengajak saya untuk panen bawang putih di Temanggung. Namun, keadaan *pandemic COVID* ini tentunya saya maklum sosial distancing tidak memungkinkan. Tentu saya mengapresiasi Bapak Menteri mau turun ke bawah langsung menyapa petani untuk mengetahui ketersediaan pangan dan mengetahui secara langsung permasalahan tentang bawang putih. Itu juga yang menjadi hal untuk saya tanyakan.

Ini terkait realisasi rencana mempercepat realisasi impor bawang putih. Yang ingin saya tanyakan ini merupakan RPIH lama lama wajib tanam atau yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak Darori ada diskresi tadi edaran Kemendag sudah harus melakukan pembebasan wajib tanam, sehingga mohon penjelasannya yang terang benderang, agar bisa dampak dari hal tersebut tidak terus berkepanjangan karena petani lokal di Temanggung mungkin Bapak Menteri sudah tahu harga panen basah saja Rp600 per kg kemarin sempat petani panenanya tidak terbeli, ini menjadi hal. Selanjutnya saya berharap Kementerian Pertanian bisa menyerap panen dari para petani lokal, mendahulukan hasil-hasil dari produk petani lokal.

Kemudian juga yang kedua, mungkin Bapak Menteri tidak sempat panen cabai, meninjau panen cabai. Komoditas cabai saya informasikan juga anjlok harganya Rp6000 per kg Pak Menteri, ini sangat berbanding jauh



dengan harga dipedagang di Jakarta yang harganya sekitar Rp30.000 sampai Rp40.000 per kg. Saya berharap ini cabai yang merupakan komoditas yang tidak tahan lama juga sayur mayor dan buah-buahan juga harus segera diberikan kepada konsumen. Saya berharap ini mendapat perhatian lebih.

Terkait juga dengan pemberlakuan PSBB di banyak daerah perlu juga dilakukan sosialisasi lagi lebih gencar dan kordinasi dengan pihak-pihak terkait, logistic pangan, sehingga keluar masuknya tidak terkendala. Saya berharap nanti pandemik mudah-mudahan bisa juga segera berakhir, namun kita tidak tahu sampai kapan. Mohon bantuan transportasinya mungkin bisa berupa stimulus transportasi atau bahkan transportasinya ada pengawalan sehingga tidak ada kendala di perjalanan.

Kemudian yang terakhir, terkait dengan refocusing kegiatan pangan saya hanya ingin menegaskan bahwa petani adalah menjadi tulang punggung ketersediaan pangan nasional mohon agar dalam refocusing anggaran ini dalam upaya menghadapi COVID-19 ini bisa benar-benar menyentuh langsung kepada petani, baik itu berupa kepastian harga, intensif, ataupun stimulus harga pada panen lokal agar para petani kita nasional ini tetap termotivasi untuk tetap menanam. Mungkin itu dari saya Pak Menteri dan juga Pimpinan.

Sekian, saya akhiri.

Terima kasih.

Selamat siang.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Selamat siang.

Ibu Yessy dilanjut selanjutnya dengan Bapak Sutrisno *stand by*.

**F-NasDem (YESSY MELANIA, S.E.):**

Terima kasih.

Selamat sore,  
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Bapak Menteri dan jajaran saya doakan semoga kita semuanya sehat wal'afiat.

Yang pertama, saya ingin mengapresiasi kepada Bapak Menteri beserta jajaran yang sudah dengan bersusah payah pasti tentunya memikirkan yang mana sekiranya anggaran yang perlu untuk dipangkas atau difocusing kembali. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya sector pertanian ini justru seharusnya bukan dikurangi tetapi justru harus ditambah, karena tadi betul yang kawan-kawan terdahulu sampaikan bahwa kita ini juga

menjadi garda di tengah *pandemic COVID-19* ini. Ibu bukan hanya di sektor kesehatan tetapi ketahanan pangan, masyarakat Indonesia itu juga menjadi prioritas utama kita.

Dan saya juga mau memberikan gambaran sedikit, informasi yang saya temui dilapangan Bapak Menteri. Jadi di tengah *pandemic COVID-19* seperti ini jutaan masyarakat Indonesia sudah di PHK, dan juga pekerja-pekerja harian, pekerja-pekerja lepas juga sudah bisa dikatagorikan tidak punya penghasilan yang tetap lagi. Jangankan sekarang, kemarin saja mereka sifatnya hanya harian lepas apalagi saat ini yang sifatnya dianjurkan untuk berada di rumah saja.

Nah, ini tentu menjadi catatan kita dan ada berita positif sebenarnya di sector pertanian bahwa masyarakat kita yang sudah di PHK dan yang WFH itu kebanyakan beralih berpikir untuk sekiranya terjun di sector pertanian. Ini menjadi tantangan juga tersendiri bagi kita bagaimana dari Pemerintah Indonesia itu sendiri, Bapak Menteri beserta jajaran untuk bisa mengakomodir cita-cita mereka, keinginan mereka untuk bergabung berusaha di sector pertanian ini. Karena sector pertanian ini dianggap menjadi sector yang akan menang sifatnya di tengah wabah ini.

Jadi bukan sector yang sifatnya loser yang bisa kalah atau hilang seperti pariwisata, perhotelan, travel dan segala macam. Dan karena sector ini menjadi sector yang cenderung masyarakat Indonesia mengalami pergeseran dari yang sebelumnya mungkin mereka bekerja bukan sector pertanian sekarang mereka berpikir di sector pertanian. Karena bagi mereka sector pertanian ini adalah sector yang masih dianggap steril di wabah corona ini. Itu saja yang pertama.

Dan tentu saya juga menyayangkan bahwa ketika anggaran dibidang yang berhubungan langsung dengan teknis dilapangan seperti pengadaan Alsintan, kemudian bibit, benih dan segala macam juga ikut dikurangi. Seharusnya ini ditambah karena melihatuforia masyarakat di Indonesia saat ini juga sedikit banyak lebih bergeser kepada pertanian. Dan kalau saya buka sedikit berita di youtube dan kemudian saya *googling* juga petani-petani milenial ini juga sangat meningkat pendapatannya. Jadi tidak juga sedikit orang yang termotivasi untuk terjun ke sector pertanian. Itu yang menjadi pertanyaan kita bahwa tantangan kita menyiapkan anggaran, tantangan kita menyiapkan fasilitas infrastruktur apa yang diharapkan oleh masyarakat kita yang ingin terjun di sector pertanian.

Kemudian yang kedua, saya meng-highlight tentang Toko Tani Indonesia Pak Menteri, saya mengapresiasi program ini sangat baik dan dihidupkan kembali oleh Kementerian Pertanian beserta jajaran ke daerah. Tetapi ada satu pertanyaan saya bahwa Toko Tani Indonesia sepertinya belum semuanya terjangkau, terproses berjalan dengan baik di Indonesia ini, Contohnya di Dapil saya Toko Tani Indonesia ini sebetulnya belum existing. Dan saya juga ingin menanyakan bahwa disini aa refocusing anggaran Rp4 miliar lebih khusus untuk penguatan Toko Tani Indonesia. Ini anggarannya seperti apa, mekanismenya, implementasinya dilapangan apakah membeli

aplikasi baru atau seperti apa. Karena yang saya lihat tadi dan tadi juga disampaikan oleh Mbak Luluk bahwa ini program yang sifatnya saya pikir masih Java Centris.

Jadi hanya di kota-kota besar saja yang masih bisa mengakses tapi di masyarakat pedalaman seperti Dapil saya masih belum mampu untuk mengakses ini. Karena saya baca sekilas program ini kalau tidak salah dibandery oleh Gojek. Jadi daerah-daerah yang sudah ada Gojek mungkin sudah bisa mengakses Toko Tani Indonesia, tetapi di Dapil saya di 5 kabupaten ini belum ada aplikasi Pak Menteri. Jadi bagaimana solusi dari Pemerintah karena program ini dihadirkan oleh Pemerintah tentu ingin disamakan seluruh masyarakat Indonesia, baik itu di pedalaman sampai di kota-kota besar harus dipastikan bisa mengakses dan bisa merasakan yang sama.

Jadi sekali lagi saya ingin program-program dari kementerian ini jangan sifatnya hanya Java Centris tetapi harus terdistribusikan dan dipastikan dijamin oleh Pemerintah Indonesia semua masyarakat Indonesia bisa merasakan.

Mungkin itu saja Bapak Menteri, Bapak Ketua yang saya hormati.

Terima kasih.

Selamat sore.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Mbak Yessy.

Selanjutnya Bapak Sutrisno, silakan.

**F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Selamat siang para Anggota dan Bapak Menteri beserta jajaran.

Saya langsung yang pertama terkait anggaran untuk pencegahan COVID yang Rp45 miliar. Kalau saya cermati anggarannya peruntukannya hanya untuk pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, bagaimana para birokrasi pertanian di daerah yang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mengemban amanat dari Kementerian Pertanian. Apalagi para penyuluh yang bergerak beraktifitas saat ini adalah sector pertanian. Para penyuluh bergerak setiap hari, kalau mereka terkapar bagaimana nasibnya pengembangan pangan kedepan. Mohon untuk diperhatikan, kalau belum dianggarkan mohon untuk dialokasikan anggarannya, karena ada di daerah Bupati secara terbuka bicara kepada media minta bantuan APD kepada masyarakat. Ini artinya di daerah sangat sulit untuk mendapatkan APD.

Yang kedua, di Badan Ketahanan Pangan. Ada anggaran penguatan ketersediaan pangan berbasis pertanian keluarga Rp270 lokasi dengan anggaran Rp67,5 miliar artinya masing-masing lokasi Rp250 juta. Kemudian bantuan pangan, pemantapan ketersediaan pangan Rp44 miliar. Bapak Menteri, di daerah atau di desa itu ada lumbung kelompok masyarakat, lumbung kelompok petani, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di daerah dalam rangka ketahanan di desa akan lebih bermanfaat manakala anggaran ini khusus dialirkan untuk membantu lumbung-lumbung pangan yang secara mandiri dibangun oleh masyarakat. Saya hitung ada sekitar 26.000 ton kalau masing-masing dikasih 1 ton sudah 26.000 lumbung pangan masyarakat bisa diberikan modal awal untuk memancing Anggota masyarakat juga menambahkan persediaan di lumbung pangan.

Kemudian yang ketiga, di BPSDM itu ada anggaran bantuan modal untuk wirausahawan muda jumlahnya Rp30 miliar untuk 127 kelompok. Ini belum ada kejelasan bagaimana mengalokasikannya, kepada siapa, kami ini di daerah Pak Menteri, rumah kami itu adalah rumah aspirasi. Keluhan masyarakat, permohonan masyarakat kepada kita yang ada di daerah. Oleh karena itu, dalam menyalurkan program-program semacam ini, itu termasuk tadi bantuan ayam yang 2 juta, 1 juta dari Dirjen Peternakan dan 1 juta dari Balitbang. Seharusnya ini secara terbuka kepada siapa agar terarah sasarannya. Agar betul-betul masyarakat yang memerlukan juga mendapatkan bantuan itu sehingga ekonomi di desa, ekonomi di daerah juga akan terbangun.

Kemudian di Dirjen Pertanian Pangan, itu ada anggaran bantuan distribusi beras dan jagung jumlahnya Rp50 miliar untuk 100.000 ton. Saya hitung 1 ton itu Rp500.000,00. Keuntungan para penggiling padi menjual padi ke Bulog marginnya hanya Rp300. Pertanyaan saya kepada siapa anggaran ini akan dialirkan, yang jelas tidak akan sampai kepada petani. Mohon untuk dikaji kembali.

Dan terakhir Pak Menteri, di wilayah Dapil saya produksi pertanian khususnya sayur mayur tidak terserap ke pasar, karena pemasok kesulitan untuk menyalurkan ke pasar-pasar. Oleh karena itu, di dalam program ini belum nampak bagaimana membantu agar produksi pertanian tersalurkan. Kalau hanya mengandalkan Toko Tani bagaimana mungkin Toko Tani bisa menampung produksi pertanian begitu besar, dimana pergudangannya. Paling tidak pasar-pasar induk mulai dibuka, dengan pengawalan dari kita sehingga distribusi hasil pertanian rakyat bisa diserap oleh masyarakat.

Terima kasih Bapak Ketua dan Bapak Menteri.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Sutrisno.

Selanjutnya Ibu Endang, silakan.

Singkat dan jelas Ibu.

**F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):**

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati,  
Dan teman-teman para Anggota Dewan yang terhormat.

Saya hanya ingin mengusulkan tadi teman-teman sudah menceritakan bagaimana mengantisipasi ketahanan pangan kita. Nah, Pak Menteri ini kesempatan yang baik bahwa kita inikan sebetulnya punya tanaman-tanaman obat yang sephis .... Nah, ini perlu digalakkan karena tadi selain pangan kesehatan juga perlu kita jaga. Dan pada prinsipnya Ibu-ibu di sekitar kita dan juga para milenial sudah mulai menyenangi obat-obatan herbal. Malahan DPR RI Pusat sendiri sekarang untuk mengantisipasi *COVID* ini dengan herbal.

Nah untuk itu, ini kesempatan yang baik bagaimana kalau bibit ditanaman obat dari Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Litbang Pertanian digalakkan dan kemudian para milenial dan teman-teman yang lockdown korban dari PHK ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuka cafetari-cafeteria lokal yang tidak dikerumuni banyak orang dan juga bisa mengantisipasi tenaga-tenaga kerja sekarang yang sudah mulai banyak yang menganggur. Jadi tidak hanya menerima bantuan tapi diberi pengetahuan-pengetahuan untuk mengelola pasca panen kita yang sudah mulai berlimpah dan tidak ada yang mengakomodir. Nah, ini adalah kesempatan baik untuk Kementerian Pertanian berbuat sesuatu di lokal. Jadi kita boleh berpikir *global thinking* tetapi *local action*.

Hanya itu Pak Menteri, semoga Bapak Menteri dan jajarannya sehat *wal'afiat* juga para teman-teman Anggota Dewan yang terhormat.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Endang.

Selanjutnya Pak Bambang dari Kalimantan Tengah.

Silakan.

**F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengar Pimpinan?

**KETUA RAPAT:**

Jelas.

**F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):**

Terkait dengan wabah virus corona ini tentu yang trennya saat ini terus meningkat. Ada dua persoalan yang serius bagi bangsa ini, yang pertama menghadapi wabah, yang harus menjaga jarak dan tinggal di rumah. Yang kedua, kebutuhan hidup masyarakat yang harus tentunya tergantung dari kegiatan yang memerlukan mobilitas. Terkait dengan hal itu, maka saya menyarankan kepada Kementerian harus diantisipasi sejak dini. Negara kita adalah negara kepulauan yang sangat tergantung dengan sarana transportasi. Karena virus COVID-19 ini masih *trend*-nya meningkat alat transportasi ini secara alami akan berhenti dengan sendirinya karena penumpang tidak ada. Dan ini sudah terjadi satu per satu rontok, artinya distribusi pangan ke kepulauan-kepulauan pasti akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, perlu Pak Menteri, mengantisipasi hal ini sejak awal.

Yang kedua, ini mohon maaf Pak Menteri, bukan tidak setuju karena saya ini mantan pegawai juga. Anggaran untuk dukungan peningkatan daya tahan tubuh pegawai masing-masing Dirjen setelah saya jumlah, ini jumlahnya hampir Rp40 miliar, cukup besar sementara kita memerlukan dukungan untuk kebutuhan kelangsungan hidup dan distribusi petani. Alangkah lebih baik ini agak dikurangi dan kemudian ditambah untuk kepentingan para petani kita, karena petani kita saat ini panen tapi tidak ada yang beli. Oleh karena itu, tentu ini harus diatasi oleh Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dapat menampung hasil-hasil pertanian petani agar mereka bisa tetap berlangsung, karena kalau tidak mendapatkan hasil tentu modal mereka untuk menanam ....

Saya kira itu dua point yang perlu saya sampaikan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Bambang.

Selanjutnya Bapak Panggah, silakan Bapak Panggah.

**F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Menteri beserta jajarannya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Sudah banyak rekan-rekan yang menyampaikan, tapi saya kira saya akan memberikan beberapa catatan. Disini pertama adalah kita ini Rapat Dengar Pendapat untuk membicarakan hal-hal.

Kedengaran Pak?

**KETUA RAPAT:**

Jelas Pak Panggah, jelas.

**F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):**

Jadi hari ini atau siang ini kita sedang membicarakan yang terkait lebih fokus, yaitu menyangkut situasi kondisi kalau dilingkungan legislatif ini sampai ya sudah gaji di potong sampai ada yang 2-3 bulan di daerah. Saya kira ini menunjukkan bahwa kita sensitif dengan kondisi saat ini. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa masih ada mata anggaran-mata anggaran yang sebenarnya masih bisa dipotong dan tidak menunjukkan sensitifitas kita, saya kira ini perlu disisir lagi Pak Menteri. Seperti tadi SPJ disebutkan Bapak Ketua, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, kemudian program-program ekspor apa yang mungkin kondisi seperti sekarang dalam keadaan tidak normal begini masih ada program-program ekspor yang tidak mungkin dilaksanakan dan sebagainya.

Namun demikian, saya mengharapkan jangan juga dipotong untuk mata anggaran-mata anggaran yang mendukung untuk produktifitas pangan. Khususnya tentu saja yang terkait aspirasi Pak Menteri, aspirasi kita semua yang sudah dicanangkan itu karena di daerah itu terus terang kita saya terjun ke daerah akhir-akhir ini ya mengatakan bahwa bagaimana ini negara kok hadir tidak dalam kondisi seperti ini. Ini saya kira jangan sampai ini aspirasi seperti itu.

Yang kedua, ini saya kira ada pembelajaran yang sangat berharga bagaimana ketahanan pangan kita itu diuji dalam kondisi emergency seperti ini. Ini saya kira belum *emergency* yang gawat sekali, kalau pada kondisi emergency yang sangat gawat tentu saja masalah pangan ini akan menjadi sesuatu yang paling dibutuhkan. Nah, disini ada pencaangan untuk membangun buffer 11 jenis pangan. Nah, ini bagaimana ini dalam pelaksanaannya. Karena sekarang terus terang ini sudah mekanisme pasar yang berlaku, sementara Bapak Menteri hanya mempunyai satu mungkin masalah kebijakan itupun baru sebagian dari seluruh kebijakan. Nah, ini masih ada diluar kebijakan Kementerian Pertanian yang Bapak Menteri sendiri tentu saja tidak bisa menentukan secara 100% hal-hal yang terkait kebijakan diluar kementerian.

Belum tangan operasional juga Pak Menteri juga tidak punya, atau minimal dulu ada Bulog. Nah, ini sekarang ada Toko Tani Indonesia dan lain-lain kok membuat satu ide baru, kenapa tidak Bulog saja dibenahi, karena Bulog ini ada dua hal saja masalahnya. Pertama, kalau ditugasi soal buffer atau stabilitas pangan atau ketahanan pangan, maka harus ada dukungan Pemerintah sepenuhnya jangan sekarang ini Bulog operasionalnya atau working capitalnya itu dari bank. Kalau kita harus ada stok 3 juta beras misalnya dibutuhkan 21 triliun. Itu kalau di bank itu bunganya saja sudah 2,1 triliun, ya mana mungkin itu bisa tertahan. Yang kedua, Bulog ini menghadapi masalah SDM yang tidak kompeten, ini warisan masa lalu yang menjadi kewajiban saya kira untuk SDM ini dibenahi. Jadi tidak membuat satu ide

baru yang mungkin sangat tidak teruji seperti Toko Tani dan lain-lain, kenapa tidak Bulog saja yang direvitalisasi.

Yang berikutnya masalah bawang itu, itu kebetulan ini satu kebijakan yang kontra produktif ini untuk petani. Karena sekarang ini memang sedang panen raya, kebetulan saya satu Dapil dengan Mbak Vita itu dari Temanggung, tapi kenapa yang diundang hanya Mbak Vita Pak Menteri ini. Saya itu satu Dapil dengan Mbak Vita, kebetulan saya juga asli dari Temanggung, ini pilih kasih Bapak Menteri ini hanya Mbak Vita yang diundang. Saya kemarin lagi di Temanggung, terus saya dengar juga Bapak Menteri lagi di Temanggung. Itu juga persis apa yang disampaikan oleh MBak Vita, itu satu kebijakan yang belum real. Dari sisi sudah panen raya, satu sisi....

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak Panggah?

**F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):**

Oke.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Panggah.

Selanjutnya Mbak Ema.

**F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):**

Satu lagi Pak Ketua, yang masalah ayam.

**KETUA RAPAT:**

Ya, bagaimana?

**F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):**

Mohon ayam ini tidak hanya di masalah *COVID* ini sebenarnya, ini sudah sejak dari dulu. Ini mohon bisa diselesaikan secara tuntas ya.

**KETUA RAPAT:**

Tidak bakal bisa kalau Dirjennya masih yang lama.

**F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):**

Ya, itu jangan sampai rekomendasi seperti itu, itukan artinya bahwa penanganannya tidak tuntas itu Pak.



**KETUA RAPAT:**

Karena sebelum *COVID* pun masalah ayam ini sudah lama sekali, bahkan para asosiasi sudah minta *cutting-cutting* tetapi tidak ada kebijakan yang riil dari Kementerian Pertanian.

Selanjutnya Mbak Ema silakan.

**F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan beserta Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,  
Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Menteri Pertanian beserta jajaran.

Semoga kita semua dalam keadaan sehat wal'afiat, aamiin.

Yang ingin saya sampaikan mungkin sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Anggota sebelumnya. Kami hanya menambahkan, yang pertama terkait *refocusing* anggaran untuk pengamanan ketersediaan pangan senilai Rp135,65 miliar antara lain untuk operasi pasar pangan murah dan stabilisasi harga pangan melalui kemudahan masyarakat memperoleh kemudahan bahan pokok dan kebutuhan yang lain melalui pasar tani dana tau toko tani di daerah.

Informasi terkait dengan belanja online, kemudahan-kemudahan belanja bahan pokok kepada masyarakat sangat cepat diterima melalui media medsos. Kami banyak ditanya oleh konsituen bagaimana cara belanjanya, mulai kapan, apakah bisa menjangkau ke desa-desa, mohon ada kejelasan Bapak Menteri karena Pemerintah akan memberikan BLT sebanyak Rp600 per KTM untuk diberikan masyarakat di desa-desa. Kemudian mereka tidak boleh keluar rumah, mereka bisa menggunakan fasilitas atau program yang sudah ditawarkan oleh Kementerian Pertanian yang mungkin saya bisa apresiasi sangat bagus, tetapi implementasi di daerah itu memang sangat sulit untuk menjangkau terkait dengan belanja online. Nanti mohon penjelasannya bagaimana di desa-desa masyarakat bisa memanfaatkan teknologi belanja online tersebut.

Yang kedua, terkait *social safety net* dengan realokasi anggaran sebesar Rp580,03 miliar meliputi padat karya dan bantuan-bantuan benih pangan hortikultura dan perkebunan juga bantuan benih dan sebagainya mohon penjelasan Bapak Menteri apabila anggaran sudah disetujui kira-kira program tersebut kapan bisa terealisasikan. Karena kami juga sering ditanya oleh masyarakat sehingga kami bisa menjawab secara benar.

Yang terakhir, terkait untuk program tani milenial. Di daerah kami banyak pemuda-pemudi yang ingin atau tertarik menjadi petani. Dampak COVID-19 banyak sekali PHK, pengangguran, melihat strategi Kementan

menghadapi dampak COVID-19 ini bagaimana implementasi kegiatan atau program yang diberikan kepada para petani milenial terutama di daerah untuk menghadapi dampak COVID-19 ini.

Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan.

Mohon maaf.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamithariq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Mbak Nur'aeni silakan.

#### **F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pak Ketua yang saya hormati beserta rekan-rekan semua,  
Bapak Menteri beserta jajarannya.

Mencermati apa yang disampaikan kaitan refocusing dan realokasi anggaran, tentu yang pertama saya melihat disini refocusing dan realokasi ini penghematan kurang lebih Rp3,6 triliun. Akan tetapi yang baru tersampaikan kepada kami Komisi IV DPR RI ini baru separuhnya kurang lebih Rp1,8 triliun. Nah, tentu yang dijabarkan hanya 3 fokus *refocusing*, yaitu mengenai dukungan pencegahan penularan corona virus, pengamanan dan ketersediaan, social safety net ini masih rancu saya kira. Karena disini belum saya lihat kegiatan 3 prioritas dijabarkan, baik dari jenis kegiatan, model skema, maupun dari kuantitas yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri. Tadi yang disampaikan Ibu Ema saya juga sama senada, intinya dari beberapa yang dilakukan refocusing ini saya juga ingin mengetahui lebih rigit itu arah dan skemanya seperti apa.

Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri, tentang optimism terhadap stock pangan yaitu surplus melihat neraca perdagangan. Nah, tentu ini juga harus diimbangi dengan data-data yang akurat serta konkrit, kira-kira berapa sih kemampuan dari rata-rata produksi nasional untuk pangan kita. Ini Bapak Menteri belum menyampaikan secara detail serta akurat. Agar kita juga bisa memastikan dan optimisme Bapak Menteri ini bisa kita dukung juga. Ada rasa keyakinan dan kepercayaan sehingga keresahan masyarakat juga bisa kita jawab berapa kira-kira kemampuan Pemerintah untuk bisa memproduksi pangan rata-rata tiap bulannya.

Yang terakhir, stock gula, daging yang mulai langka. Ini juga bagaimana strategi Bapak Menteri ke depan untuk mengatasi persoalan tersebut. Ada wacana atau rencana impor, saya kira mohon juga dievaluasi saya sepakat dengan Bapak Ketua, karena mengingat kalau ada rencana impor daging ini tentu harus diseimbangkan dengan daya beli masyarakat

terhadap daging ayam Pak Ketua. Di Banten sendiri ini sudah mulai hancur para peternak ayam karena harga yang jatuh, sehingga para peternak menengah ke bawah ini, itu menurunkan harga yang cukup miris sekali. Ini perlu mungkin juga perhatian dari Bapak Menteri.

Terakhir, kaitan dengan perlindungan. Saya berharap bahwa Pemerintah juga dalam hal ini Bapak Menteri, untuk bisa mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 kaitan dengan perlindungan serta jaminan dan pemberdayaan petani. Mengingat sekarang ini produksi pangan kita yang harus kita genjot. Saya sangat mendukung sekali realokasi serta *refocusing* ini diprioritaskan untuk perlindungan petani.

Terima kasih Bapak Ketua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya Bapak Made Urip dari Bali.

Silakan Bapak Made.

**F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Ketua yang saya hormati dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang saya banggakan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam sejahtera buat kita semua,  
*Om swasti astu.*

Bapak Menteri yang saya hormati dan seluruh jajaran Eselon I.

Kondisi yang kita hadapi pada saat sekarang ini terutama berkaitan dengan masalah wabah *COVID-19* ini akan memukul perekonomian kita dan tidak luput juga sector pertanian akan mengalami sesuatu yang luar biasa terutama yaitu dari sisi produksi. Nah, maka itu saya menyampaikan beberapa usulan kepada Bapak Menteri, tentang realokasi anggaran untuk APBN 2020 karena kita menghadapi kondisi yang *force mayor* seperti ini perlu diambil langkah-langkah dan kebijakan yang realitis dilapangan. Pertama, usulan saya adalah Pak Menteri harus punya program yang disebut dengan diversifikasi pangan. Jadi di daerah-daerah banyak sekali pangan-pangan lokal yang perlu dihidupkan kembali, misalnya di NTT jagung, misalnya sagu untuk Papua, Maluku misalnya, perlu itu dibangkitkan kembali pangan-pangan lokal kita. Padahal pangan lokal kita itu punya kualitas dan produksi yang

cukup bagus. Nah, dalam kondisi seperti ini perlu dihidupkan kembali untuk memperkuat ketahanan pangan kita secara nasional. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, karena badai wabah ini begitu menghantam dan banyak orang akan kehilangan pekerjaan, maka itu program yang berkaitan dengan masalah padat karya ini perlu dihidupkan terutama perbaikan infrastruktur pertanian, apakah itu dari jalan usaha tani, jalan produksi, perbaikan jaringan irigasi, ini melibatkan masyarakat dan diberikan upah, sehingga masyarakat punya pekerjaan untuk itu.

Yang ketiga, ketahanan pangan di keluarga itu harus betul-betul dikuatkan terutama bagaimana KWT-KWT kita, kelompok wanita tani kita itu diberikan insentif upaya betul-betul dia produktif dilapangan. Misalnya bagaimana memanfaatkan perkarangan, bagaimana memanfaatkan telajakan-telajakan misalnya, supaya betul-betul produktif. Terutama Ibu-ibu rumah tangga ini, maka itu ketahanan pangan keluarga itu akan bagus ini akan bisa memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan kita.

Terus yang keempat, ini untuk Dirjen Peternakan barangkali kelompok-kelompok peternakan yang ada di masyarakat itu terutama milik rakyat ini perlu dihidupkan kembali, demikian juga ternak-ternak lokal itu perlu dihidupkan kembali untuk memperkuat ketahanan pangan kita, terutama dari sisi penyediaan daging misalnya.

Nah, yang kelima saya setuju regenerasi petani ini perlu diberikan perhatian serius, karena rata-rata para petani kita sekarang inikan umurnya sudah tua-tua. Ini dibutuhkan yaitu tenaga-tenaga muda yang handal untuk terjun ke lapangan.

Pak Menteri yang saya hormati.

Saya Dapil Bali dari PDI Perjuangan, Bali itu sekarang ini menghadapi kondisi yang luar biasa. Terpukul oleh wabah ini, terutama pada sektor pariwisata, hotel dan restoran, kemudian juga yang lain-lainnya itu tingkat hunian hotel di Bali sekarang zero, nol Pak Menteri. Jadi orang akan kembali ke pertanian sekarang ini. Barangkali ini perlu diberikan semacam pelatihan, kemudian insentif, penguatan modal misalnya dari kementerian untuk supaya mereka punya pekerjaan ini.

Nah, yang keenam kartu tani ini Pak Menteri, perlu dikejar terus kartu tani ini dalam rangka untuk penguatan bagaimana petani kita itu dengan mudah untuk mendapatkan subsidi yang berupa pupuk ini.

Dan yang terakhir, tantangan yang cukup besar yang kita hadapi di sector pertanian ini adalah masala konservasi lahan. Lahan-lahan produktif kita hampir di semua daerah itu mengalami degradasi karena alih fungsi lahan untuk kepentingan diluar pertanian. Maka itu, Bapak Menteri harus menjaga betul memberikan perlindungan proteksi terhadap lahan-lahan produktif kita supaya jangan hilang begitu saja untuk kepentingan di luar pertanian ini. Karena kita tidak akan bisa menggantikan lahan-lahan nomor satu, lahan-

lahan produktif ini di tempat itu, tidak bisa. Barangkali untuk membuka lahan baru bisa, misalnya di Papua, Sumatera, Kalimantan bisa, tetapi untuk di Jawa, Bali itu nonsense Pak Menteri.

Jadi barangkali itu usulan saya Pak Menteri, jadi ada sekitar 7 point dalam rangka untuk melakukan realokasi anggaran ini, supaya betul-betul realistis dan kena pada saat sekarang ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ketua sehat selalu dan semua Anggota sehat selalu, demikian juga Bapak Menteri dalam rangka mengemban tugas-tugas kenegaraan ini betul-betul sehat. Disinilah wabah ini memberikan ujian kepada bangsa dan negara kita. Mana pemimpin yang betul-betul negarawan, mana pemimpin yang hanya koar-koar saja tetapi tidak bekerja, mana yang pemimpin yang tugasnya hanya mengkritik saja tetapi tidak melakukan apa-apa, ini akan kelihatan diuji oleh wabah ini.

Terima kasih Pak Ketua.

Dan itu yang ingin saya sampaikan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Made yang tiap hari liburan karena Bali itu singkatannya banyak libur Pak Made.

Selanjutnya Pak Ichsan Firdaus.

Silakan Bapak Ichsan.

#### **F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Terima kasih Bapak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Menteri, pejabat Eselon I di Kementerian Pertanian,  
Bapak Ketua.

Pertama, saya harus memuji Bapak Ketua ini karena saya tiap saat rapat ini hanya Bapak Ketua saja yang memimpin rapat ini, ini luar biasa Bapak Ketua ini. Bapak Menteri harus kasih apresiasi sama Bapak Ketua ini, tiap hari, tiap saat dia ada di DPR RI. Yang kita khawatir juga ada COVID disitu.

Bapak Menteri yang saya hormati.

Saya tadi menyimak dengan seksama teman-teman, saya juga setuju dengan teman-teman di Komisi IV DPR RI terkait dengan memperhatikan produktifitas pangan ini. Nah, tadi tema-teman juga mengkhawatirkan dan juga Bapak Menteri sudah menyampaikan terkait dengan kondisi perunggasan kita, ayam yang harganya jatuh. Saya justru menyoroti pada

kondisi harga pakannya Pak Menteri. Kalau kemudian harga ayam dan harga telur jatuh tetapi pakannya juga kemudian naik tinggi, ini menjadi masalah dan hal itu terjadi karena di mata saya terutama pakan inikan berasal dari jagung. Kalau kita lihat alokasi anggaran 2020 itukan terjadi penurunan bantuan benih jagung hibrida kepada petani dari 3 juta hektar menjadi 2 juta hektar. Berarti ada sekitar 66% hanya mampu diproduksi padahal tahun-tahun sebelumnya kita mengalami yang namanya dalam tanda kutib swasembada jagung. Nah, kalau itu terjadi 66% penurunan sekitar 34% maka kemudian bisa dipastikan bahwa produktifitas jagung kita akan menurun di tahun 2020 apalagi kondisi COVID seperti ini.

Nah, makanya kemudian saya minta kepada Bapak Menteri memperhatikan betul bagaimana distribusi dan kualitas dari benih jagung hibrida kita Pak Menteri, karena bagaimana pun kalau kualitasnya juga menurun maka selain karena alokasi anggaran juga menurun maka kemudian bisa dipastikan produksi kita juga akan menurun. Saya melihat dan saya mendengar bahwa ada para petani jagung akan menolak benih-benih yang akan dibagikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian karena kualitasnya tidak memenuhi keinginan petani. Saya juga mendengar tadi Bapak Rudi juga sudah menyampaikan terkait dengan CPCL Pak. Ada ini yang perlu dicek betul oleh Bapak Menteri kepada pejabat di bawah Bapak Menteri, terutama Dirjen yang menangani masalah benih jagung ini. CPCL ini apa yang diberikan kepada petani itu tidak sesuai dengan CPCL yang diminta, jadi bukan sifatnya buttom up tapi top down.

Nah, ini mengancam produktifitas jagung kita secara nasional. Kalau kemudian kualitas jagung kita juga menurun, lalu subsidi juga menurun maka bisa dipastikan bahwa harga jagung akan naik. Maka satu-satunya pilihan adalah impor dan kalau impor itu menjadi persoalan baru seperti Bapak Daniel Johan bilang tadi negara-negara produsen pun juga akan mengunci produksi-produksi jagungnya, sehingga kemudian ancaman tertinggi adalah kualitas ancaman paling nyata adalah peternak ayam akan mengalami persoalan baru. Produksinya kemudian harganya jatuh, tapi harga pakannya naik.

Saya minta dengan sangat dan mendesak kepada Bapak Menteri untuk memperhatikan secara khusus kualitas pakan jagung ini. Nah, ini yang kemudian saya melihat Bapak Menteri harus betul-betul memperhatikan posisi benih jagung yang dibagikan kepada para petani jagung hibrida. Itu yang pertama Bapak Menteri, saya minta agar kualitas jagung betul-betul dijaga dan jangan kemudian kemudian kualitas jagung yang tidak layak untuk petani itu dibagikan kepada para petani. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan penanganan pasca produksi di hortikultura. Tadi Mbak Luluk mengatakan bahwa ada cold storage yang menyebar di 34 provinsi. Saya minta Bapak Menteri, terkait dengan produk-produk hortikultura itu betul tidak cold storage kita memadai untuk menjamin kualitas barang atau produksi para petani hortikultura kita. Kalau memang tidak memadai ya kita ganti Pak Menteri, kita realokasi lagi anggaran itu yang ada di Ditjen Hortikultura. Saya setuju dengan beberapa teman-teman bahwa apa yang

dilakukan oleh Kementerian Pertanian hari ini dengan refocusing dan sebagainya kelihatannya kurang focus, kelihatannya kurang mengantisipasi dampak jangka menengah terkait dengan dampak corona ini.

Nah, saya minta betul, saya minta kepada rapat ini untuk setidaknya belum kita bisa menyetujui dulu refocusing ini sambil kemudian kita mengecek secara detail apakah betul refocusing yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian itu betul-betul sesuai dengan target atau mengantisipasi dampak terhadap COVID-19 ini. Saya minta ini Bapak Ketua, di dalam rapat ini saya minta agar pengajuan refocusing ini kita analisis lebih dalam lagi sebelum kita setuju.

Itu saja Bapak Ketua, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Ichsan yang matanya masih sembab baru bangun.

Selanjutnya Bapak Sunarna dari Fraksi PDI Perjuangan, Kapoksi saya yang mulia.

**F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Bapak Ketua,  
Bapak Menteri, para pejabat Eselon I Kementerian Pertanian yang saya hormati dan saya banggakan.

Bapak Menteri yang saya hormati, tentu kami sangat mengapresiasi apa yang telah direncanakan oleh Bapak Menteri ini semoga selalu diberikan jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara khususnya di bidang pertanian.

Bapak Menteri yang saya hormati dan saya banggakan.

Selanjutnya bahwa terkait dengan anggaran refocusing yang dilakukan oleh Bapak Menteri, beberapa telah disampaikan disini banyak padat karya, padat karya tapi dari anggaran 1,8 triliun itu belum menyentuh secara langsung terkait permasalahan sekarang yang ada terkait dengan ayam, pangan khususnya, dari hortikultura ini harganya sangat jatuh. Pak Menteri, apakah tidak ada rencana untuk nantinya berapa sih anggaran yang digunakan dari 1,8 triliun atau mungkin nantinya lebih ini bisa digunakan untuk pembelian langsung terhadap ayam produksi dari petani mandiri, petani yang ada di negara dan bangsa kita. Karena dari 1,8 triliun ini saya lihat yang langsung dalam rangka penanganan COVID ini baru sedikit sekali.

Dan juga terkait mungkin sekarang panen bawang putih dan lainnya ini mau diapakah harganya panen raya, harganya sangat rendah dan ini perlu penanganan cepat dan penanganan langsung tapi secara langsung anggaran refocusing ini belum nyata, hanya baru kisaran rata-rata. Selanjutnya Bapak Menteri, perlu perencanaan jangka pendek ini apa sih, jangka menengahnya apa sih yang actual ini yang harus segera diselesaikan oleh masing-masing Dirjen. Jangan Dirjen yang lain mengurus urusan pangan disini ini dipotong begitu banyak kena refocusing. Sedangkan di Dirjen lain hanya kena sedikit sekali 100 sampai 150 miliar. Nah, apa yang akan kita ambil manfaatnya nantinya, seperti apa tujuan dari Bapak Menteri ini. Tentu tujuan matrik kalkulasinya, tahapannya harus jelas, outputnya seperti apa. Jangan ditanya baying-bayang saja, DPR RI ini hanya akan tentu harapan kami Bapak Ketua, tetap menganalisis lebih dalam terkait dengan anggaran refocusing untuk di Kementerian Pertanian ini. Harus sasarannya jelas, tahapannya juga harus jelas Pak.

Jadi Bapak Ketua, Bapak Menteri, anggaran yang sekian untuk apa Bapak Menteri sampaikan disini yang ketiga adalah Bapak Menteri punya Toko Tani yang digarap oleh Badan Ketahanan Pangan. Kenapa kalau itu dikerjasamakan dengan mungkin Bulog itukan arealnya sudah ada di setiap kabupaten hampir ada. Tentu ini juga sangatlah urgent dan tentu tempatnya sudah ada, luasannya bagus, tempatnya juga maksimal. Saya pikir ini juga dalam rangka menyerap produksi hasil pertanian dari seluruh masyarakat di negara dan bangsa kita tentunya.

Bapak Ketua, Bapak Menteri yang saya hormati dan saya banggakan.

Yang jelas bahwa harapan kami jangan juga kementerian ini malah menganggarkan Rp40 miliar untuk kesehatan pegawai. Nah, sedangkan orang lain saja iuran Pak, ini nyumbang Pak, bantu Pak, baik BUMN, ASN dimana-mana bantu iuran, tapi kenapa ASN Kementerian Pertanian ini malah menganggarkan sekian bukannya malah berusaha ASN dari pertanian ini membantu juga ikut menyumbang dalam rangka penanganan *COVID* khususnya di negara dan bangsa kita.

#### **KETUA RAPAT:**

Cukup Pak Kapoksi, masih ada?

#### **F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):**

Saya hanya ingin kejelasan saja Pak Ketua, bahwa Bapak Menteri menganggarkan untuk pembelian ayam ataupun hasil panen termasuk bawang putih ataupun cabai sehingga masyarakat merasa tenang dan aman.

Mungkin itu Bapak Ketua, Bapak Menteri yang saya hormati yang sangat kami banggakan. Bapak Ketua ku yang hebat, yang disiplin, yang selalu hadir di Komisi IV DPR RI, luar biasa sehat selalu Bapak Ketua.

Sekian dan terima kasih.



*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Ketua, interupsi boleh Ketua.

Saya cuma mengingatkan ini jam 14.00 WIB, Ketua belum makan siang, Bapak Menteri juga belum makan siang. Kalau boleh setelah pertanyaan ini.

**KETUA RAPAT:**

Kalau saya tidak makan siang Pak, saya sudah makan pagi saya.

Jadi jangan baik mengingatkan saya Pak.

Selanjutnya Mbak Alien Mus.

**F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):**

Belum sholat juga masalahnya, Bapak Menteri dan pejabat Eselon I juga belum sholat.

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Kayak orang benar saja.

Selanjutnya Mbak Alien Mus.

Silakan.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Terima kasih.

Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya cintai dan banggakan,  
Bapak Menteri Pertanian beserta jajarannya.

Saya langsung saja Ketua, memang sudah dibahas juga oleh Anggota sebelumnya. Tapi ini juga saya cuma mau mempertegas saja, karena saya juga melihat dari postur refocusing anggaran yang disampaikan kepada kita, untuk Dirjen-Dirjen Eselon I, khususnya saya melihat di halaman 27. Kegiatan dan anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA Tahun 2020.

Yang saya fokuskan disini saya melihat di halaman 27, kita melihat kegiatan dan anggaran Dirjen Sarana dan Prasarana pertanian tahun anggaran 2020 ini banyak yang bisa kita pelajari bersama dan kita bisa melihat banyak sekali kejanggalan khususnya kita bisa lihat di angka nomor 8 tentang dukungan manajemen pusat dan daerah dengan anggaran Rp362, 121 miliar. Ini seperti apa, belum lagi di kegiatan yang lain di unit pengolahan pupuk organik yang sudah tadi disinggung beberapa Anggota, terus juga di optimalisasi pemanfaatan pupuk organik juga sempat disinggung oleh beberapa Anggota.

Saya langsung saja bahwa di halaman 28, Badan Litbang seharusnya anggaran disini bisa direalokasikan mengingat Litbang juga harus mengevaluasi hasil kinerja penekanan disini selama ini dari 100% berapa persen yang teraplikasi dana terealisasi dengan para petani kita.

Dan point 9, juga menjadi pertanyaan saya kita tidak tabu dengan teknologi hanya tolong diperjelaskan mendukung program strategi Kementan, apa saja program tersebut yang teraplikasi dengan *social safety net* pada hari ini dan pada situasi saat ini.

Kemudian di halaman 29 point 7, 8 dan 9 asumsi saya itu bentuk event pameran atau exhibition apakah masih mungkin kita lakukan dalam situasi seperti ini. Terus pada angka romawi IV di halaman 29 point 2, apakah Mentan memahami instruksi Presiden untuk memotong 50% terkait manajemen yang tidak mungkin dilakukan hari ini. Perencanaan yang seperti apa dan yang mana, pelayanan public seperti apa dan beberapa hal lagi yang perlu kita ketahui. Saya minta ini agar bisa direalokasi dan saya yakin dan saya tahu sendiri, Bapak Menteri juga harus melihat semua yang sudah diberikan kepada kami apakah ini betul-betul sesuai atautkah masih bisa direalokasi atau difocusing lagi.

Terus saya berharap sebelum semua yang disampaikan kepada kami data-data, mungkin sebaiknya Komisi IV DPR RI bisa rapat terlebih dahulu bersama dengan Dirjen Eselon I itu lebih baik, agar kita bisa mengetahui betul-betul focus Mentan ini bisa touch down langsung kepada para petani yang lebih menyentuh dan bisa dilakukan oleh petani yang merupakan tulang punggung atau pahlawan pangan nasional dan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Itu saja yang bisa saya sampaikan.

Saya harapkan Ketua, kita bisa difocusing karena ini memang masih banyak hal-hal yang belum bisa kita jadikan sebagai acuan untuk direalokasi anggaran dari Kementan.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Mbak Alien.

Selanjutnya yang terakhir....

**F-GERINDRA (Dr. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):**

Usul break dulu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Kenapa Pak?

**F-GERINDRA (Dr. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):**

Usul break dulu, sudah 15.30 WIB di Makassar Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak, ini Mbak Kiki terakhir, setelah itu di-break nanti mau mulai lagi jam berapa, karena di sini yang memimpin Cuma saya sendirian. Aturannya yang dibuat adalah tidak boleh dari 3 jam.

Silakan Mbak Kiki.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Oke, saya mohon maaf rekan-rekan, singkat saja.

Bapak Menteri beserta jajaran.

Saya dari minggu lalu mempelajari paparan Bapak beserta para Dirjen. Andaikan saya dikasih kesempatan di awal saya akan memberi saran, Komisi IV DPR RI yang memberi penjelasan atau Kementan yang memberi penjelasan. Karena halaman per halaman itu tidak mendukung program social safety net terkait petani hari ini. Dan kami Komisi IV DPR RI cukup prihatin akan hal itu. Saya mohon maaf, saya tidak bisa basa-basi, kami semua duduk disini sebagai wakil rakyat. Dan apa yang terjadi hari ini dengan situasi COVID ini, ini benar-benar situasi yang sangat menggugah kemanusiaan kita semua. Kenapa? Eksedus besar-besaran dari kota ke desa apabila tidak di maintenance dengan baik ini akan menciptakan permasalahan yang *booming* nanti kedepannya. Karena apa? Saya berharap Kementan program-programnya itu dipersiapkan tadi Bapak Hermanto menyebutkan *emergency sort, medium* dan *long term strategy* terkait pangan di Indonesia.

Saya beberapa kali membaca berita terkait dengan masalah pangan ini bahkan bukan ditugaskan di Kementan. Saya bertanya-tanya juga gitu loh,

ada apa, kan begitu. Dan terkait data-data ini seperti arahan Presiden juga bahwanya alokasi sebesar 50% yang harus dipangkas terkait kumpul, rapat, perjalanan luar negeri ini sepertinya belum dimaksimalkan. Dan apabila Bapak memperhatikan secara halaman per halaman, halaman 26 buat saya aneh Pak. Halaman 26 point 18, volume semula dan anggaran semula menjadi volume dan anggaran itu kontra produktif. Coba Bapak baca baik-baik itu baru satu hal. Dan saya tidak ingin mengdeskreditkan pihak mana pun kita sama-sama berpikir disini. Saya meminta juga rapat hari ini tidak memutus sesuatu apapun terkait realokasi dan *refocusing* ini akan tetapi saya mendesak agar dilakuakn revisi kembali terhadap point-point ini.

Dan realokasi ini diharapkan langsung terkait dengan program *social safety net*. Jadi dari Dirjen-Dirjen yang non teknis itu tolong diarahkan ke Dirjen-Dirjen yang teknis yang terkait dengan program padat karya. Saya mohon itu Pak, karena apa? Bapak bicara merah putih, kami di Komisi IV DPR RI juga bicara merah putih. Jadi mohon kepada Kementerian Pertanian beserta Dirjen-Dirjen untuk memikirkan.

Dan ada satu lagi Pak, ada yang ketinggalan bahwa dari kondisi hari ini sebelum terjadi COVID itu petani karet itu sudah terdampak efek harga karet. Jadi solusinya seperti apa terhadap para petani karet yang ada hari ini. Sebelum COVID saja mereka sudah hancur-hancuran, apalagi sekarang. Kenapa? Karena trading tidak jalan untuk karet Pak. Daerah terdekat pun tidak bisa menerima. Jadi saya mohon atensinya, saya harap kita semua berkomitmen bahwa kita harus memperbaiki semua, karena apa? Saya yakin pemotongan yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini akibat gagalnya kita menjelaskan kepada Bapak Presiden bahwa petani, nelayan dan lain-lain terkait kehidupan masyarakat Indonesia ini.

Sekian dari saya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Yang terakhir sebelum kita break Ibu Maria dari Fraksi PDI Perjuangan. Silakan Ibu.

**F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Merdeka!!!

Selamat siang.

Pimpinan rapat dan Wakil Ketua, Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Menteri Pertanian beserta jajaran yang kami hormati.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih saya sudah diberikan kesempatan. Saya ingin perkenalkan diri dulu, saya Maria Lestari dari Fraksi PDI Perjuangan A-241. Pertama-tama, saya memperhatikan strategi Kementerian Pertanian menghadapi dampak *COVID-19*. Pada halaman 4, pada hari ini kami sangat mendukung strategi tersebut, yaitu mendorong dan mempercepat program bantuan sarana produksi pertanian khususnya melalui kegiatan padat karya. Serta mendorong kelancaran distribusi bahan pangan pokok. Kami berharap dan mengingatkan agar strategi tersebut bisa segera dikoordinasikan dengan stake holder dan semua pemangku kepentingan agar bisa terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran.

Yang kedua, dalam hal mendorong produktifitas pertanian di Kalbar dengan situasi wabah *COVID-19* ini. Tentu selain dengan mempercepat distribusi bantuan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan, maka Pemerintah juga perlu memperhatikan persoalan-persoalan pertanian. Persoalan pertanian tersebut tidak hanya terjadi pada lahan persawahan melainkan pada lahan kehutanan dan rempah-rempah, ketahanan pangan, permodalan serta penguatan kelompok tani. Persoalan pertama adalah persoalan permodalan karena banyak masyarakat yang mengalami kerugian dan bahkan tidak bisa melanjutkan usaha mereka. Sehingga penting kiranya hal itu untuk diperhatikan. Oleh karena itu, perlu ada skala prioritas penggunaan anggaran dalam hal untuk memberdayakan para petani di daerah untuk bisa mengatasi persoalan tersebut.

Keberadaan program pertanian ini memihak kepada masyarakat kecil adalah sebuah keniscayaan, maka dari itu perlu adanya skala prioritas serta langkah yang diambil oleh Pemerintah. Nah, penting kiranya juga disampaikan kepada Pemerintah, sedikit informasi bahwa Kalimantan Barat komoditasnya utama pencariannya pertanian. Dengan adanya wabah *COVID-19* menyebabkan masyarakat tidak bisa beraktifitas dan berdampak pula terhadap stabilitas harga pangan yang melonjak naik. Oleh sebab itu, untuk mendukung stabilitas pangan tentunya adanya kerja sama dari berbagai *stake holder* sangat dibutuhkan.

Kendala yang terakhir adalah .... Pertanian dari Kementerian yang belum sampai kepada petani, sementara petani yang sudah musim tanam gandum, yaitu jenis padi untuk musim kemarau.

Mungkin itu saja Ketua, Pimpinan saya ucapkan terima kasih.

Merdeka!!!

Selamat siang.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Mbak Maria.

Sebelum kita break dulu, karena mungkin di Kementerian belum ada yang makan siang, belum sholat, jadi mungkin kita break dulu nanti jam 15.00 WIB kita mulai kembali. Dan saudara Menteri sekedar info saja, Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dipotong kembali anggarannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dipotong kembali. Dan infonya Kementerian Pertanian dipotong kurang lebih hampir Rp7,1 triliun keseluruhannya.

Ini yang membingungkan saya, seharusnya dalam keadaan darurat begini, dalam keadaan bencana begini penguatan pangan itu adalah hal yang paling penting. Tetapi saya tidak mengerti kenapa bisa begini, nanti kita lanjutkan setelah Ishoma jam 15.00 WIB kita mulai kembali.

Terima kasih.

**(RAPAT DISKORS)**

**(SKORS DICABUT PUKUL 13.00 WIB)**

Pak Menteri, perihal masalah ada pemotongan anggaran sudah dapat info belum?

**MENTERI PERTANIAN (Dr. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):**

Maka dari itulah saya tidak yakin sebenarnya tapi setelah Ketua bilang begitu berarti itu terjadi. Boleh saya jawab dulu.

**KETUA RAPAT:**

Ya, sebentar.

Jadi kalau kita lihat disini Bapak Menteri, banyak kegiatan yang tidak jelas. Contohnya, di Dirjen PSP dukungan manajemen pusat dan daerah senilai Rp254 miliar, inikan sangat fantastis. Kemudian ada lagi di Dirjen Peternakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk, yang semula volumenya 29.800 nilainya Rp18,924 miliar. Begitu menurun volumenya menjadi 28.000 malah anggarannya naik 21,347,373. Jadi kalau saya lihat ini Pak Menteri, Eselon I ini membuat anggaran ini seolah-olah seperti *copy paste* saja. Dan saya yakin juga Sekjen tidak mengamati apa yang menjadi bahan hari ini. coba kita perhatikan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan itu.

Jadi demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Menteri Pertanian untuk menyampaikan jawabannya.

Silakan Bapak Menteri.

**MENTERI PERTANIAN:**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan dan kami cintai.

Terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa-pa yang menjadi tanggapan kami dari berbagai masukan, koreksi dan berbagai tanggapan yang telah disampaikan oleh seluruh Anggota Komisi IV DPR RI beberapa saat yang lalu.

Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI,  
Para pejabat jajaran Pemerintahan yang saya hormati.

Oleh karena itu, semua catatan ini dan masukan itu akan menjadi catatan yang sangat serius bagi kami. Dan tentu saja mungkin sebentar walau tidak seluruhnya kami bisa jawab pada kesempatan ini, mohon berkenan kami jawab secara tertulis atas apa-apa yang menjadi masukan, koreksi dan saran yang harus kami lakukan.

Bapak Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Sebenarnya kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dari semua tanggapan yang masuk tiada lain adalah pembelaan kepada kami bahwa kondisi yang ada dan kita hadapi sekarang ini dengan pemotongan Rp3,6 triliun adalah tentu saja bagi kami ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan bahkan menekan kami dan seperti itulah kondisi yang ada. Bahkan tadi sebelum break, Bapak Ketua, Pimpinan Komisi IV DPR RI juga menyampaikan ada tambahan pemotongan lagi sampai Rp7 triliun dan ini membuat sebenarnya di kami itu penghitungan yang sangat besar menghadapi kondisi yang ada, baik kondisi *COVID* maupun kondisi yang ada. Kementerian Pertanian harus hadapi dalam rangka ketahanan pangan menyiapkan 267 juta orang yang harus makan.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Ingin saya sampaikan bahwa menghadapi *COVID* dan yang bereskalasi sangat tidak bisa kita prediksi seperti apa kedalamannya dari kondisi yang kita hadapi itu. Sebenarnya ada dua orientasi yang memang harus dilakukan oleh negara. Yang pertama adalah solusinya tentu saja ini Kementerian Kesehatan dan gugus tugas dan lain-lain yang dihadapi secara bersama. Tapi solusi yang kedua adalah bagaimana makannya rakyat. Sedangkan apapun krisis yang ada kalau makanan rakyat masih tersedia maka tentu saja daya tahan kita untuk menghadapi tantangan ini terjadi dan itu ada di kami. Berulang-ulang kami menyampaikan itu.

Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI.

Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa hormat bahwa kita memang sama-sama mendapatkan suatu tantangan-tantangan baru menghadapi. Bapak Pimpinan, oleh karena itu memang kami membuat 3 agenda. Dan agenda yang pertama adalah dalam keadaan darurat, darurat itu menghadapi *COVID* yang tidak lain kami harus persiapkan dengan baik dan

benar apa yang harus terjadi dalam realisasi-realisis pangan ini harus dilakukan. Dan seperti itu sehingga saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa masukan terhadap kondisi yang ada adalah kesiapan panen kita, kesiapan panen yang ada di seluruh Indonesia. Dan seperti apa daya beli masyarakat yang harus dipertahankan, sehingga panen ini betul-betul serapannya bisa terjadi.

Saya kira banyak tadi yang sudah menyampaikan harga dimana-mana terjadi harga yang tidak normal. Tapi ingin saya sampaikan bahwa sampai hari ini dari catatan yang ada, validasi data yang kami miliki dalam satu minggu 3 kali ada meeting dengan daerah tidak kurang dari 300 kabupaten kota yang selalu saja ikut dalam zoom meeting yang dilakukan langsung oleh saya, didampingi oleh Kasad kemarin, oleh para Dirjen untuk memvalidasi data, *Alhamdulillah* kondisinya cukup kita yakinkan. Sebentar akan saya tayangkan slide nomor 13 itu.

Tetapi ingin saya sampaikan bahwa semua harga yang disampaikan tadi hanya beberapa provinsi saja dari 53 kabupaten atau 580 lebih, hanya tidak cukup 15% atau 18% saja yang bersoal dalam yang pembelian dibawah harga Rp4200. Banten itu ada 3, Yogya ada 4, Jambi hanya 2, Jawa Barat hanya 1, Jawa Tengah ada 7, Jawa Timur ada 7, Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, 70% masih di atas harga Rp4200. Itu data yang valid bahkan data ini kemudian diperkuat dengan laporan seluruh panglima di 34 Kodam yang ada. Dari seluruh Panglima memperkuat data yang kami miliki. Oleh karena itu, validasi data tidak hanya dari Mentan kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat untuk mencoba memvalidasi.

Sedikit saya sampaikan bagaimana neraca yang kita miliki, program itu masih 3,5 juta perkiraan kita punya produksi Februari ke Mei ada 11 juta ton. Oleh karena itu, perkiraan kebutuhan yang ada selama 3 bulan Februari ke Mei itu 7,6 sehingga kita masih dapat stock 7,7 juta lebih. Itulah neraca kita yang setiap hari kita validasi yang ada. Hampir-hampir seluruh wilayah yang 7,46 juta hektar itu hampir semua dalam posisi siap panen mulai dari akhir Maret, April sampai dengan Mei. Dan kira-kira seperti itulah gambaran secara umum.

Oleh karena itu, ini menjadi beban bagi kita bahwa ada kurang lebih 7 juta ton atau kurang lebih 11 juta ton, katakanlah 8 juta ton karena kita potong segala macam yang sudah ada di masyarakat sudah ditampung oleh penggilingan, sudah ditampung oleh pedagang dan lain-lain sebagainya masih ada kurang lebih 8 juta ton yang harus siap kita beli. Dan 8 juta ton itu nilainya tumbuh sekarang di atas Rp20-30 triliun yang ada.

Saya masuk dulu kepada stock akhir Mei, stock akhir Mei itu kita perkirakan masih ada 7,7 juta ton ini terus kita validasi. Kemudian perkiraan produksi Agustus masih ada 7,9 juta ton. Dan perkiraan kebutuhan kita 7,4 juta ton. Stock akhir ada 8 juta di Agustus kita masih memperkirakan dalam neraca yang ada 8,2 juta ton Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota. Oleh karena itu, ini juga harus terus kita tunjang dengan kemampuan keuangan yang ada.



**MENTERI PERTANIAN:**

Boleh lanjut, Pimpinan boleh lanjut.

**KETUA RAPAT:**

Iya, lanjut.

**MENTERI PERTANIAN:**

Pimpinan Komisi IV DPR RI.

**KETUA RAPAT:**

Iya, lanjut Bapak Menteri, lanjut.

**MENTERI PERTANIAN:**

Sampai dengan neraca dulu, oleh karena itu stock akhir kita ada 8 juta lebih. Kalau semua berjalan normal perkiraan produksi di tanam kemarau itu ada 6,5 juta. Oleh karena itu, perkiraan kebutuhan total adalah 9,9 katakanlah 10 juta, maka kita masih punya stock akhir Desember 4,7. Semua ini kalau lahan yang ada sekarang ini masih berjalan seperti secara normatif yang ada. Karena semua yang kita perkirakan ini validasinya sudah sampai ke daerah Bapak Ketua. Hanya saja memang kita akan segera menghadapi kemarau, kemarau yang ada itulah yang harus menjadiantisipasi kita.

Ini masuk dalam berbagai perencanaan yang akan kita lakukan Bapak Ketua. Oleh karena itu, dalam program agenda darurat itu adalah bagaimana antara ketersediaan yang ada dan daya serap untuk membelinya. Jujur ingin saya katakan apakah Kementan hanya .... Bulog. Begini, Bulog itu bukan di bawah Kementan, Bulog itu di bawah BUMN. Sementara dia masih punya stock yang ada sekarang ini hampir kurang lebih 1,5 juta. Oleh karena itu, tentu daya serap akan bersoal. Oleh karena itu, kita menggulirkan menggunakan penggilingan-penggilingan yang kita kendalikan. Penggilingan-penggilingan yang kita kendalikan itu yang kita mintakan KUR secara khusus satu penggilingan kurang lebih antara Rp400-500 miliar untuk bisa menyerap padi-padi kita. Itu masuk dalam program darurat kita, dari mana uangnya? Dari KUR dan ini sudah setengah disetujui oleh BRI untuk kita gulirkan.

Oleh karena itu, daya serap itu akan bermain pada kurang lebih hampir 1.600 lebih penggilingan yang dalam istilah kita dikomandani oleh kita untuk membeli, kurang lebih seperti itu dengan bunga tetap 6%. Dan mereka sudah setuju untuk itu, sehingga daya serap kita bisa kita perkuat tapi kita mengharapkan Bulog yang ada. Sebenarnya Bulog sudah datang kepada kami juga setelah terus kita mengatakan ini akan wilayah ini yang akan panen, segera serap ini. Mereka datang sama kita sebenarnya mereka juga bersoal dengan pendanaan yang ada dengan bunga komersial yang harus dilakukan.

Oleh karena itu, kami dalam proses pembicaraan dengan Kementerian Keuangan bolehkah atas nama Kementerian Pertanian, mendorong agar Bulog mengambil dengan alokasi KUR yang kita miliki. Dan itu sementara berproses Ketua. Demikian tentang agenda yang paling penting bagi kita.

Jagung halnya sama walaupun penugasan khusus sudah diberikan kepada Bulog dan Bulog tentu bisa menyerap jagung-jagung kita. Tetapi kita sangat khawatir dengan kemampuan keuangan yang mereka miliki. Kami terus berusaha bahwa dalam kondisi apapun, bagaimana mempertahankan harga gabah maupun beras yang ada. Dan kami berjuang melalui Ratas lapor langsung kepada Bapak Presiden. Oleh karena itu, kita mencoba untuk menyanggah agar nilai tukar petani di dalam rangka COVID dan lain-lain ini tetap bisa kita sanggah dengan harga yang ada Rp4.200 dan kita berharap seperti itu.

Dari pendekatan yang ada di 500 lebih, ada datanya disini Ketua, itulah yang saya sebut bahwa yang membeli di bawah Rp4.200 itu hanya kurang lebih 17%. 17% itu tapi tidak ada yang membeli di bawah Rp3.500 tidak ada, tetapi kurang lebih Rp4.000, tidak ada yang membeli Rp2.000 misalnya. Kalau ada satu yang seperti ini Pak, kita akan coba dimana daerahnya, kabupatennya apa, kecamatannya apa, apalagi yang kelompokkan ini, kita coba dekati itu karena pembicaraan-pembicaraan kita adalah tetap harus menyanggah ini.

Yang kedua, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI. Yang kedua adalah kita yang sangat terhadap ayam yang jatuh harganya itu. Kalau ayam ini memang sudah jatuh, oleh karena itu kita sudah ada pembicaraan. Satu-satunya yang kita minta kalau ayam ini sudah dibeli oleh integrator, ini sedikit kita paksakan dimana mau disimpan. Oleh karena itu, harus disimpan pada *cold storage*, *cold storage*-nya itu kita yang mempersiapkan. Oleh karena itu, yang dibeli oleh integrator kita kendalikan kemudian kita pikirkan bagaimana menyalurkannya. Bahkan kita berharap dari katakanlah *stock* yang kita miliki dari ayam-ayam yang dibeli khususnya kepada peternak ayam itu bisa dikirimkan kepada produsen-produsen industry turunan dari ayam seperti bakso ayam, nugget dan lain-lain sebagainya untuk bisa menjadi serapan.

Saya kira strategi-strategi itu yang kita coba dorong Bapak Ketua, saya berharap COVID-19 ini berbagai langkah tetap kita lakukan. Ada beberapa hal menyangkut anggaran yang mendapat koreksi dan lain-lain sepertinya dari Anggota DPR RI Komisi IV DPR RI, saya kira nanti akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat secara teknis dengan Eselon I yang terkait Pak, yang mana lagi. Tetapi saya ingin lapor Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, kalau kita namakan disitu *social safety net* dalam rangka COVID sebenarnya membungkus program-program agar tidak ditarik Pak. Karena kalau atas nama *social safety net* itu kemungkinan akan ditarik, *social safety net* bentuknya yang kita maksud adalah pembelian saprodi, saprodi isinya adalah bibit, pupuk dan obat-obatan. Inilah yang kita bungkus dan tetap kita serahkan kepada mereka. Karena *social safety net* yang kita lakukan

Rp400 miliar lebih itu adalah sebenarnya membagi-bagi bibit untuk mereka tanam termasuk di dalamnya adalah farming.

Jadi mereka yang nganggur di rumah dikasih bibit-bibit, agar rumah tangga yang ada agar tetap bisa beraktifitas. Dan ini juga mulanya adalah masuk ketahanan pangan yang ada.

Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya banggakan.

Saya ingin sampaikan Ketua, sebenarnya saya bersurat resmi kepada Bapak Presiden 2 kali, satu meminta tambahan dana Rp6,381 triliun yang satunya adalah kurang lebih Rp2,5 triliun. Ada dua surat saya, saya akan secara tertutup akan saya sampaikan kepada Pimpinan Komisi IV DPR RI, bahwa judulnya permohonan stimulus harga gabah dan ayam akibat dampak COVID-19. Saya akan kirimkan kepada Ketua ini, walaupun untuk terbatas.

Yang kedua ada surat kami untuk judulnya usul pembiayaan program padat karya tunai. Padat karya tunai ini juga Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, namanya padat karya tetapi bukan fisik. Padat karya kita kasih saprodi, kita kasih bibit, kita kasih alsintan, yang secukupnya agar mereka tetap tanam.

Jadi bukan padat karya gayanya PUPR, walaupun kita juga ada irigasi, ada *cold storage*, ada tersier, ada jalan tani yang masuk dalam padat karya yang tercantum hanya refocusing itu Pak. Tetapi yang kita minta disini kurang lebih jumlahnya Rp6,3 triliun adalah padat karya uang memperkuat ketahanan pangan yang ada. Ini juga sekaligus sebenarnya kayak sembako yang dibagi kepada kelompok tani yang ada atau Anggota petani yang ada. Ini terkait sembako, tapi sembakonya itu untuk dia tanam kembali, kita tunggu, kita ikuti bahkan untuk mereka bisa selesai dalam 3 bulan dan 100 hari itu kemudian dia mendapatkan ketahanan pangan yang ada.

Itu agenda-agenda dari yang ada sebenarnya yang terkait dengan agenda COVID dan agenda yang bersifat darurat yang ada. Banyak sekali turunannya Bapak Ketua, nanti kita bicarakan. Secara teknis kita pun dikoreksi oleh Komisi IV DPR RI, mari kita lihat dan kami tetap yakin bahwa yang paling penting yang sekarang lagi usaha keras kita adalah bagaimana kurang lebih Rp20-30 triliun bisa mengalir ke bawah agar pembelian gabah kita tidak turun dari Rp4200. Dan saya sudah lapor kepada Bapak Presiden dalam 2 Ratas. Bahwa kalau mau menyanggah kepentingan petani agar selamat petani itu bisa dipertahankan adalah ada pembelian di bawah ini. Kami kemudian bicara dengan Bulog dan kesiapan Bulog dengan pendanaan soal menurut saya mungkin saya salah, karena ini bukan domain saya. Tapi kami lagi berusaha secara maksimal untuk membeli.

Untuk menstimulan agar ini tidak turun, maka salah satu yang harus disanggah adalah kurang lebih 20% dari itu. 20% itu kami perkirakan sekitar Rp1,5 triliun untuk menyanggah ini. Dan ini sementara berproses dalam pembicaraan dengan Bapak Erlangga, Menko Ekuin bersama Bapak Luhut untuk melakukan ini. Ini usaha-usaha yang sangat kuat.

Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI.

Suara Komisi IV DPR RI saya berbicara agak lebih kencang lagi, agar Insya Allah seperti yang sudah-sudah saya kerja bersama teman-teman, saya siap dikoreksi, silakan turun sama-sama, dimana tempatnya dan kita akan sama-sama melihat.

Banyak sekali laporan harga jagung disini jatuh, setelah kami kontrol kebawah ternyata tidak. Ada pembelian 2.500 tapi pembelian yang tingkat kadar kebiasaannya masih 35% baru dipanen, itukan harus dikeringkan. Kalau dia dikeringkan dibawah 15% maka semua integrator kita mengatakan siap membeli di atas Rp3.700 sampai Rp3.900 di Jawa bahkan Rp4.000.

Jadi tolong sabar karena memang ada kelihatannya ada kepanikan-kepanikan sedikit yang ada, baik oleh petani-petani kita. Kemarin ada dua hari lalu di satu kabupaten ada lembaga satu yang menyampaikan bahwa mereka jatuh sekali harganya setelah dicek dia terikat oleh tengkulak yang membiayai pertanamannya. Jadi ada *chase-chase* seperti itu Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota, tetapi kami siap untuk terus menyanggah dengan kemampuan-kemampuan yang ada.

Pimpinan dan segenap Anggota yang kami hormati.

Kami mau masuk di dua hal lagi, yang pertama menghadapi kekeringan sesuai dengan warning yang ada, terutama di beberapa negara Asia yang sekarang bersoal khususnya Vietnam dan Thailand, kemungkinan kekeringan itu masuk. Oleh karena itu, salah satu dan kemudian diperkuat dengan warning oleh MAO bahwa sesudah pandemic COVID yang ada akan hadir lagi krisis pangan dunia.

Oleh karena itu, kami merencanakan dalam agenda temporary sampai agenda permanen adalah memperluas esensifikasi penanaman selain yang eksisting 7,46 tentang itu kita masuk pada lahan rawa yang 400 ribu hektar, kemudian ditambah dengan 200 ribu lahan-lahan esensi, sehingga mampu kita terapkan masuk ke dalam.

Oleh karena itu, dengan harapan 600 ribu yang baru yang kita tanam dalam 100 hari atau 4 bulan yang ada itu kita bisa mendapatkan kurang lebih 5 juta ton gabah. Dengan demikian kita bisa mendapatkan antara 1,5 juta ton beras yang ada. Inilah menjadi bagian-bagian yang harus kita jaga, karena yang paling kita khawatirkan adalah pertanaman nanti pada sesudah Oktober, September, sampai Desember untuk kita jaga sampai Januari lanjut dengan pada penanaman normal seperti yang ada. Saya kira itu menjadi dua hal yang menjadi penting bagi kita.

Yang terakhir, sebagai pengantar ini Bapak Pimpinan, focus kepada social safety net itu menjadi strategi Bapak Pimpinan, silakan dikoreksi. Nanti teman-teman dari Eselon I mohon kita bicarakan sama-sama Ketua seperti apa. Ketahanan pangan menjadi pilihan-pilihan memang, Cuma ada sisipan-sisipan di dalam rangka kita mencoba mengatur strategi penganggaran agar

tidak terpotong di Kementerian Keuangan. Kemudian anggaran perjalanan dinas, rasanya sih kami sudah sampai di 50% sesuai dengan instruksi yang ada, tapi mohon dikoreksi saja kalau masih ada hal, kami siap Pak.

Yang ketiga yang perlu mendapatkan perhatian misalnya harga gula dan lain-lain. Saya ingin sampaikan sebenarnya begini, urusan stabilisasi harga bukan Tupoksi kita, sebenarnya Tupoksi yang ada di kementerian lain. Tetapi kalau kami biarkan ini terus terjadi maka harga akan hancur totally di bawah. Karena harga selalu adalah supply and demand. Ini harga itu ada supply dan demand, inikan tidak dalam konteks kita. Tetapi kalau kami biarkan ini intervensi mendekatkan komoditas ini di pasar yang ada harganya memang bisa melambung. Oleh karena itu, dengan kita yakin dengan neraca yang kami miliki itu setelah divalidasi dan lain-lain dan terus akan kita validasi dengan seperti itulah kondisi lapangan yang ada.

Ada 3 yang memang menjadi persoalan karena masih terkontaminasi dengan impor antara lain bawang putih termasuk bawang bombai. Kemudian yang kedua adalah gula dan daging. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa bawang putih sudah mengalir masuk oleh karena itu, memang ketersediaan kita tidak cukup kalau hanya mengandalkan lokal dan sekarang sudah bergulir cukup besar.

Yang kedua adalah khusus untuk daging, daging untuk sampai dengan lebaran Insya Allah mudah-mudahan kita masih bisa anggarkan lokal kita walaupun ini akan terseok-seok karena akan apa? Daging ini sebenarnya penugasan khusus ada di Bulog, tetapi dia ter-*lock* karena yang dari India terjadi lockdown disana. Oleh karena itu, ini menjadi masalah. Kami melalui Ratas kepada Bapak Presiden meminta agar bisa dilakukan relaksasi kepada BUMN yang lain, karena ini tidak dalam pendekatan yang dibawah kendali kita. Oleh karena itu, ditunjuklah Berdikari dengan PPI untuk melakukan itu tidak dari India tetapi dari tempat lain, mudah-mudahan ini juga bisa masuk. Oleh karena itu, sambil menunggu impor memenuhi daging itu sebagai upaya untuk memenuhi pasar secukupnya sesuai kemampuan kita bisa lakukan melalui sapi-sapi yang kita miliki di dalam negeri yang ada. Mudah-mudahan sesuai rencana sampai dengan lebaran masih bisa kita lakukan karena kalau menunggu yang dari Brasil datang itu 40 hari pengapalan dari sana sampai ke Indonesia.

Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa pertahankan seperti ini. Harga ayam sekarang ini sudah mulai membaik walaupun belum pada posisi yang kita harapkan, akan tetapi kita terus melakukan upaya menyanggahnya. Insya Allah mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bisa masuk sesuai dengan yang kita harapkan sehingga harga sampai tidak jatuh. Dan sudah ada perintah Presiden untuk bisa menyanggah ini, saya tinggal mengurus ini. Sambil kita Ratas beberapa Menko kami sampaikan bahwa ada harapan-harapan dari kita semua untuk segera ada pendanaan tapi ini harus diambil oleh BUMN, tetap saja BUMN. Oleh karena itu, karena BUMN kadang-kadang memproses yang banyak integrator ini masing-masing duluan. Makanya kita koreksi sama-sama ini dan kadang-kadang saya berharap kita langsung dilapangan, ke wilayah yang mana yang bersoal kita coba tangani dengan

pendekatan wilayah yang ada. Karena kalau pendekatannya hanya neraca, catatan-catatan masih saja dilapangannya kadang-kadang ada bias. Oleh karena itu, pendekatan sampak memvalidasi lapangan, mempersiapkan lahan, dan kesiapan sudah dilakukan.

Kalau ada anggaran pelatihan dan lain-lain atas nama *COVID*, sebenarnya begini, pelatihan-pelatihan itu terkait langsung dengan bagaimana menyerap komoditi-komoditi yang ada pada UMKM-UMKM atau usaha kecil pertanian yang ada. Jadi itu yang dilatih kemudian didorong untuk ambil UMKM, didorong ambil KUR, dan KUR inilah menjadi pendekatan. Jadi tidak seperti pelatihan yang kemarin, tetap dalam pendekatan untuk bisa mengakselerasi ekonomi pertanian yang ada. Kalau ini masih perlu penambahan pada pendekatan dengan eselon I, dengan Komisi IV DPR RI mungkin ini yang harus diperjelas seperti apa yang ada yang harus ada.

Saya kira itu yang kurang lebih apa yang pengantar ini Bapak Pimpinan, dan saya sangat berharap masih ada Rapat Dengar Pendapat lanjutan dengan Eselon I kami untuk bisa memperjelas secara teknis seperti apa yang ada. Saya masih percaya diri atas dukungan dan tentu pendampingan dari Komisi IV DPR RI untuk memberi akses terus, mengikuti kami terus. Saya masih yakin untuk bisa sampai kepada neraca yang ada, saya belum ragu dari neraca itu kita sudah keluarkan 4%, 4% itu sebenarnya biasanya 2% ini sudah kita angkat sampai 4%-5% sehingga kalau diberikan dari neraca itu tinggal serapan yang harus kita siapkan dan system-sistem perdagangan yang harus kita lakukan. Kalau saya menunggu dari Menteri Perdagangan untuk mengatur stabilisasi harga, harga akan jatuh.

Oleh karena itu, pasar tani itu bukan pasar baru, kita mengenerginya dan pasar tani tidak sampai di sayur. Oleh karena itu, kami kerja sama dengan starup yang sudah sampai ke sayur. Pasar tani hanya 11 komoditi itu Pak, dan itu hanya bisa menstabilisasi antara harga yang ada yang bermain yang bisa menjadi besar. Hal lain bahwa fasilitasi yang kita lakukan kepesertaan ini dari Kementerian itu sampai Gubernur. Fasilitasi sampai ke kabupaten kita harapkan Gubernur yang memfasilitasi ke bawah. Kita mengasistensi, kita memberi *back up-back up* integrator yang mungkin bisa memberikan dukungan, tetapi sepenuhnya ada di Bapak Gubernur 584 kabupaten kota yang ada, jadi 34 provinsi. Sedangkan kami yakin dari 34 provinsi itu sekarang ini bergerak untuk provinsi dan minimal ayam-ayam dan lain-lain, telur, gula harus dilakukan.

Yang terakhir, gula itu melalui kebijakan Bapak Presiden melalui Impres yang ada gula raw sugar itu sudah diindustrikan menjadi gula pasir. Dan sekarang dalam proses yang sangat kuat menjadi 250 ribu ton. Kalau 250 ribu ton ini sampai Mei, sampai dengan Lebaran Insya Allah. Dan gula ini mulai menurun, saya habis dicek dilapangan tadi Aceh masih Rp19.000 padahal disana ada beberapa pabrik gula yang suda mestinya harus kerja. Nah, sekali lagi masalah gula juga tidak di dalam kendali sepenuhnya kita, kalau kenapa agak terlambat gula ini karena musim agak bergeser mundur satu bulan penanaman tebu. Oleh karena itu, industry gula lokal termasuk Jawa Timur ada 7 di Jawa ini panennya bergeser dan penggilingannya

bergeser. Oleh karena itu, kita tidak bisa tunggu dan itu kurang lebih antara 600 ribu ton kita akan tunggu dan tentu dengan gula 250 ribu dari gula *raw sugar* yang sementara berproses dan Insya Allah akan menjangkau Rp12.000,00 Untuk beberapa Anggota DPR RI sudah menyampaikan termasuk Aceh saya akan kontrol. Mungkin dalam 2-3 hari kita sudah bisa lihat seperti apa yang ada.

Intervensi ini mestinya bukan Menteri Pertanian Bapak Pimpinan, tapi kalau kita biarkan ini akan bersoal. Saya berharap Bapak Pimpinan dan Komisi IV DPR RI mari kita turun bersama-sama Pak, mari kita lihat sama-sama. Dan kalau ada masalah tolong sampaikan saja dimana desanya, dimana kelurahannya, dimana kecamatannya kita akan coba jajaki seperti apa. Karena kelihatannya memang ada hal-hal yang kadang-kadang kita harus turun lebih jauh kelapangan untuk melihat seperti apa tindakan yang akan kita lakukan. Mentan selalu siap untuk bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI, kami tidak akan jalan sendiri Pimpinan, Insya Allah kami tidak ada, Dirjen-Dirjen saya tidak boleh jalan sendiri harus bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI seperti itu. Saya berharap kita perluas padat karya, terutama jalan-jalan itu di semua provinsi, satu provinsi kita berharap kalau Bapak Pimpinan setuju minimal ada 10 padat karya yang harus dilakukan. Dan itu akan langsung memberikan dampak pendapatan langsung kepada rakyat, tetapi kapan mainnya itu Pak, bulan Ramadhan sampai mendekati, sehingga itu juga kami langsung minta menstimulan.

Ijin, kalau mungkin jawaban dari Eselon I yang kami miliki kalau berkenan kami boleh diberikan kesempatan untuk Rapat Dengar Pendapat langsung untuk mengolah secara teknis yang mana yang perlu kami lakukan penyesuaian.

Kurang lebih minta maaf Bapak Pimpinan.

Sekian.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada saudara Menteri.

Saya membaca berita pada waktu itu bulan Maret ada Ratas dengan Presiden, saudara Menteri menyampaikan stock gula surplus jumlahnya 368 ribu ton, nyatanya harga masih tetap mahal.

Yang kedua, beberapa waktu itu saudara Menteri datang ke PT. Suri Nusantara melihat stock daging. Yang konon beritanya entah benar, entah tidak, stocknya ada 5000 ton. Tapi saya dapatkan info dari orang dalam yang mengurus jumlah stocknya cuman ada 1.500 ton.

Kemudian masalah daging kerbau yang tidak bisa masuk ke Indonesia, memang sudah selayaknya tidak bisa masuk. Karena India itu masih ada

PMK, cuman Dirjen PHK-nya saja dikasih tahu berkali-kali dablek. Sudah saya ingatkan berkali-kali coba lihat, kita lihat aturan mengenai dari WHO. Harusnya dikaji ulang kenapa sih tidak diberdayakan peternakan dalam negeri.

Kemudian ini saya tayangkan sedikit, kemarin ada Rakortas ada rencana seperti ini, tayangkan. Stimulus peternakan, kemudian ini menugaskan sekali lagi saya jelaskan menugaskan kepada PPI dan Berdikari untuk membeli ayam hidup, kemudian dipotong ditaruh di cold storage. Kira-kira membelinya dengan siapa. PPI dan Berdikari tidak punya fasilitas potong dan tidak punya fasilitas cold storage penyimpanan. Jadi saya harap saudara Menteri intervensi juga, karena masalah pangan ini yang tanggungjawab produksi adalah Kementerian Pertanian.

Saudara Menteri, Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertanian. Jadi kalau ada kewenangan ataupun apa masalah misalnya dengan Bulog itu diselesaikan sesama Pemerintah. Kalau saya mendorong, kenapa tidak langsung saja kasih ke Bulog, Bulog kan punya fasilitas, punya yang lain-lain. Saya juga disini mencermati juga, kenapa harga ayam sampai jatuh? Karena ijin peternakan besar itu diberikan secara brutal, tidak secara peraturan. Misalnya, kalau perusahaan besar wajib punya pabrik pengolahan ayamnya, wajib. Jadi jangan perusahaan besar memproduksi menjual ke pasar, tetapi harus dalam bentuk sudah siap makan, siap saji. Inikan tidak, coba kita lihat yang punya sampai akhir cuman berapa perusahaan.

Kemudian lagi saya juga agak tergelitik ada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang, Penerbitan Perijinan Usaha Sektor Pertanian kepada BKPM. Ini yang agak menggelitik saya, biasanya kalau saya punya kewenangan saya tidak kasih ke orang lain, ini diberikan kepada BKPM. Disini ada 22 item, saya rasa ini saya juga bingung kok masalah misalnya ijin pemasukan dan pengolahan bahan pakan hewan ini diserahkan kepada BKPM. Walaupun dari Kementerian Pertanian mengirimkan LO-nya kesana. Sedangkan saya yakin di BKPM tidak punya tempat untuk mengolah ini semua. Inilah yang jadi, saya juga bingung kok bisa keluar Permen ini.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian sudah menyampaikan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Pada Rapat Kerja dialog, diskusi, saran hingga masukan Anggota Komisi IV DPR RI menggarisbawahi hal sama, antara lain yaitu pemotongan dan realokasi anggaran dilakukan oleh Eselon I non teknis. Kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada petani dan kegiatan kurang mendukung pada sasaran program. Kemudian agar pemotongan dilakukan pada kegiatan manajemen sebesar 50% serta realokasi anggaran diarahkan kepada kegiatan untuk peningkatan produksi dan padat karya sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia.



Selanjutnya kami akan membacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja yang belum ada pemotongan lagi. Ini masih yang lama 3,6 karena kita juga belum terima surat resminya, saya baru mendapatkan info saja.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian Pertanian mengenai usulan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan pangan sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Anggota?

Pemerintah?

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Pak Ketua, Hermanto Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sabar dulu Pak, saya juga stress mimpin sendiri ini Pak.

Pemerintah bagaimana?

**MENTERI PERTANIAN:**

Siap Pak.

**KETUA RAPAT:**

Setuju?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IV DPR RI meminta agar *refocusing* dan realokasi kegiatan dilakukan melalui pemotongan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada petani sebesar Rp2.449 miliar yang berasal dari:
  - a. Sekretaris Jenderal sebesar Rp150 miliar.
  - b. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp135 miliar.
  - c. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp130 miliar.
  - d. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp220 miliar.
  - e. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp420 miliar.

- f. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp204 miliar.
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp590 miliar.
- h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp430 miliar.
- i. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp20 miliar.
- j. Badan Karantina sebesar Rp150 miliar.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian juga melakukan pemotongan seluruh kegiatan yang berasal dari kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar negeri, rapat dan seminar serta kegiatan yang tidak prioritas atau kurang mendukung sasaran program sebesar 50% pagu sesuai arahan Presiden.

Anggota?

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, bagaimana Bapak Hermanto.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Itu kesimpulan nomor 2 itu, itu catatannya harus memperhatikan pandangan-pandangan Anggota yang terkait dengan misalnya itu adalah lebih memperkuat menambahkan pada ketersediaan pangan di Dirjen Ketahanan Pangan dan Dirjen. Jadi dua Dirjen itu harus ditambah lagi anggarannya, *refocusing*-nya kesana Pak Ketua. Dan tidak mengurangi anggaran dari PSP.

Demikian Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Anggota setuju?

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Darori Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, lanjut.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Usul Darori Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, Kanjeng silakan.

Tolong yang lain jangan ikut nyambung dulu, kasih yang sudah saya sebutkan namanya untuk bicara, gantian Bapak-bapak.

Silakan Kanjeng.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Terima kasih Ketua.

Tadi Bapak Menteri menyampaikan bahwa relokasi anggaran mau dipelajari kembali, tetap jumlahnya Rp2,4 triliun. Maka usul saya rinciannya jangan ditampilkan dulu nanti biar kementerian bebas melakukan *refocusing* dan realokasi Bapak Ketua. Kalau sudah ditetapkan per Dirjen sulit nanti menggeser-geser lagi Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke, kalau usulannya begitu saya terima untuk A sampai Z dihapus saja, biar nanti kita baru bahas kembali karena kan masih ada pemotongan lagi.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Tambah lagi Ketua, ijin Ketua, Ichsan Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bapak Ichsan.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Ketua, kalau boleh tadi sesuai dengan Bapak Hermanto bilang dengan memperhatikan masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja ini. Jadi betul karena Bapak Darori A sampai Z itu dihilangkan tapi ditambahkan klusul dengan memperhatikan masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI.

**KETUA RAPAT:**

Masukan yang bagaimana Pak Ichsan?

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Tadi masukan-masukan seperti misalnya refocusing jangan Balitbang, misalnya Karantina dan sebagainya. Tadikan teman-teman banyak masukannya itu, kan dari Kementerian Pertanian sudah mencatat semua masukannya. Jadi 2,44 itu refocusingnya itu pada konteks dengan memperhatikan masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI. Kalau detailnya nanti biar teman-teman pertanian yang mendetailkan.

Itu Bapak Ketua, ijin Ketua.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):**

Ijin Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, Bapak Dedi dulu baru Bapak Suhardi.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):**

Saya pikir tidak usah ada tambahan lagi kan sudah ada di point ketiga, bahwa fokusnya adalah untuk dilakukan untuk hal-hal yang bersentuhan dengan pertanian, peningkatan produktif. Usulan kita ini berikut di peningkatan produktifitas.

**KETUA RAPAT:**

Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Saya menjelaskan disini setelah inipun ada lagi pemotongan, jumlahnya itu pagu anggaran Kementerian Pertanian kurang lebih hampir Rp14 triliun. Dari Rp21.055.309.000.000,00 dipotong Rp7.005.523.000.000,00 jadi masih banyak kesempatan untuk motong lagi realokasi lagi, ini hanya untuk kesimpulan rapat, karena kalau Rapat Kerja harus ada kesimpulan rapat. Jadi tidak usah dipermasalahkan masalah ini, masalah itu lagi.

Saya bacakan lagi.

2. Komisi IV DPR RI meminta agar refocusing dan realokasi kegiatan dilakukan melalui pemotongan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada petani sebesar Rp2.449 miliar. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian juga melakukan pemotongan seluruh kegiatan yang berasal dari kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar negeri, rapat, seminar serta kegiatan yang tidak prioritas atau kurang mendukung sasaran program sebesar 50% dari pagu sesuai arahan Presiden.

Anggota?

Pak Menteri?

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Sebelum setuju saya ingin pertanyakan angka Rp2,4 triliun itu, itu dengan landasan apa sehingga ada nilai Rp2,4 triliun itu Pak Ketua, untuk difocusing dengan rincian yang tadi jelas itu. Saya juga agak mengerti dengan rinciannya itu lebih rasionalnya karena ada perbandingan yang bagus dari Eselon I yang ada. Hanya saja Rp2,4 triliun ini yang saya butuh penjelasan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Suhardi Duka, Rp2,4 triliun ini setelah kita melihat banyak hal-hal yang tidak penting contohnya tadi, yang seperti saya tanyakan di PSP Rp245 miliar untuk operasional. Ini hasil sisiran dari kita semuanya, contohnya Bapak Suhardi Duka Bapak kalau punya bahan buka halaman 27 nomor 8 dukungan manajemen pusat dan daerah Rp254 miliar.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Mohon maaf Bapak Ketua, berarti dari Rp1,8 triliun yang difocusing oleh Menteri tadi tambah yang disampaikan oleh Bapak Ketua menjadi Rp2,4 triliun. Itu maksudnya Bapak Ketua? Oke, saya setuju.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri?

**F-PG (Ir PANGGAH SUSANTO, M.M.):**

Barangkali jangan eksak angka seperti itu Bapak Ketua, mungkin minimal atau bagaimana karena masih akan dirinci lagi nantinya.

**KETUA RAPAT:**

Saya paham Bapak Panggah, ini hanya sementara saja, toh nanti juga ada pemotongan lagi.

Pak Menteri?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):**

Mohon ijin Bapak Ketua, saya mau bicara sebentar.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ketua.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Bahwa penghematan anggaran, pemotongan itu ada beberapa poin yang menjadikan dasar. Yang pertama yang tidak bisa dipotong adalah belanja mengikat, yang kedua adalah yang sudah direalisasikan sampai dengan hari ini. Yang ketiga adalah yang sudah dalam posisi *on standing contract*. Selain itu, untuk PPSDMP honor dan BOP Penyuluh Rp411 miliar itu tidak bisa dipotong, kalau ini dipotong mereka tidak akan dapat honor di atas bulan April.

Oleh karena itu Pak Ketua, kalau dirinci tadi ini sebagai contoh Sekjen sisa anggaran yang tersedia saat ini dibuat realisasi out standing contract dari belanja mengikat tinggal Rp144 miliar. Kalau dipotong Rp150 miliar ya sudah tidak ada kegiatan sama sekali. Contoh yang kedua, Badan Litbang Pertanian setelah dipotong belanja mengikat karena banyak UPT, *out standing contract* dan realisasi ini tinggal Rp551 miliar, kalau dipotong Rp500 miliar praktis kita tidak ada kegiatan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Sekjen, saya sangat paham apa yang Bapak maksud. Tetapikan nanti kita akan bahas kembali, saya jelaskan akan dibahas kembali melalui Rapat Dengar Pendapat.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sudah jelas?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Jelas.

**KETUA RAPAT:**

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar hasil efisiensi dialokasikan untuk meningkatkan volume pada kegiatan prioritas eksisting yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan bersentuhan langsung dengan kesejahteraan petani antara lain pembelian gabah, kegiatan perkarangan pangan lestari, bantuan pangan, bantuan benih, bantuan alsintan dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian.

Anggota?

Pak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam kegiatan pengembangan kawasan jagung, benih yang dibagikan berkualitas bukan lagi kelas 3 yang seperti sekarang ini banyak beredar dilapangan.

Anggota?

Pak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merealokasi anggaran kegiatan pengembangan komoditas kedelai dengan pengembangan komoditas kacang-kacangan yang lainnya yang memiliki potensi pasar yang baik.

Anggota?

Pak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan upaya khusus dalam rangka menjaga stabilitas harga ayam di tingkat peternak dengan membuat regulasi yang terkait.

Saya rasa tadi regulasinya sudah dibacakan juga, sudah disampaikan oleh Bapak Menteri kepada Anggota Komisi IV DPR RI.

Anggota?

Pak Menteri?

**F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):**

Pak Ketua, itukan sudah berlarut-larut masalah itu yang diperlukan adalah penyelesaian permanen, jadi tidak terulang-ulang terus ini masalah. Pak Ketua, kalau bisa disini ditekankan mengenai penyelesaian secara permanen gitu Pak, jadi biar tidak terulang-ulang terus masalah ini.

**KETUA RAPAT:**

Ya dirubah saja.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Ketua, saya usul point 6 itu Ketua, bukan disitu poinnya. "Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan upaya khusus dalam rangka penyelesaian secara permanen untuk menjaga stabilitas harga ayam di tingkat peternak dengan membuat regulasi".

**KETUA RAPAT:**

Ya, tidak bakal selesai kalau pejabatnya tidak diganti.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Ya, itu tergantung Bapak Menteri Bapak Ketua, terserah Bapak Menteri itu yang penting kita mendorong.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Saya bacakan ulang nomor 6.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan upaya khusus dalam rangka penyelesaian secara permanen untuk menjaga stabilitas harga ayam di tingkat peternak dengan membuat regulasi terkait.

Anggota?

**F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):**

Kenapa tidak langsung spesifik untuk membeli Ketua.



**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, setuju?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merealokasi anggaran pengadaan pupuk organik yang tersebar di beberapa lokasi Eselon I, karena program tersebut cukup dialokasikan melalui subsidi pupuk organik.

Pak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Pak Ketua, saya ingin bicara khusus. Dalam kondisi sekarang ini semangat tani harus kami pikirkan. Oleh karena itu, pupuk menjadi strategi di dalam menjaga alokasi kita agar ketersediaan pangan dan semangat mereka untuk terus bertanam bisa dilakukan. Itu yang pertama.

Yang kedua, untuk subsidi untuk pupuk organik kita berharap menjadi stimulant yang juga akan kita lakukan para petani atau daerah, bahwa hal-hal teknis lainnya kita bicarakan terlebih dahulu tidak usah masuk dalam posisi khusus untuk point 7 ini. Mungkin alokasi yang tepat ada di bidang pupuk dan yang lain akan dikerjakan diluar kesimpulan ini.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, masalahnya itukan sudah ada subsidi pupuk organik, jadi kalau ada lagi pupuk yang lain inikan menjadi rancu. Karena setahu saya di PSP saja ada 300 awalnya, kemudian di perkebunan, ditanaman pangan, di hortikultura, kenapa tidak menjadi subsidi pupuk organik saja sekalian jadi satu. Coba kita cermati.

**MENTERI PERTANIAN:**

Boleh kata pending ini sedikit, ini nanti kemungkinan kalau saya coba buat telaahannya dulu, karena ada hal-hal lain yang secara prinsip dan sudah sampai ke daerah. Saya takut mereka yang sudah mempersiapkan subsidi pupuk untuk daerah itu sudah kita bagi wilayahnya yang mana organi, yang mana yang pupuk bersubsidi itu bisa rancu dibawah Ketua, mungkin.

**KETUA RAPAT:**

Tetapi sebagian Anggota ini Pak Menteri, meminta hal ini harus tetap dimasukkan. Kalau tidak ya tetap kita pending kalau pendingnya sampai kapan ini.

**MENTERI PERTANIAN:**

Saya bukan menolak, bukan, tapi mohon saya bicara dulu dengan Eselon I kemudian. Karena strategi dilapangan sudah jalan ini, khusus untuk pupuk. Kita baik-baik saja ini menjadi sesuatu yang selalu saja dinamis di lapangan. Oleh karena itu, iijinkan saya satu hari ini duduk bersama teman-teman bagaimana mengaturnya. Kalau memang ini menjadi pending berarti besok bisa.

Itu saja Pak Ketua.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Pak Ketua, ijin.

Halaman 27, terkait dengan ini saya agak bingung. Kalau memang sudah jalan semulanya tulisannya nol disini, semulanya, volumenya semulanya nol, anggarannya nol, dan tiba-tiba dibilang sudah jalan. Mohon pencerahannya.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Menteri.

**MENTERI PERTANIAN:**

Strategi perencanaannya Pak, dan kita tidak ingin cuman minta pending khusus ini agar kita bicara. Karena mungkin menjadi bagian yang sangat dinamis dilapangan. Begitu ini tidak terjadi disitulah kemungkinan, padahal kita berharap pupuk ini bagian dari stimulant pertanian yang kita buat. Saya cuman ingin tanya dulu beberapa berkaitan dengan ini.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, karena besok itu hari Jum'at yang namanya skors itu cuman 1x24 jam. Besok itu hari Jum'at hari Fraksi, jadi saya tidak mungkin memimpin rapat kembali disini.

**MENTERI PERTANIAN:**

Saya ikutlah Ketua, Komisi IV DPR RI saya ikut. Cuman inikan strategi itu menjadi bagian-bagian, sehingga masalah inikan kita hadapi sebentar lagi kekeringan, kita menghadapi kurang lebihnya. Biarkan saya atur dulu Pak Menteri, kalau mungkin.

**F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):**

Kalau memang itu, artinya pointnya kita harus memberikan catatan bahwa ini baru perencanaan. Tidak boleh ada pelaksanaan dilapangan sampai ada keputusan 3 hari dari sekarang Pak Ketua. Karena begini, kita khawatir ini persoalannya adalah ini sebenarnya sudah dilakukan, tetapi sudah terlanjur jalan, padahal kita melihat bahwa ada potensi double anggaran antara anggaran pupuk organik dan subsidi pupuk organik. Tapi kalau Bapak Menteri mengatakan bahwa ini baru perencanaan seperti tadi dibisikan tadi sama Bapak Sekjen, ya sudah berarti kita kasih catatan saja bahwa ini memang betul-betul baru perencanaan dan kita kasih waktu 3 hari untuk memberikan jawab ini Pak Ketua, sampai hari Senin. Begitu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Ichsan.  
Selanjutnya Mbak Kiki.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Saya mau meminta penjelasan juga dari Bapak Ichsan itu, kalau tadi B Menteri menjelaskan sudah jalan. Di Dipa sebelumnya di rapat terakhir juga itu ada tetapi atas dasar apa sekarang hari ini jalan, gitu loh. Karena disemulanya ini kembali ke nol, Dipanya belum ada berarti. Coba teman-teman lihat, halaman 27 teman-teman. Saya sudah membaca ini berkali-kali, Pak Menteri juga tolong diperhatikan halaman 27. Saya bukan ini, berkasnya clear sekali disini semulanya nol Pak, atas dasar apa bisa bergerak barang itu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Silakan dijelaskan Bapak Menteri.

**MENTERI PERTANIAN (SYAHRUL YASIN LIMPO):**

Sebenarnya karena ini berdasarkan ... saya jamin itu. Jadi ini tidak ada yang belum karena begini, strategi pupuk kita adalah strategi dimana khusus untuk aktifitas tertentu untuk meningkatkan produktifitas pada wilayah tertentu, saya berharap subsidi pupuk organik itu dilakukan disitu. Ini yang saya belum tanya teman-teman, kalau ini direalokasi dan lain-lain apakah tidak mengganggu strategi kita. Tentunya kalau kita masuk pada lahan gambut, lahan rawa misalnya ini contoh saja, apakah pupuk tertentu khususnya di organik bisa masuk pupuk yang bersubsidi karena sudah teralokasi disitu masih bisa. Dan inikan kita tidak cabut, saya cuman minta pending satu hari, karena saya mau tanya dulu, mungkin ini mengganggu kita kalau tidak kita hadapkan langsung kepada Komisi IV DPR RI. Tidak ada maksud lain, tidak ada, insya Allah...

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, sudah saya jelaskan besok itu kami tidak ada sidang karena hari Jum'at, itu adalah hari Fraksi. Kalau kita skors sekarang itu, skorsing itu hanya berlaku 1x24 jam menurut Tatibnya demikian. Kalau bagi saya kemarin pun saya sama LHK begitu, LHK minta pending 3 hari tetapi tidak bisa.

**MENTERI PERTANIAN:**

Atau kita tambah satu kata disitu, melakukan evaluasi realokasi, untuk melakukan evaluasi realokasi, supaya saya ada sedikit space untuk tanya dulu pendapat teman-teman. Atau ada kata yang bisa melonggarkan saya kira.

**KETUA RAPAT:**

“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merealokasi anggaran...”.

**MENTERI PERTANIAN:**

“Melakukan evaluasi realokasi”, nantikan setelah Bapak periksa lagi bagaimana itu.

**F-PD (Dr. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Ya saya kira begitu Pak Ketua, bijaksana, mengevaluasi. Setuju ya Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Jadi tidak ada evaluasi, ini langsung merealokasi, kalau evaluasi itu masih bisa tetap berjalan.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Apa yang mau dievaluasi Pimpinan, kegiatan saja.

**KETUA RAPAT:**

Karena kegiatan inikan memang belum berjalan ini.

**F- PD (Dr. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Oleh karena itu, dievaluasi dulu untuk realokasi.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Saya punya pandangan begini Pak Ketua, karena kita ini fase perencanaan. Jadi pada fase perencanaan ini semua variable-variable yang memungkinkan untuk kita melakukan perubahan itu kita rubah sekarang bukan dievaluasi Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Betul.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Kalau dievaluasi namanya barang itu sudah jalan.

Demikian Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih Bapak Hermanto.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Cerdas Hermanto sekarang.

**KETUA RAPAT:**

Bagaimana Pak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Evaluasinya bukan kegiatannya Pak Ketua. Ini jujur saya katakan salah satu strategi yang paling utama menghadapi kegiatan pangan, gizi dalam kondisi apapun sebenarnya pupuk jangan diganggu lagi sebenarnya yang ada dipikiran saya. Oleh karena itu, kalau pupuk diganggu ini kita harus bicara pupuk yang bersubsidi itu mau ditaruh dimana, pupuk organik taruh dimana, sehingga pertumbuhan yang direncanakan bisa sampai disitu. Ini cuman sampai disitu saja Ketua, makanya saya mau bicara dengan Eselon I yang mana-mana ini. Pasti tidak meninggalkan Komisi IV DPR RI Pak Ketua, mungkin kita akan evaluasi adalah realokasi yang sudah ada sekarang ini, bagaimana itu. Dalam artian bagaimana kitakan harus ekspansi dari existing menghadapi kondisi panas atau kekeringan yang kita akan ketemu besok. Seperti itu Pak Ketua, tapi kalau memang mau dicatumkan tidak apa-apa juga bagi saya.

**KETUA RAPAT:**

Pak Menteri, selama 5 tahun terakhir tidak ada pupuk organik cair selain yang subsidi.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Pak Ketua, kalau kita mengikuti pandangan Bapak Menteri, maka statementnya itu adalah merealokasi ulang. Itu Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Hermanto, kalau kita realokasi itu berarti kita ulang Pak Hermanto.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Ya, realokasi yang sudah ada ini kita ulang lagi itu maksudnya, bukan dievaluasi.

**KETUA RAPAT:**

Seperti beli tiket pulang pergi.

Bagaimana Bapak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Pimpinan, boleh saya minta 5 menit.

**KETUA RAPAT:**

Boleh, silakan.

Ya, silakan Pak Menteri.

**MENTERI PERTANIAN:**

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI.

Terima kasih waktu yang telah diberikan karena kami.

Intinya silakan dicantumkan ini Pak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, dengan satu catatan sebenarnya yang cukup merisaukan saya pupuk subsidi. Subsidi pupuk cair itu sebenarnya peruntukannya untuk sepuluh Jawa, karena kejenuhan-kejenuhan lahan yang ada disitu. Oleh karena itu, saya minta supaya kita diberikan kesempatan kalau ini kemudian tidak kita taruh di Jawa.

Nah, kemudian di Jawa ada tidak, diluar Jawa. Oleh karena itu, ini direalokasikan luar Jawa *it's okay*, tapi yang di Jawa pupuk bersubsidi bisa

masuk tidak, ternyata pupuk subsidi bisa kan dari mana, katanya ada dari salah satu integrator petro yang akan bisa masuk menggantikan itu. Kalau itu ada Bapak silakan cantumkan disini. Saya cuman pikirkan kepentingan di Jawa.

**KETUA RAPAT:**

Begitu Bapak Menteri, kita lihat halaman 27 yang dibuat oleh Eselon I Bapak. Ini Dipanya tidak ada Pak, tiba-tiba bisa muncul. Inikan satu hal yang sangat-sangat tidak baik, tidak etika. Kalau kami menyetujui berarti kami salah, itu Pak Menteri.

**MENTERI PERTANIAN:**

Baiklah, saya tidak ada masalah dengan ini, cuman memang itu saya mau pastikan bahwa tambahan pupuk organik cair itu di Jawa ada, kalau itu ada tidak ada masalah Pak, silakan saja Pak.

**KETUA RAPAT:**

Jadi Bapak Menteri, realokasi inikan diserahkan juga nanti kepada Bapak Menteri untuk dijadikan apa, kan gitu kan.

Terima kasih.

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

8. Komisi IV DPR RI mendukung refocusing kegiatan sosial safety net dalam bentuk padat karya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI, meminta agar kegiatan padat karya tersebut diintergrasikan agar terpadu menjadi satu program, yaitu kegiatan padat karya ketahanan pangan sehingga cakupan wilayahnya dapat merata di seluruh Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp1.153.079.175.000,00.

Anggota?

Pak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

**(RAPAT: SETUJU)**

9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menghitung kembali sesuai pembahasan Rapat Kerja hari ini mengenai refocusing kegiatan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dan menyampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan antara Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pertanian dalam Rapat Dengar Pendapat.

Anggota?

Pak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

Sebelum kami menutup Rapat Kerja ini kami persilakan kepada Menteri Pertanian untuk menyiapkan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini.

Silakan Bapak Menteri.

**MENTERI PERTANIAN:**

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI,  
Teman-teman dari Kementerian Pertanian.

Sungguh saya merasa terima kasih atas nama semua, kami apa yang ada dengan dinamika yang sangat tinggi narasinya muaranya hanya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Saat inilah kami semua ini akan bekerja dengan baik di saat-saat negara seperti ini.

Saya kira semangat pertanian dan semangat petani harus bisa terjaga dengan baik, sehingga produktifitasnya tetap bisa tinggi. Ketua, saya mohon walaupun kita sudah tetapkan secara administrasi dan putusan-putusan yang ada dalam ketok-ketokan yang ada, kalau memang ada hal-hal dilapangan yang membutuhkan pendekatan-pendekatan. Saya berharap Komisi IV DPR RI dan Pimpinan membukakan saya pintu untuk melakukan konsultasi-konsultasi.

Selebihnya tidak seperti yang normal yang ada, berbagai daerah berbeda kondisinya. Kadang-kadang ada dinamika yang sangat membutuhkan kapan kita mengambil suatu keputusan. Saya berharap Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI terus mengawal bersama-sama kami agar kita bisa mengambil keputusan dalam situasi yang sedang kita hadapkan ini.



Yang terakhir, saya berharap tetap sama dengan kami saya melihat memang anggaran ini yang rata-rata seluruh kementerian seperti itu, dan kita anggaran keempat yang cukup besar yang ada. Dan kelihatannya memang arahnya sampai 50%, hampir seperti itu dari Ratas ke Ratas sudah dibicarakan seperti itu. Sementara saya tetap bertahan bahwa Kementerian Pertanian mempertahankan kepentingan keseharian masyarakat dan ini menjadi sangat penting. Jawaban yang ada kita akan bicarakan sambil kita jalan.

Oleh sebab itu, mungkin dalam perjalanan kedepan ada hal-hal yang perlu kita bicarakan yang mungkin lebih saya mau kedekatan Komisi IV DPR RI dengan jajaran Kementerian Pertanian termasuk pada kami.

Demikian Ketua, terima kasih banyak. Seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, ridha Allah bersama kita semoga kita semua sehat-sehat saja dalam situasi seperti ini.

Sekian.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada Bapak Menteri.

Kita adalah mitra, mitra harus saling mendukung, saling membantu membahu untuk kesuksesan bersama. Suksesnya Kementerian Pertanian, berarti suksesnya Komisi IV DPR RI dalam bermitra dengan Kementerian Pertanian.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini. atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil'alamin*, Rapat Kerja ini kami tutup.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.30 WIB)**

a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat,

Ttd.

**Drs. Budi Kuntaryo**  
NIP. 196301221991031001

